



UNIVERSITAS INDONESIA

**PANDANGAN PARADIGMA NEOREALISME,
NEOLIBERALISME, DAN KONSTRUKTIVISME DALAM
MELIHAT AKAR KONFLIK PADA KONFLIK PERBATASAN
DJIBOUTI-ERITREA DI DAERAH RAS DOUMEIRA TAHUN
2008**

TUGAS KARYA AKHIR

HANNA THERESIA RUTHANIA ALDA SIAHAAN

0906553740

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

DEPOK

JULI 2013



UNIVERSITAS INDONESIA

**PANDANGAN PARADIGMA NEOREALISME,
NEOLIBERALISME, DAN KONSTRUKTIVISME DALAM
MELIHAT AKAR KONFLIK PADA KONFLIK PERBATASAN
DJIBOUTI-ERITREA DI DAERAH RAS DOUMEIRA TAHUN
2008**

TUGAS KARYA AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial
di Universitas Indonesia**

HANNA THERESIA RUTHANIA ALDA SIAHAAN

0906553740

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

DEPOK

JULI 2013

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Hanna Theresia Ruthania Alda Siahaan

NPM : 0906553740

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Juli 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Karya Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Hanna Theresia Ruthania Alda Siahaan
NPM : 0906553740
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tugas Karya Akhir : Pandangan Paradigma Neorealisme, Neoliberalisme, dan Konstruktivisme dalam Melihat Akar Konflik Pada Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira tahun 2008

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Nurul Isnaeni, M.A.

(.....)

Pembimbing : Drs. Makmur Keliat, Ph.D

(.....)

Penguji Ahli : Artanti Wardhani, S.Sos, M. Phil

(.....)

Sekretaris : Andrew Mantong, S.Sos, M.Sc

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2013

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan penyertaan-Nya hingga tugas karya akhir ini dapat selesai tepat waktu. Penulisan tugas karya akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Tugas karya akhir ini bertujuan untuk melihat bagaimana tiga paradigma dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional melihat suatu fenomena. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai konflik perbatasan antara negara Djibouti dan Eritrea di daerah Ras Doumeira yang akhirnya berujung perang di tahun 2008. Dalam menganalisis kasus ini, penulis akan menggunakan paradigma neorealisme, neoliberalisme dan konstruktivisme. Penulis berharap tugas karya akhir ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional dan masyarakat luas.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam tugas karya akhir ini baik secara teknis maupun secara substansi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun yang dapat memperkaya tugas karya akhir ini. Pada akhirnya, penulis berharap tugas karya akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Depok, 15 Juli 2013

Hanna Theresia Ruthania Alda Siahaan

UCAPAN TERIMA KASIH

“In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success.” (Proverbs 3:6 LB).

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang menjadi Juruselamat dan sahabat penulis, untuk setiap penyertaan, anugerah, dan kasih setia-Nya mulai dari tahun pertama perkuliahan penulis hingga dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Selesaiannya tugas karya akhir ini semata hanya oleh kekuatan, hikmat, dan penyertaan Tuhan Yesus sehingga semuanya indah dan tepat seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan Yesus saja.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut, yang mendukung terselesaikannya tugas karya akhir ini:

1. Dra. Evi Fitriani M.A., M.IA., Ph.D dan Dra. Nurul Isnaeni M.A selaku ketua departemen dan ketua program studi sarjana regular Ilmu Hubungan Internasional.
2. Drs. Makmur Keliat, Ph.D, selaku pembimbing tugas karya akhir penulis. Terimakasih atas kesabaran, bimbingan, kemudahan, saran, kritik, dan ilmu selama penulis mengerjakan tugas karya akhir ini.
3. Artanti Wardhani, S.Sos., M.Phil, selaku penguji ahli sidang tugas karya akhir penulis. Terimakasih untuk setiap saran, kritik, dan masukannya untuk perbaikan tugas karya akhir penulis ini.
4. Yuni Reti Intarti S.Sos., M.Si selaku pembimbing akademis penulis.
5. Andrew W. Mantong, S.Sos., M.Sc., selaku sekretaris program sekaligus sekretaris sidang.
6. Andi Widjajanto, M.Sos., M.A dan Aninda R. Tirtawinata, M. Litt selaku pengajar mata kuliah *Colloquium*.
7. Seluruh dosen-dosen mata kuliah yang pernah penulis ambil selama tahun-tahun perkuliahan di Hubungan Internasional yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

8. Staf-staf di Departemen HI: Mas Roni dan Mbak Lina yang selalu penulis repotkan di UPDHI, Pak Dahlan, Mas Andre, Mbak Ayu, dan staf-staf lainnya di Departemen HI yang sering penulis repotkan soal administrasi.
9. Orangtua penulis, Papa Drs. Pangeran Siahaan dan Mama Doris Mariani Napitupulu, serta abang penulis Simon Togap Einstein Siahaan, S.T., atas semua cinta kasih, dukungan doa, dukungan finansial, dan semangat yang tanpa putus yang terus memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas karya akhir ini. *Grateful to God having you three!*
10. Ompung penulis, Ny. M. Napitupulu br.Simanjuntak, Bapak Tobing sekeluarga dan Tulang Astrid sekeluarga, atas dukungannya dan doanya selama ini. Juga kepada semua keluarga besar penulis, baik dari keluarga besar Siahaan maupun Napitupulu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, untuk setiap dukungan doa dan semangatnya selama ini. *God bless us all!*
11. Keluarga Om Ismet, Tante Nurhawa, Bang Desmi, Delly, dan Meli. Terimakasih untuk setiap dukungan doa, dukungan semangat, dan kebersamaan dengan penulis dan keluarga penulis.
12. #HIUI2009 untuk kebersamaan selama 4 tahun ini. Terkhusus terimakasih untuk Dwinta Kuntaladara, Jaqualine Lukman, Mardani 'Donnie' Arrahman, Yohanes Triponda Glory, Dicki Abdul Ghaniy, Bagus Yudoprakoso, dan Halimun Muhammad, *thankyou for each of our quality time*; Diky 'Tinz' Avianto yang selalu menyemangati penulis; Mikha Benanta Purba sebagai saudara seperbimbingan penulis, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. *I'll definitely miss #HIUI2009!*
13. Senior-senior dan junior-junior penulis selama di HI. *Especially thanks for* Kak Y. Nindito Adisuryo, Kak Rindo Sai'o, dan Muhammad Naufal untuk kebersamaan selama ini. Terimakasih juga buat Saraya Adzani, Budi Larasati dan Malinda Damayanti yang sering penulis repotkan dengan urusan minjam-meminjam buku di UPDHI. *See you again in other times.*
14. Kelompok Kecil Batak-Beijing: Kak Seprina Frisca Tobing, Caroline Putri Pratama, Lydia Luhur, Astrid 'Acid' Meirina Elisabeth Siahaan. Terimakasih telah menjadi *sister-in-Christ* penulis untuk boleh bertumbuh

bersama dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Terkhusus terimakasih untuk Kak Frisca yang begitu sabar menghadapi penulis dan mengingatkan untuk: “Selamat menikmati kasih Allah yang sudah lebih dari cukup, Na.” *I love you!*

15. Persekutuan Oikumene FISIP Universitas Indonesia, persekutuan yang Tuhan anugerahkan sehingga penulis boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. *Thankyou beloved brothers sisters in Christ*: Kak Mita Yesyca, Reinhard Simatupang, Sania Saragih, Ratna Pakpahan, Masniar Hutajulu, Debby Sitinjak, Victor Rajagukguk, Jonathan Nainggolan, Monic Panggabean, Yohana Supialfi, dan Meista Yuki untuk setiap tawa, doa, *sharing*, dan air mata dalam mengerjakan pelayanan. *DOPER's sisters in Christ* yang Tuhan anugerahkan sebagai kado ultah penulis di usia ke-20: Lodelvi, Christie Limbong, dan Belinda Kaban, terimakasih untuk setiap kesabaran, semangat, cinta kasih, *sharing*, dan dukungan doa selama ini. Terimakasih kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik sepersekutuan untuk waktu-waktu menyenangkan mengerjakan pelayanan bersama kalian. *To God be the Glory!*

16. Panitia Paskah Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia 2013: Yanika Sihotang, Cindy Sitompul, Samuel Sormin, Fransisca Sinambela, Lestria Siahaan, Lusiana Simarmata, Josua Sihombing, dan Debora Harianja. Terimakasih untuk 2 bulan penuh dengan keceriaan, *sharing*, doa, dan semangat yang diberikan tiada hentinya. Terkhusus untuk Pebriani Pakpahan, rekan sekerja penulis di divisi Doa, Pemerhati dan Konsumsi, terimakasih juga untuk setiap kesabaran, pengertiannya yang ekstra, dan dukungan doanya.

Terimakasih juga untuk teman-teman sepelayanan lainnya dalam Paskah POUI 2013: Puspa Astriana, Elfraldo Tamba, Rimson Purba, Christian Hidayat, Susiana, Puja Sinaga, Zafella Galstaun, Rachel Elizabeth, Redry Maynard, Vaul Hutauruk, Rahayu Kristiyanti, dan Lucy Sihite. *Will definitely miss those quality times!*

17. Eva Rosalina Sihombing, atas cinta kasih, kesabaran, semangat dan doanya sebagai sahabat penulis sejak masa Sekolah Dasar. *This is for you!*

18. Nella Octaviany Siregar, Dina Maulidya Rahmi, Eza Emilda Utami, Elga Emertha, Riza Haviza. Terimakasih untuk setiap semangat, keceriaan, dan *quality time* yang diberikan kepada penulis selama ini. *I love you all!*
19. Himpunan Mahasiswa Jambi Universitas Indonesia; teman-teman, kakak-kakak, adik-adik HIMAJA yang *superb*. Terimakasih untuk setiap keceriaan dan kebersamaan dengan kalian dalam DUIIJ 7 dan DUIIJ IX. *Lotsa love!*
20. Sahabat-sahabat penulis selama di FISIP: Agung Budi Pratama, sahabat penulis sejak masa PSAF, terimakasih waktu-waktu kebersamaan, kontemplasi, dan semangatnya yang tidak ada habisnya; kembar Angelina Lafyranti dan Angelini Sollistifani, sahabat penulis dari masa paduan suara hingga akhirnya lulus bersama (*we've made together, twins, thanks God!*), Rachmat Bontara, yang selalu berhasil menceriaikan dan menyemangati penulis dengan celotehan-gak-penting-dan-WhatsApp-random-nya; Calvin, *Mr-Know-It-All-yang-pinter-kadang-nyebelin*; Reyhan Fadila, yang cuek tapi selalu berhasil menceriaikan dan menyemangati penulis; dan Jiwo Damar Anarkie, yang kesibukan dan integritasnya membuat penulis kagum. Senang sekali memiliki sahabat-sahabat hebat seperti kalian!
21. Terakhir, untuk setiap pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk setiap dukungan dan doanya sehingga tugas karya akhir ini dapat tercipta.

Depok, 15 Juli 2013

Hanna Theresia Ruthania Alda Siahaan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanna Theresia Ruthania Alda Siahaan

NPM : 0906553740

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Departemen : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Karya Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pandangan Neorealisme, Neoliberalisme, dan Konstruktivisme dalam
Melihat Akar Konflik pada Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah
Ras Doumeira tahun 2008**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 15 Juli 2013

Yang menyatakan



(Hanna Theresia Ruthania Alda Siahaan)

ABSTRAK

Nama : Hanna Theresia Ruthania Alda Siahaan
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tugas Karya Akhir : Pandangan Paradigma Neorealisme, Neoliberalisme, dan Konstruktivisme dalam Melihat Akar Konflik Pada Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira tahun 2008

Fokus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pandangan tiga paradigma dalam studi Ilmu Hubungan Internasional terhadap akar konflik pada konflik perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira tahun 2008. Melalui paradigma neorealisme, akar konflik akan coba dijelaskan dalam konsep sistem anarki dan *balance of power*. Melalui paradigma neoliberalisme, akar konflik akan dijelaskan dalam konsep interdependensi dan nilai demokrasi pada dua negara. Sedangkan melalui paradigma konstruktivisme, akar konflik akan coba dijelaskan dalam konsep identitas.

Kata Kunci: konflik perbatasan, Djibouti, Eritrea, Ras Doumeira, sistem anarki, *balance of power*, interdependensi, identitas

ABSTRACT

Name : Hanna Theresia Ruthania Alda Siahaan
Major : International Relations
Judul Tugas Karya Akhir : The Neorealism, Neoliberalism, and Constructivism's Views on Roots of Border Conflict between Djibouti and Eritrea in Ras Doumeira on 2008

The focus of this writing is to show how three paradigms in International Relations views the roots of border conflict between Djibouti and Eritrea in region named Ras Doumeira on 2008. Based on neorealism paradigm, the roots of conflict will explained by concept of anarchic system and balance of power. In neoliberalism, the roots of conflict will explained by interdependence concept and democracy value. And at last, the roots of conflict from constructivism will explained by identity concept.

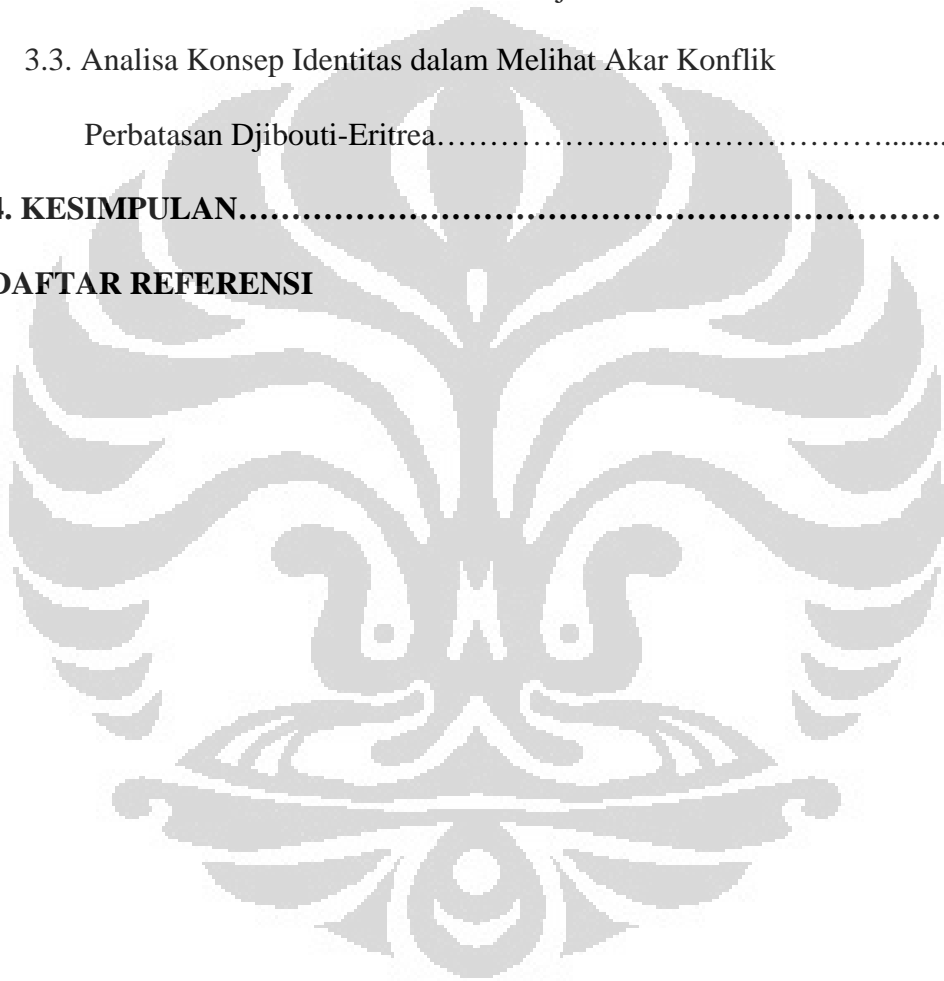
Keywords: border conflict, Djibouti, Eritrea, Ras Doumeira, anarchic system, balance of power, interdependence, identity

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK/ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Landasan Pemikiran.....	4
1.3.1. Konsep Sistem Anarki dan <i>Balance of Power</i>	5
1.3.2. Konsep Interdependensi dan Nilai Demokrasi.....	8
1.3.3. Konsep Identitas.....	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
2. TINJAUAN KONDISI KEAMANAN KAWASAN TANDUK AFRIKA DAN ESKALASI KONFLIK PERBATASAN DJIBOUTI-ERITREA DI DAERAH RAS DOUMEIRA TAHUN 2008.....	15
2.1. Gambaran Umum Situasi Keamanan Sebelum Eskalasi Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea.....	16
2.1.1 Gambaran Umum Situasi Keamanan Kawasan Tanduk Afrika.....	16
2.1.2. Gambaran Umum Situasi Keamanan Negara Djibouti.....	20
2.1.3. Gambaran Umum Situasi Keamanan Negara Eritrea.....	23
2.2. Tinjauan Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira.....	27
2.2.1. Tinjauan Situasi dan Status daerah Ras Doumeira.....	27
2.2.2. Instabilitas Relasi Djibouti-Eritrea Pra-Eskalasi Konflik tahun 1996-2007.....	28
2.2.3. Eskalasi Konflik Perbatasan antara Djibouti dan Eritrea tahun 2008.....	30
2.2.4. Menuju Upaya Perdamaian antara Djibouti dan Eritrea tahun 2008-2010.....	32

3. ANALISIS LANDASAN PEMIKIRAN DALAM MELIHAT AKAR KONFLIK.....	35
3.1. Analisa Konsep Sistem Anarki dan <i>Balance of Power</i> dalam Melihat Akar Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea.....	35
3.2. Analisa Konsep Interdependensi dan Nilai Demokrasi dalam Melihat Akar Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea.....	44
3.3. Analisa Konsep Identitas dalam Melihat Akar Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea.....	54
4. KESIMPULAN.....	61
DAFTAR REFERENSI	



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar

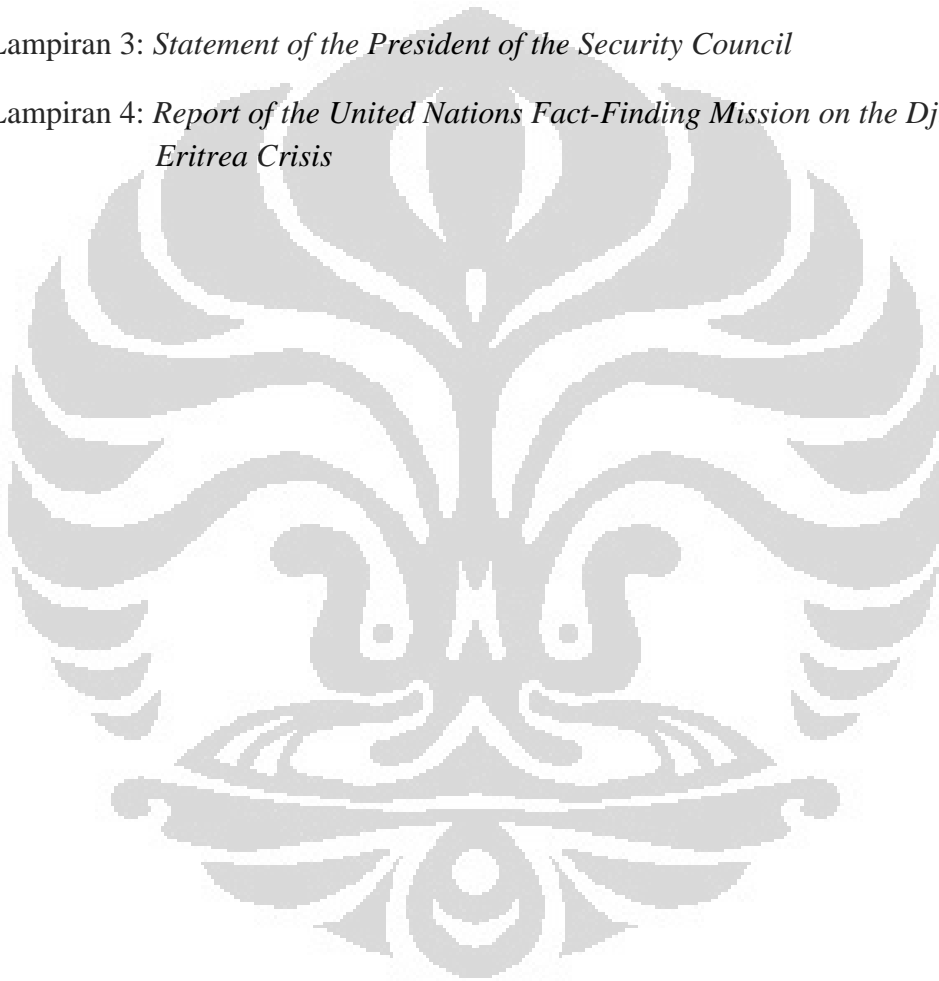
Gambar 1.1. Peta Kawasan Tanduk Afrika di Pertengahan Tahun 1930-an.....	2
Gambar 1.2. Peta Perbatasan Negara Djibouti dan Eritrea di daerah Ras Doumeira.....	3

Tabel

Tabel 2.1. Perbandingan Kekuatan Militer Djibouti dan Eritrea Tahun 2007.....	32
Tabel 3.1. Kekuatan Militer Djibouti tahun 1997-2007.....	37
Tabel 3.2. Perbandingan Kekuatan Militer Negara Djibouti-Eritrea Tahun 2008.....	38-40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Profil IGAD (*Inter-governmental Authority of Development*)
- Lampiran 2: *Report of the Chairperson of the Commission on the Situation at the Border Between the Republic of Djibouti and the State of Eritrea and Developments in Relations Between the Two Countries*
- Lampiran 3: *Statement of the President of the Security Council*
- Lampiran 4: *Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Djibouti-Eritrea Crisis*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Konflik bukanlah suatu bahasan asing lagi di dunia hubungan internasional. Konflik—khususnya konflik antar negara—biasanya dihubungkan dengan berbagai hal seperti adanya tindak kekerasan antar pihak yang bertikai, adanya posisi yang tak seimbang dalam suatu isu, adanya perilaku yang tidak bersahabat dari satu negara, atau timbulnya berbagai jenis aksi diplomasi dan aksi militer.¹ Penyebab konflik pun beragam, beberapa diantaranya yaitu kepentingan untuk menambah wilayah atau ingin mendapatkan wilayah yang lebih aman, mendapatkan keamanan, mendapatkan kontrol atas sumber daya-sumber daya yang berharga, mendapatkan akses untuk pasar baik pasar regional maupun dunia, mendapatkan prestise, mendapatkan aliansi, ataupun meruntuhkan atau menggulingkan kekuasaan suatu pemerintah.²

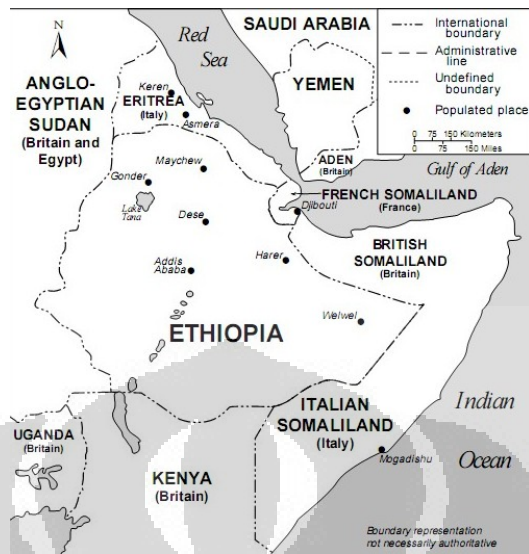
Masih menurut Holsti, terdapat tiga elemen dalam sebuah konflik³: **Pertama**, ada isu yang menyebabkan terjadinya perselisihan antar-pihak yang berkonflik dan juga adanya ketertarikan suatu posisi yang ingin diraih oleh salah satu pihak yang berkonflik. **Kedua**, ada tensi yang terjadi dalam sebuah konflik; ada kecurigaan dan ketidakpercayaan antara satu pihak dengan pihak lainnya. **Ketiga**, ada unsur aksi di dalam konflik. Maksudnya adalah ada salah satu pihak yang ‘mendeklarasikan perang’ atau perselisihan dengan pihak lainnya. Wujud nyatanya dapat berupa propaganda, tindakan koersif dalam hal ekonomi, ataupun ancaman dan intervensi militer.

Salah satu kawasan di dunia ini yang rawan terjadi konflik adalah kawasan Afrika Timur atau yang biasanya dikenal dengan kawasan Tanduk Afrika (*Horn of Africa*). Kawasan Tanduk Afrika adalah sebuah kawasan yang terdiri dari empat negara yakni Djibouti, Eritrea, Ethiopia dan Somalia.

¹ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis Sixth Edition* (New Jersey: Prentice Hall, 1992), 348.

² *Ibid.*, 349.

³ *Ibid.*



Gambar 1.1: Peta Kawasan Tanduk Afrika di pertengahan tahun 1930-an

Sumber: Horn of Africa and Southwest Arabia Mid 1930s, diakses dari <http://mapsof.net/map/horn-of-africa-and-southwest-arabia--mid-1930s>

Negara-negara di kawasan Tanduk Afrika mengalami banyak hal, mulai dari kekacauan politik yang berlarut-larut, bangkit dari ‘dendam’ (*grievance*) secara lokal maupun nasional, identitas politik dan juga rivalitas antar-negara.⁴ Beberapa konflik yang pernah terjadi diantaranya adalah konflik di negara Somalia dan juga konflik berkepanjangan antara negara Eritrea dan Ethiopia. Salah satu konflik yang terjadi di kawasan Tanduk Afrika namun tidak cukup banyak terekspos, yaitu antara negara Djibouti dan Eritrea. Konflik yang terjadi adalah konflik menyoal persengketaan perbatasan di daerah bernama Ras Doumeira di Pulau Doumeira yang merupakan daerah strategis antara kawasan Tanduk Afrika dan kawasan Timur Tengah tepatnya di Laut Merah (*Red Sea*).

⁴ “Crisis in the Horn of Africa,” Social Science Research Council (SSRC), diakses pada 24 Oktober 2012, <http://hornofafrica.ssrc.org>.



Gambar 1.2: Peta Perbatasan Negara Djibouti dan Eritrea di daerah Ras Doumeira

Sumber: Inter-State Conflict in the Horn of Africa, diakses dari <http://afrikansarvi.fi/issue2/25-artikkeli/62-inter-state-conflicts-in-the-horn-of-africa>

Pada 1862, Perancis menandatangani perjanjian dengan bangsa Afar untuk perluasan wilayah kekuasaannya (yang kemudian menjadi cikal-bakal negara Djibouti) sampai ke daerah Obock, dan daerah ini membentang dari Ras Ali di selatan sampai Ras Doumeira ke utara (bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab II). Pada 1890, Italia (yang saat itu menduduki daerah yang menjadi cikal bakal Eritrea) ingin menduduki wilayah di sepanjang Laut Merah. Protokol di antara kedua negara ditandatangani saat itu oleh Perancis dan Italia sebagai negara penjajah masing-masing wilayah pada 24 Januari 1900 dan dalam protokol tersebut disebutkan bahwa pengawasan dan kepemilikan Ras Doumeira dimiliki bersama oleh kedua negara.⁵

Seiring berjalannya waktu, negara-negara dibawah jajahan Italia dan Perancis menjadi negara yang merdeka. Negara jajahan Italia berkembang menjadi Eritrea dan negara jajahan Perancis menjadi Djibouti. Kedua negara memiliki daerah perbatasan sepanjang sekitar 110 km. Konflik kedua negara dimulai sejak 1996. Saat itu, Eritrea dan Djibouti hampir berperang karena klaim Djibouti bahwa Eritrea menyerang kawasan Ras Doumeira, daerah yang sebagian besar dihuni oleh suku Afar Ethiopia. Klaim Djibouti saat itu didasarkan pada laporan bahwa Eritrea menerbitkan peta wilayahnya yang tidak sesuai dengan

⁵ U.S. Department of State, *International Boundary Study 154* (Washington, DC: Bureau of Intelligence and Research, 1976), 2-3.

perbatasan dan teritorial aslinya dan memetakan ulang daerah perbatasan.⁶ Namun eskalasi masalah persengketaan perbatasan di tahun 1996 ini dapat diredam setelah militer Eritrea akhirnya menarik pasukannya dari daerah perbatasan Ras Doumeira dan Djibouti menarik pernyataan mereka atas Eritrea pada Mei 1996.⁷ Sejak 1996, hubungan kedua negara tidak pernah sama lagi dan secara tidak langsung ‘terikat’ dalam kecurigaan antara satu sama lain. Kedua negara berusaha untuk tidak lagi terlibat dalam konflik. Namun, di tahun 2008, kedua negara justru terlibat perang terbuka satu sama lain. Konflik kedua negara ini akhirnya dapat diselesaikan dengan perjanjian perdamaian tahun 2010 dengan dibantu oleh negara Qatar dan PBB.

1.2. Rumusan Permasalahan

Melihat dari latar belakang permasalahan, maka rumusan permasalahan yang coba diangkat oleh penulis dalam tulisan ini adalah, *bagaimanakah pandangan paradigma neorealisme, neoliberalisme, dan konstruktivisme dalam melihat akar konflik pada konflik perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira tahun 2008?*

1.3. Landasan Pemikiran

Penulis akan menggunakan paradigma neorealisme, neoliberalisme dan konstruktivisme dalam mencoba mengkaji akar konflik dari konflik perbatasan Djibouti dan Eritrea ini. Adanya sistem anarki dan *balance of power* akan mewakili paradigma neorealisme. Kedua, interdependensi dan nilai demokrasi yang diharapkan mendorong kerjasama di antara kedua negara akan mewakili paradigma neoliberalisme. Terakhir, konsep identitas dari konstruktivisme akan berusaha melihat apakah kedua negara sudah memiliki *common understanding* dan *common identity* satu sama lainnya.

⁶ Berouk Mesfin, “The Eritrea-Djibouti Border Dispute,” *Institute for Security Studies Situation Report* (2008): 2.

⁷ Ibid.

1.3.1. Konsep Sistem Anarki dan *Balance of Power*

Dalam tulisannya yang berjudul *Theory of International Politics*, Kenneth Waltz memaparkan bahwa terdapat dua sistem dalam struktur politik, yakni sistem hierarki dan sistem anarki.

Sistem hierarki (atau juga dikenal dengan istilah sistem domestik) bersifat tersentralisasi. Maksudnya adalah ada bagian-bagian yang *super-ordination* dan ada yang termasuk dalam *sub-ordination*; ada yang ‘memerintah’, ada yang ‘diperintah’. Sementara sistem anarki (atau juga dikenal dengan istilah sistem politik internasional) tidak tersentralisasi, dimana setiap bagian itu sama; tidak ada yang ‘memerintah’ dan tidak ada yang ‘diperintah’. Ketika sistem hierarki memiliki ‘institusi pemerintah’-nya, secara kontras sistem anarki tidak memiliki ‘institusi pemerintah.’ Menurut Waltz, ketika negara-negara berada dalam sistem yang anarki maka negara-negara tersebut harus bersiap menghadapi segala situasi karena natur dari negara adalah negara yang berperang (*the nature of the state is a state of war*). Ini bukan berarti bahwa perang pasti terjadi tapi ketika suatu negara menggunakan *force* atau tidak, perang sewaktu-waktu bisa terjadi.⁸ Prinsip *self-help* adalah prinsip paling penting dalam sistem anarki. Dengan adanya *self-help* dalam sistem anarki maka setiap negara yang ada akan berusaha untuk berbuat sesuatu yang berkaitan dengan proteksi negaranya. Dalam *self-help* juga akan terlihat sampai sejauh mana sebuah negara dapat bertahan dalam sistem tersebut. Ketika negara mampu bertahan dengan situasi anarki yang ada, ini akan berpengaruh kepada perilaku negara. Selain itu elemen lain dalam sistem anarki adalah *power* dan proses *struggling*. Negara-negara dalam sistem anarki bertindak demi kepentingan mereka dan tak jarang menggunakan *force* untuk mendapatkan kepentingannya.⁹

Waltz menuliskan bahwa hal yang dapat membuat sistem anarki stabil adalah *balance of power*. *Balance of power* adalah kondisi untuk mempertahankan stabilitas sistem yang ada (dalam hal ini adalah sistem yang anarki) tanpa harus merusak keberagaman elemen/unit (negara) dalam sistem itu sendiri. *Balance of*

⁸ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (Phillipines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1979), 88-102.

⁹ *Ibid.*, 112.

power, menurut Waltz, dapat terjadi dikarenakan dua hal: karena sistem itu adalah sistem yang anarki dan negara-negara dalam sistem tersebut ingin bertahan/*survive*. Dengan demikian, negara-negara dalam sistem anarki akan berusaha bertahan dalam sistem ini demi terciptanya kondisi *balance of power*. Ada dua jenis sarana (*means*) bagi negara untuk mencapai kondisi *balance of power*: *internal balancing* (seperti meningkatkan kapabilitas/kemampuan ekonominya, meningkatkan kekuatan militer, atau mengembangkan sejumlah strategi) dan *external balancing* (seperti misalnya memperkuat dan memperbesar aliansi atau melemahkan lawan).¹⁰

Adanya *balance of power* membuat ekspektasi bahwa perilaku negara akan disesuaikan dengan *balance forming*. Ketika diperhadapkan pada ancaman-ancaman yang datang dari luar, maka negara dapat memilih untuk melakukan *balancing* atau *bandwagoning*. *Balancing* adalah situasi dimana negara-negara dalam sistem akan berusaha untuk membentuk koalisi demi menghadapi ancaman tersebut. Ketika dalam koalisi *balancing* ini ada satu negara yang lebih mendominasi/menonjol, maka negara lain akan memilih opsi *bandwagoning* daripada harus melanjutkan koalisi tersebut. Yang sebenarnya harus menjadi perhatian negara-negara yang ada dalam sistem adalah bukan untuk memaksimalkan *power* tetapi untuk mempertahankan posisinya dalam sistem tersebut.¹¹

Dalam tulisannya yang berjudul *The Origins of War in Neorealist Theory*¹², Waltz menjelaskan bahwa ada dua “faktor kembar” dalam sistem anarki yang dapat menyebabkan kompetisi dan konflik. Kedua “faktor kembar” itu adalah: (1) Karena negara berada dalam tatanan anarki dan negara harus mengamankan negaranya; dan (2) Karena adanya ancaman atau sesuatu yang berpotensi sebagai ancaman yang mengancam keamanan negaranya. Negara akan mulai mengidentifikasi hal-hal yang mengancam negara dan jika mereka memiliki *power-power* tertentu maka mereka akan coba menangkal hal-hal yang

¹⁰ Ibid., 118-121.

¹¹ Ibid., 126.

¹² Kenneth N. Waltz, “The Origins of War in Neorealist Theory,” *Journal of Interdisciplinary History* 18 (1988): 619.

mengancam negaranya tersebut. Setiap negara akan melakukan usaha-usaha tertentu untuk mengamankan negaranya. Secara kolektif, negara-negara dapat memilih untuk melakukan aliansi atau justru melakukan perlombaan persenjataan (*arms race*).

Kondisi yang dapat memperburuk relasi antara negara-negara dalam sistem anarki adalah kondisi *security dilemma*. *Security dilemma* adalah kondisi ketika terjadi peningkatan atau penurunan keadaan keamanan nasional suatu negara akan berpengaruh signifikan terhadap negara lainnya. Dalam sistem yang anarki, sumber keuntungan satu pihak bisa menjadi sumber kerugian bagi pihak lainnya. Inilah alasan mengapa ketika ada negara yang berusaha menguatkan kekuatan militernya demi pertahanan negaranya, hal ini bisa berpotensi menjadi ancaman bagi negara lainnya.¹³ Robert Jervis mengungkapkan hal yang sama. Menurut Jervis, *security dilemma* adalah “*both strength and weakness in national security can be provocative to other nations.*”¹⁴ Masih menurut Jervis, jika satu negara terlalu kuat, ini berdampak signifikan karena di saat yang bersamaan dapat mengancam negara lainnya. Tetapi jika satu negara terlihat lemah, ini berdampak pada potensi untuk diserang oleh pihak lain karena lemah secara kemampuan/kapabilitas.¹⁵ Sehingga menguat atau melemahnya keamanan suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lainnya sekaligus mempengaruhi kondisi dalam sistem yang *balance*.

Aliansi adalah pilihan lain selain kondisi *security dilemma*. Aliansi bisa terjadi dan dibentuk oleh negara-negara dengan beberapa kepentingan yang sama. Biasanya kepentingan ini lebih bersifat negatif, seperti ketakutan/kekhawatiran terhadap negara (atau negara-negara) lain.¹⁶ Ketika timbul aliansi oleh beberapa negara dengan pertahanan negara sebagai kepentingan bersama, maka yang terjadi adalah kohesi/tarik-menarik antar anggota aliansi tersebut. Anggota aliansi akan

¹³ Ibid.

¹⁴ Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics* (New Jersey: Princeton University Press, 1976), 63.

¹⁵ Ibid., 58.

¹⁶ Waltz, “The Origins of War,” 620-621.

berusaha untuk bersatu dan mengalahkan hal yang mencoba mengancam mereka.¹⁷

Jadi secara keseluruhan, sistem anarki adalah sistem dimana semua kedudukan negara itu sama di dalam sistem, tidak ada yang ‘memerintah’ dan tidak ada yang ‘diperintah.’ Karena itulah penting bagi negara-negara dalam sistem anarki untuk memiliki prinsip *self-help* karena dengan *self-help* akan terlihat bagaimana kebertahanan suatu negara. Kestabilan sistem anarki ditentukan oleh *balance of power*, dikarenakan *balance of power* berarti tidak ada satu negara pun yang menonjol atau mendominasi dalam sistem. Ada dua *means* yang dapat digunakan negara untuk mencapai *balance of power* yaitu *internal balancing* (dengan meningkatkan kemampuan militer/ekonomi) dan *external balancing* (dengan membentuk aliansi atau menaklukkan lawan). Jika mendapat ancaman dari luar, maka negara-negara dalam sistem akan melakukan dua hal: *balancing*, yaitu negara-negara yang ada akan berkoalisi untuk melawan ancaman tersebut; dan *bandwagoning*, yaitu negara-negara itu “berdiri sendiri” dan tidak lagi dalam suatu koalisi, bahkan justru berkoalisi dengan yang menjadi sumber ancaman itu sendiri.

Negara-negara dalam sistem anarki juga harus bersiap menghadapi keadaan *security dilemma*, yaitu keadaan ketika baik itu meningkatnya atau melemahnya keamanan suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lainnya. Tapi di sisi lain, keadaan ini bisa berpotensi mendorong negara-negara yang ada untuk membentuk satu aliansi jika ditemukan kesamaan kepentingan di antara negara-negara ini, misalnya karena kekhawatiran/ketakutan bersama terhadap satu atau beberapa negara.

1.3.2. Konsep Interdependensi dan Nilai Demokrasi

Menurut Robert Keohane, dependensi berarti kondisi suatu negara yang ditentukan atau dipengaruhi secara signifikan oleh tekanan dari luar (*external forces*). Interdependensi secara sederhana diartikan sebagai *mutual dependence*. Maksudnya adalah interdependensi merujuk kepada situasi yang

¹⁷ Ibid., 619.

dikarakterisasikan oleh dampak timbal-balik antar-negara atau antar-aktor.¹⁸ Dampak timbal-balik ini biasanya merupakan hasil dari transaksi internasional, seperti kucuran dana atau penyediaan barang dan jasa. Selalu ada biaya yang harus dikeluarkan ketika melakukan interdependensi tetapi tidak menutup kemungkinan kalau hasil dari hubungan interdependensi ini bisa memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan sebelumnya. Menurut Keohane, tidak selamanya interdependensi selalu berujung pada keuntungan dan dirasakan timbal-balik oleh negara atau aktor yang bersangkutan.

Interdependensi mempengaruhi politik dunia dan juga perilaku dari negara-negara yang ada. Tapi di sisi lain, aksi yang dilakukan oleh suatu negara mempengaruhi pola interdependensi.¹⁹ Interdependensi tidak dapat lepas dari keamanan nasional (*national security*). Keamanan nasional dijustifikasikan dalam strategi yang disusun disesuaikan dengan biaya yang ada untuk mendukung struktur ekonomi, politik ataupun militer. Pasca Perang Dingin dan ancaman keamanan mereda, kompetisi ekonomi dan terjadinya konflik domestik meningkat. Keamanan nasional tidak lagi soal keamanan saja tapi juga soal ekonomi. Para pemimpin politik seringkali menggunakan interdependensi untuk menggambarkannya sebagai kebutuhan alami suatu negara. Para pemimpin politik berpendapat bahwa konflik kepentingan dapat dikurangi dengan adanya interdependensi dan diwujudkan dalam kerjasama.²⁰

Kerjasama dapat dilakukan baik kerjasama bilateral, multilateral ataupun kerjasama dalam sebuah institusi seperti institusi regional. Joseph S. Nye dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa institusi yang terbentuk dapat mengurangi dampak dari anarki yang terbentuk dari sistem. Nye mengatakan bahwa institusi dapat menstabilkan ekspektasi konflik dalam empat cara: (1) Institusi menyediakan *sense of continuity*; (2) Institusi dapat menyediakan kesempatan untuk terjadinya resiprositas atau interdependensi; (3) Institusi dapat

¹⁸ Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence 3rd Edition* (New York: Longman, 2001), 7.

¹⁹ *Ibid.*, 5.

²⁰ *Ibid.*, 6.

menyediakan adanya arus informasi; dan (4) Institusi menyediakan cara-cara untuk menyelesaikan konflik.²¹

Selain konsep interdependensi, nilai demokrasi juga penting untuk dipaparkan dalam kerangka pemikiran ini.

Dalam tulisannya yang berjudul *How Liberalism Produces Democratic Peace*, John Owen memaparkan bahwa negara-negara demokratis jarang terlibat dalam perang melawan satu sama lain. Ini juga menjadi salah satu *axiom* dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat: “Demokrasi tidak menyerang satu sama lainnya.”²² Meskipun demikian, tidak ada yang dapat memastikan secara tepat mengapa antara sesama negara demokratis tidak berperang satu sama lainnya dan justru berpotensi untuk berperang dengan negara bukan demokratis. Owen berpendapat bahwa nilai liberal yang berperan untuk mencegah negara-negara demokratis berperang satu sama lainnya sehingga mendorong rasa percaya antar-sesama negara demokratis. Dalam prinsip liberal, kebebasan menjadi hal yang fundamental bagi individu, sehingga individu dapat mencapai tujuan atau kepentingannya dengan damai. Dengan adanya kebebasan sebagai hal yang fundamental, maka keputusan dari warga negara juga berpengaruh untuk menentukan negaranya akan berperang atau tidak. Kaum liberal percaya bahwa negara demokratis memungkinkan warga negaranya untuk mendapatkan kepentingannya dengan cara yang damai. Negara bukan demokratis dicurigai berbahaya karena tujuan akhirnya berupa penaklukan (*conquest*) atau perampasan (*plunder*).²³

Ketika kaum liberal yang memegang pemerintahan negara demokratis, hubungan negara ini dengan negara demokratis lainnya akan harmonis. Tetapi ketika kaum non-liberal yang memegang pemerintahan, hubungan dengan negara yang demokratis mungkin tidak seharmonis antar-sesama negara demokratis. Pemimpin negara demokratis harus mengidentifikasi negara lain sebagai negara

²¹ Joseph S. Nye, Jr., *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History Second Edition* (New York: Longman, 1997), 39.

²² John M. Owen, “How Liberalism Produces Democratic Peace,” *International Security* 19 (1994): 87.

²³ *Ibid.*, 88-89.

liberal demokratis atau tidak sebelum menjalin relasi dengan negara tersebut. Ketika perang mengancam, hal ini harus menjadi perhatian bagi setiap warga negara. Pemimpin negara dan kaum elit harus berhasil meyakinkan publik (masyarakat) jika perang ini benar-benar dibutuhkan. Jika kemudian satu negara demokratis berpotensi berperang dengan negara demokrasi lainnya, salah satu pencegahannya menurut Owen adalah dengan *free speech*. Pemimpin negara bukan demokratis tidak dapat melakukan hal ini dan lebih memilih menyatakan status negaranya *on war* dengan negara lain.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin negara bukan demokratis dapat menciptakan ancaman. Menurut Owen, ketika satu negara demokratis sudah mengidentifikasi negara lainnya demokratis, maka negara ini akan berusaha untuk menentang terjadinya perang. Di sisi lain, negara bukan demokratis dilihat sebagai sebuah negara yang tak terduga (*unpredictable*). Salah satu penyebabnya adalah pemimpin negara yang tidak demokratis cenderung menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Dengan begitu, negara tidak demokratis berpotensi menyelesaikan permasalahan atau konflik dengan cara-cara seperti perebutan paksa, intoleransi, dan perang.²⁵

1.3.3. Konsep Identitas

Joseph S. Nye mengatakan bahwa aspek sosial merupakan hal penting dalam mencegah terjadinya perang. Menurut Nye, adanya kontak *person-to-person* dapat mengurangi potensi konflik dengan adanya pemahaman bersama (*promoting understanding*). Pemahaman bersama ini bisa terjadi karena kontak yang kontinu dan membuat satu pihak dengan pihak lain tidak merasa asing satu sama lain.²⁶ Adanya kontak *person-to-person* ini dilakukan oleh aktor-aktor, tak terkecuali satu negara dengan negara lain. Sebelum melakukan kontak untuk menciptakan pemahaman bersama ini, masing-masing aktor memiliki identitasnya sendiri. Menurut Paula Moya, identitas adalah “*evolving products that emerge from the dialectic between how subjects of consciousness identify themselves and*

²⁴Ibid., 89-90.

²⁵Ibid., 96.

²⁶ Nye, *Understanding International Conflict*, 38.

how they are identified by others."²⁷ Menurut Wendt, identitas adalah "*base a subjective or unit-level quality, rooted in actor's self-understanding.*" Menurut Wendt, dalam pembentukan identitas, ada unsur *self* dan *other*. *Self* merujuk kepada proses satu subjek mengidentifikasi dirinya sendiri. *Other* merujuk kepada proses satu subjek mengidentifikasi subjek lainnya.²⁸

Identitas yang dimiliki oleh satu aktor merujuk kepada siapa aktor itu. Identitas akan berkaitan dengan kepentingan, karena kepentingan adalah hal yang diinginkan oleh aktor atau suatu identitas. Identitas dalam aktor ini akan bertindak sesuai dengan kepentingan yang akan dicapainya. Tanpa adanya kepentingan, maka identitas tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Tanpa adanya identitas, kepentingan tidak dapat tercapai karena tidak ada yang mengarahkan.²⁹

Salah satu jenis identitas menurut Wendt adalah identitas kolektif atau identitas bersama. Untuk menciptakan identitas kolektif ada proses identifikasi yang merujuk kepada isu-isu tertentu yang akhirnya membuat *self* dan *other* tidak ada lagi berbeda melainkan melebur menjadi satu identitas (Wendt menyebutnya dengan istilah identitas "*we*").³⁰ Elemen penting dalam identitas kolektif ini adalah adanya *shared characteristics*. Dalam identitas kolektif akan terbentuk *common in-group identity* dan *we-feeling*.³¹

1.4. Tujuan Penelitian

Tulisan ini akan menganalisis bagaimana melalui konsep sistem anarki dan *balance of power* (mewakili paradigma realisme), konsep interdependensi dan nilai demokrasi (mewakili paradigma liberalisme), dan konsep identitas (mewakili paradigma konstruktivisme) dalam melihat akar konflik pada konflik perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira tahun 2008, sehingga dapat terlihat

²⁷ Paula M.L. Moya, "What's Identity Got to do With? Mobilizing Identities in the Multicultural Classroom," dalam *Identity Politics Reconsidered*, ed. Linda Martin Alcoff et.al. (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 96-97.

²⁸ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 224.

²⁹ *Ibid.*, 231.

³⁰ *Ibid.*, 229.

³¹ *Ibid.*, 338.

perbedaan masing-masing pandangan paradigma dalam melihat akar konflik perbatasan dan kesinambungannya dalam Hubungan Internasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab 1

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan dalam tugas karya akhir ini. Dalam bab 1 akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tugas karya akhir ini, rumusan permasalahan yang akan dibahas, landasan pemikiran yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan, tujuan penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan.

Bab 2

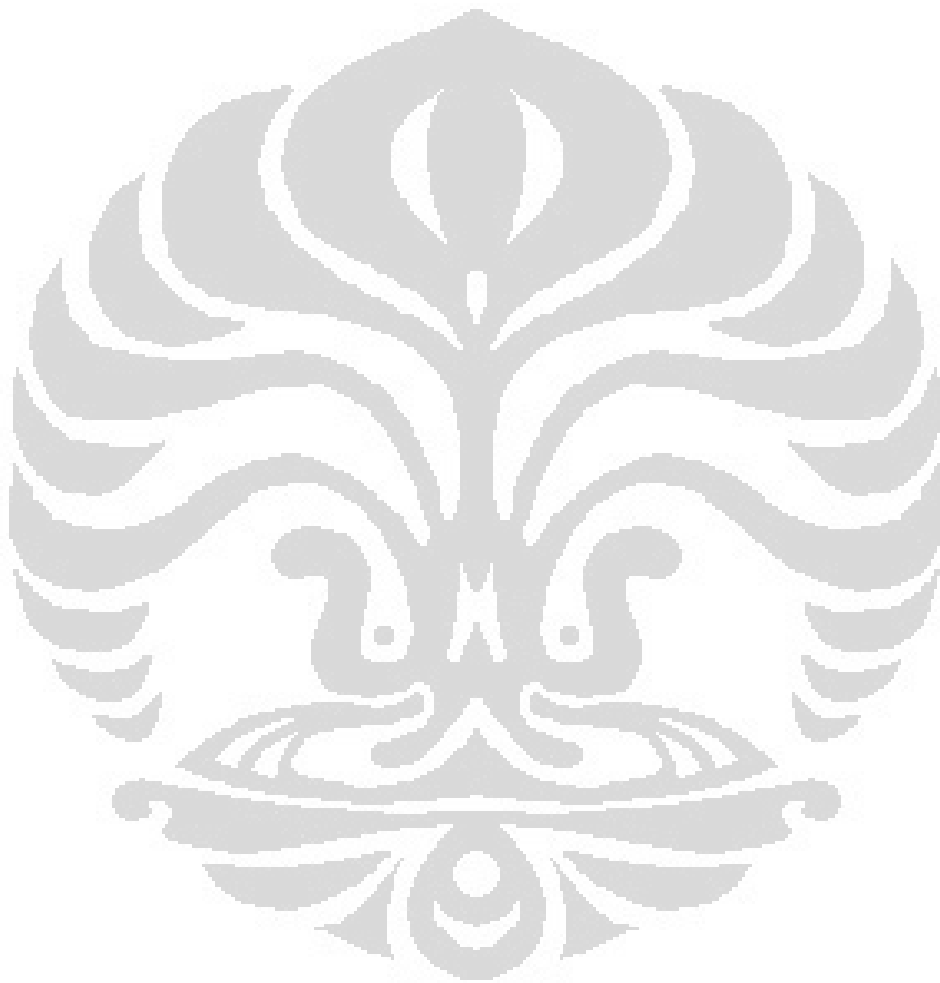
Bab 2 akan memaparkan tinjauan kondisi keamanan kawasan Tanduk Afrika dan eskalasi konflik perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira tahun 2008. Tinjauan kondisi keamanan yang dipaparkan berupa gambaran umum situasi keamanan kawasan Tanduk Afrika, situasi keamanan negara Djibouti dan situasi keamanan negara Eritrea. Selain itu bab 2 juga akan menjelaskan eskalasi konflik perbatasan dimulai dari tinjauan atas situasi dan status Ras Doumeira, instabilitas relasi Djibouti-Eritrea pra-eskalasi konflik tahun 1996-2007, eskalasi konflik perbatasan antara Djibouti-Eritrea tahun 2008, dan upaya perdamaian antara Djibouti dan Eritrea tahun 2008-2010.

Bab 3

Bab 3 akan memaparkan analisis landasan pemikiran dalam melihat akar konflik yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab 3 akan dipaparkan bagaimana konsep sistem anarki dan *balance of power*, konsep interdependensi dan nilai demokrasi, serta konsep identitas dalam dimensinya masing-masing menjelaskan akar konflik dari konflik perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira tahun 2008.

Bab 4

Tugas karya akhir ini akan diakhiri dengan bab 4 yang akan berisi kesimpulan tentang keseluruhan isi tulisan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana ketiga paradigma akan melihat akar konflik di daerah Ras Doumeira itu sendiri.



BAB 2

TINJAUAN KONDISI KEAMANAN KAWASAN TANDUK AFRIKA DAN ESKALASI KONFLIK PERBATASAN DJIBOUTI-ERITREA DI DAERAH RAS DOUMEIRA TAHUN 2008

Bab 2 ini akan menjelaskan kondisi keamanan, baik itu di kawasan Tanduk Afrika secara keseluruhan spesifik melihat kondisi keamanan Djibouti dan Eritrea secara spesifik. Selain situasi keamanan, akan dijelaskan juga mengenai bagaimana kondisi Ras Doumeira itu, turun-naiknya hubungan kedua negara sebelum konflik dan bagaimana konflik bisa terjadi di tahun 2008. Bagian di bab 2 ini ditutup dengan penjelasan singkat mengenai upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua negara yang mengikutsertakan banyak pihak di tahun 2010.

Mengapa bab 2 ini penting karena bab 2 ini merupakan *breakdown* dari kasus yang akan dianalisis. Dari bab 2 inilah dapat dijabarkan secara rinci bagaimana situasi keamanan kawasan dan kedua negara sebelum konflik terjadi, relasi kedua negara sebelum konflik, kondisi dan status Ras Doumeira, pecahnya perang antara kedua negara dan upaya perdamaian yang sudah coba ditempuh. Bab 2 ini merupakan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kasus konfliknya dibandingkan dengan bagian 1.1 (latar belakang permasalahan).

Struktur pembabakan dalam bab 2 adalah sebagai berikut. Bagian 2.1 akan menjelaskan bagaimana gambaran umum situasi keamanan sebelum terjadinya eskalasi konflik perbatasan Djibouti-Eritrea dan akan dijelaskan dalam 3 sub-bab: gambaran umum situasi keamanan kawasan Tanduk Afrika (2.1.1), negara Djibouti (2.1.2), dan negara Eritrea (2.1.3). Bagian 2.2 akan menjelaskan tinjauan konflik perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira yang akan dijelaskan dalam 4 sub-bab: tinjauan situasi dan status Ras Doumeira (2.2.1), instabilitas relasi Djibouti-Eritrea pra-eskalasi konflik tahun 1996-2007 (2.2.2), eskalasi konflik perbatasan antara Djibouti-Eritrea tahun 2008 (2.2.3) dan menuju upaya perdamaian antara Djibouti dan Eritrea tahun 2008-2010 (2.2.4). Dengan adanya struktur pembabakan seperti ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas.

2.1. Gambaran Umum Situasi Keamanan Sebelum Eskalasi Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea

2.1.1 Gambaran Umum Situasi Keamanan Kawasan Tanduk Afrika

Kawasan Tanduk Afrika adalah sebuah kawasan yang sangat rentan dengan konflik dan berbeda jika dibandingkan dengan kawasan lainnya di Afrika seperti Afrika Utara ataupun Sub-Sahara. Masing-masing dari negara di kawasan ini punya karakteristiknya sendiri—baik itu Ethiopia, Eritrea, Djibouti, maupun Somalia. Sulit pada akhirnya untuk berbicara mengenai identitas politik yang sama diantara negara-negara ini karena setiap negara memiliki sejarah panjang kemerdekaannya masing-masing dan rentan berkonflik baik internal dalam negaranya sendiri, dengan sesama negara di kawasan Tanduk Afrika ataupun dengan negara tetangga yang berbatasan dengan wilayah mereka di kawasan lainnya.³²

Di kawasan Tanduk sering terjadi peperangan yang melelahkan, baik itu antar negara, perang domestik dalam suatu negara dan sejumlah perang sipil dan revolusi. Tidak hanya itu, negara seperti Ethiopia dan Eritrea memasuki fase baru dalam sejarah perpolitikan negara mereka: fase reformasi demokrasi dengan unsur nasionalisme. Adanya penanaman sejumlah nilai baru, prinsip-prinsip baru dan aspirasi baru berdampak pada kondisi negara-negara menjadi belum terlalu stabil.³³ Karakteristik dalam ‘sistem konflik’ di kawasan Tanduk Afrika, yaitu aliansi yang merujuk kepada ‘*the enemy of my enemy is my friend.*’³⁴ Thomas Zitelmann menuliskan bahwa kawasan ini rentan sebagai kawasan rawan konflik disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya perbedaan politik, kondisi perbatasan negara yang rawan, penciptaan teritorial yang dibutuhkan untuk mobilitas suatu negara, dan kompetisi mengenai sumber daya alam yang biasanya menjadi

³² Amare Tekle, “International Relations in the Horn of Africa (1991-1996),” *Review of African Political Economy* 23 (1996): 499.

³³ *Ibid.*, 500.

³⁴ Thomas Zitelmann, “Introduction to the Special Issue ‘Horn of Africa,’” *Africa Spectrum* 43 (2008): 5.

permasalahan klasik terjadinya persengketaan yang dapat berpeluang menjadi perang terbuka di antar negara.³⁵

Sebelum tahun 2008, terjadi banyak konflik di kawasan Tanduk Afrika, dimulai dari terjadinya Perang Ogaden antara Somalia dan Ethiopia tahun 1977-1978, perang sipil Eritrea antara dua kubu internal negara Eritrea yakni EPLF (*Eritrean People's Liberation Front*) dan ELF (*Eritrean Liberation Front*) tahun 1980-1981, terjadinya perang perbatasan antara Ethiopia dan Somalia tahun 1982, terjadinya perang sipil Djibouti tahun 1991-1994, terjadinya pemberontakan di Ogaden yang berujung konflik antara Ethiopia dan ONLF (*Ogaden National Liberation Front*) tahun 1995-2011, dan terjadinya perang Ethiopia-Eritrea tahun 1998-2000.³⁶ Ini menunjukkan bahwa kawasan ini rentan terjadi konflik, baik itu konflik internal dalam satu negara maupun konflik eksternal yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya dalam satu kawasan yang sama.

Selain permasalahan konflik yang terjadi antar negara di kawasan Tanduk Afrika, situasi keamanan di kawasan ini juga dipengaruhi oleh negara-negara dengan *power* yang besar. Masa berakhirnya Perang Dingin, beberapa negara Barat saling berlomba untuk memperebutkan pengaruh dari kawasan-kawasan yang ada saat itu. Salah satu contohnya, Perancis berusaha menjalin hubungan dekat dengan Sudan. Hubungan ini dilandasi oleh tiga hal: (1) Simpanan minyak Sudan yang cukup besar; (2) Posisi Sudan yang strategis di Afrika Tengah; (3) Front Nasional Islam (*National Islamic Front*)-nya Sudan memiliki hubungan dekat dengan FIS (*Front Islamique*) yang merupakan kelompok pemberontak di Aljazair. Perancis berharap pemimpin Front Nasional Islam Sudan saat itu yakni Hassan El-Turabi dapat menjadi mediator dalam perang sipil Aljazair saat itu.³⁷

Berakhirnya Perang Dingin mendorong terjadinya perubahan besar yang diikuti dengan strategi global, berdampak pada posisi Amerika Serikat di Afrika khususnya hubungan Amerika Serikat dengan aliansi Eropa. Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah punya hubungan atau keterkaitan dengan Afrika saat itu

³⁵ Ibid., 7.

³⁶ "List of Recent Conflicts in Horn of Africa," diakses pada 11 Februari 2013, <http://www.hopehorn.org/monthly-digest/october-2011/134-recent-conflicts-in-the-horn-of-africa>.

³⁷ Tekle, "International Relations in the Horn," 502.

khususnya dengan negara-negara dari kawasan Sub-Sahara. Ini dikarenakan posisi Amerika Serikat yang berpredikat sebagai pengontrol global soal paham komunisme dan tidak berfokus banyak pada kawasan Afrika secara keseluruhan.³⁸ Di saat yang bersamaan, beberapa negara penjajah kawasan Afrika seperti Perancis, Inggris Raya, Portugal, Belgia dan Spanyol meneruskan hubungan mereka dengan negara-negara bekas koloninya untuk melancarkan strategi memenuhi kepentingan negara mereka. Sebagai tambahan, beberapa negara seperti Italia, Belanda, dan Jerman pun akhirnya melakukan investasi ekonomi baru di benua ini. Sejak berakhirnya Perang Dingin, ditambah lagi dengan munculnya kekuatan ekonomi baru dari Eropa dan Jepang mengancam peran Amerika Serikat di Afrika yang saat itu belum signifikan. Ini dikarenakan belum adanya kebijakan khusus dari Amerika Serikat di kawasan Afrika. Namun kemudian, karena adanya kesempatan dalam rangka pengembangan pembangunan di kawasan baru dan kepentingan kompetisi dengan aliansi lamanya yaitu Eropa, Amerika Serikat mulai mengembangkan kebijakan luar negerinya terkhusus untuk kawasan Tanduk Afrika, khususnya sejak masa pemerintahan presiden Clinton. Kebijakan itu diberi nama *Great Horn of Africa Initiative*.³⁹

Great Horn of Africa Initiative mencakup beberapa kebijakan seperti kebijakan ekonomi (seperti pasar bebas, akses terhadap sumber daya, perdagangan dan investasi), nilai-nilai politik (stabilitas, demokratisasi, hak asasi manusia) dan kemanusiaan (bantuan kepada korban kelaparan dan kekeringan, imigran dan korban dari konflik sipil). Kebijakan ini berbeda jauh dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat yang biasanya lebih berbicara soal kebijakan militer seperti aliansi, perjanjian pertahanan dan basis militer. Yang menjadi nilai strategis dari kawasan Tanduk Afrika adalah karena lokasinya yang langsung menghadap Laut Merah. Amerika Serikat kemudian memindahkan pangkalan militernya untuk meningkatkan kapabilitas militernya ke negara bertetangga yakni Ethiopia dan Eritrea, dikarenakan Amerika Serikat saat itu menilai Sudan sebagai negara teroris. Amerika Serikat juga berkoalisi dengan

³⁸ Ibid., 502-503.

³⁹ Ibid., 503.

Perancis dalam hal ini.⁴⁰ Selain Amerika Serikat, negara lain yang memiliki basis cukup kuat untuk kawasan Afrika, khususnya Tanduk Afrika, adalah Perancis.

Perancis menciptakan sebuah konsep bernama *Eurafrica*. Konsep ini menjelaskan hubungan kedekatan antara Eropa dan Afrika untuk mentransformasikan kedua benua menjadi sebuah sub-sistem internasional yang terintegrasi menjadi satu, dan berdampak pula pada menyebarnya bahasa Perancis.⁴¹ Perancis tercatat menjadi bangsa penjajah untuk sejumlah negara di Afrika dan negara-negara jajahannya ini dikenal dengan sebutan *Francophone*. Kedekatan pun terjalin antara Perancis dan negara bekas jajahannya. Lebih dari dua puluh negara anggota Uni Afrika (yang dahulunya adalah Organisasi Uni Afrika—*Organization of African Unity* atau OAU) menggunakan bahasa Perancis atau *French-speaking*: Aljazair, Benin, Burundi, Chad, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Komoro, Kongo, Pantai Gading, Djibouti, Burkina Faso, Gabon, Guinea, Madagaskar, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Rwanda, Senegal, Togo, Tunisia dan Zaire.⁴²

Kesimpulannya, secara keseluruhan kawasan Tanduk Afrika memang memiliki dinamikanya sendiri, baik dari dinamika konflik yang eskalasinya sering turun-naik dan melibatkan banyak negara. Selain itu, tidak dapat dipungkiri jika kawasan Tanduk Afrika juga menjadi kepentingan negara-negara tertentu yang memiliki *power*. Adanya ketidakstabilan karakter dari politik internasional di kawasan Tanduk Afrika, ditambah dengan adanya hubungan dengan *big-power* untuk urusan politik internasional menjadi penyebab utama dari semakin kuatnya instabilitas politik di kawasan Tanduk. Hubungan yang kompleks juga terjadi di kawasan ini, termasuk di dalamnya adalah identitas secara geografis dan yuridis

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ali A. Marzui, "Africa and Other Civilizations: Conquest and Counterconquest," dalam *Africa in World Politics*, ed. John W. Harbeson dan Donald Rothchild (United States of America: Westview Press, 1991), 81.

⁴² Ibid.

setiap negara, batasan antara lingkup politik “domestik” dan “internasional” yang biasanya bersifat *permeable*.⁴³

2.1.2 Gambaran Umum Situasi Keamanan Negara Djibouti

Djibouti adalah salah satu negara di kawasan Tanduk Afrika yang secara strategis sebagai pengontrol akses menuju Laut Merah dan memiliki kepentingan strategis dalam ekonomi. Menjadi wilayah jajahan oleh Perancis sejak 1862, Djibouti menjadi negara merdeka pada tahun 1977.⁴⁴ Sepanjang Perang Teluk, Djibouti pun menjadi pangkalan operasi militer Perancis.⁴⁵ Lokasi Djibouti adalah aset ekonomi yang utama dari negara tersebut. Ibukotanya, yakni Kota Djibouti memegang peranan penting untuk kegiatan impor dan ekspor dari negara Ethiopia. Fasilitas transportasinya digunakan oleh sebagian negara *landlocked* Afrika untuk mendistribusikan barang-barang mereka untuk melakukan ekspor kembali.⁴⁶ Kelompok etnis yang ada di Djibouti antara lain Issa Somalia (60%), Afar Ethiopia (35%), dan lainnya seperti Perancis, Arab, Ethiopia dan Italia (5%),⁴⁷ dan setelah kemerdekaannya dari Perancis pada tahun 1977, pemerintahan Djibouti meliputi kedua etnis yang mendominasi di Djibouti yakni Issa (etnis asli Somalia) dan Afar (etnis asli Ethiopia), keduanya hidup berdampingan.⁴⁸

Jika merunut ke masa lalu, merdekanya negara Djibouti dari kolonialisasi Perancis tidaklah mudah. Semenjak kemerdekaannya, Republik ini sudah dibayang-bayangi oleh ancaman ambisi negara tetangganya dan adanya rival dua kelompok etnis yang mendiami Djibouti yakni Issa Somalia dan Afar Ethiopia (selanjutnya akan disebutkan Issa dan Afar saja). Adanya konflik terdahulu antara negara Ethiopia dan Somalia di daerah Ogaden membuat konflik internal antar-ras di Djibouti semakin memburuk walaupun kedua negara tetangga Djibouti ini

⁴³ John W. Haberson, “The International Politics of Identity in the Horn of Africa,” dalam *Africa in World Politics*, ed. John W. Harbeson dan Donald Rothchild (United States of America: Westview Press, 1991), 119-122.

⁴⁴ Mohamed Kadamy, “Djibouti: Between War and Peace,” *Review of African Political Economy* 23 (1996): 511.

⁴⁵ “Djibouti Profile,” BBC News, diakses pada 24 Oktober 2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13231761>.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ “The World Factbook: Djibouti,” Central Intelligence Agency, diakses pada 24 Oktober 2012, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html>.

⁴⁸ Ibid.

menyerah menyoal klaim teritorial di awal-awal kemerdekaan Djibouti.⁴⁹ Kelompok Issa di Djibouti menginginkan terbentuk semacam pan-Somalia dan mereka ingin menggabungkan Djibouti agar terbentuk *Great Somalia*. Dampak dari kemerdekaan Djibouti adalah terbentuk dominasi yang dilakukan oleh kelompok etnis Issa walaupun sistem politik di Djibouti menjamin sejumlah posisi bagi kelompok Afar untuk dapat duduk di pemerintahan. Presiden awal Republik ini yaitu Hassan Gouled berasal dari kelompok etnis Issa, dan pada pemerintahan awal, posisi Perdana Menteri diberikan kepada seseorang dari etnis Afar namun hanya kekuasaan yang diberikan hanya dalam taraf kecil. Buktinya adalah dua Perdana Menteri awal Djibouti yang berasal dari etnis Afar yakni Ahmed Dini dan Abdullah Muhammad Kamil, satu di antara keduanya memilih mundur dan satu lagi dicopot dari jabatannya karena keluhan keduanya atas “politik tribal” yang dilakukan dan didominasi oleh kelompok pemerintahan Issa.⁵⁰ Permasalahan etnis Issa yang lebih mendominasi pemerintahan dan etnis Afar yang merasa tidak diperhatikan membuat kondisi perpolitikan domestik Djibouti kurang kondusif di masa-masa awal kemerdekaannya.

Teritorial Republik Djibouti saat dalam masa penjajahan ditetapkan oleh Perancis setelah melewati sejumlah perjanjian dengan pemimpin kelompok Afar dan Issa sejak tahun 1862 sampai 1885. Saat itu, bangsa Perancis memperoleh daerah pertamanya di daerah Obock di bagian selatan Laut Merah dari pemimpin kelompok Afar yang bernama Ahmad Abu Bakr tahun 1862. Setelah tahun 1862, Perancis menandatangani sejumlah perjanjian dengan pemimpin Afar untuk memperoleh kontrol atas dua daerah yakni Tajourah dan Goba’ad. Tidak sampai disitu saja, Perancis terus berekspansi hingga ke selatan dan menandatangani perjanjian dengan pemimpin kelompok Issa.⁵¹ Awal koloni Perancis dikonsentrasikan di daerah Obock sampai kemudian Perancis menciptakan ekspansi kegiatan perdagangan dan membutuhkan suatu daerah pelabuhan yang lebih baik. Lokasi yang terbaik kemudian ditemukan melewati Teluk Tajourah. Disinilah Perancis membangun sebuah kota—yang kemudian menjadi cikal-bakal

⁴⁹ Kassim Shehim dan James Searing, “Djibouti and the Question of Afar Nationalism,” *African Affairs* 79 (1980): 209.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid., 210.

Kota Djibouti, ibukota negara Djibouti saat ini. Karena arus perdagangannya lancar, pedagang Arab, Yunani, India, dan Armenia pun menetap di Djibouti. Djibouti menjadi kota perdagangan dan Perancis memindahkan pemerintahan dari Obock ke Djibouti. Tahun 1896, Perancis menggabungkan Tajourah, Obock dan Djibouti, menjadi apa yang dikenal dengan *Côte Française des Somalis*. Saat itu *Côte Française des Somalis* masih dibawah kekuasaan etnis Afar, namun itu tidak berlangsung lama. Dibentuknya pemerintahan administratif yang dipusatkan di Djibouti memiliki dampak dalam kolonialisme. Karena Djibouti lebih didominasi oleh Issa, etnis Issa terkonsentrasi di sekitar kota Djibouti dan etnis Afar tersebar di daerah-daerah pinggir atau pedesaan (*rural district*). Proses pesebaran ini terjadi hingga sekarang. Terjadinya pergolakan internal dalam negara ini sendiri pada akhirnya berujung pada penamaan baru negara ini, dari yang awalnya *Côte Française des Somalis* menjadi Djibouti seperti yang dikenal saat ini.⁵²

Adanya perselisihan etnis Afar dan etnis Issa cukup mempengaruhi kondisi keamanan domestik dari negara Djibouti. Pada November 1991, terjadi perang sipil di Djibouti antara pihak pemerintah dan kelompok pemberontak Afar yaitu FRUD (*Front for the Restoration of Unity and Democracy*). Namun ini tidak berlangsung lama karena FRUD kemudian menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah pada bulan Desember 1994 untuk mengakhiri konflik.⁵³ Perhatian pemerintah Djibouti memang lebih tersita kepada kondisi perpolitikan dan situasi keamanan domestik dibandingkan dengan menaruh perhatian lebih kepada relasinya dengan negara lain. Selain kondisi perpolitikan domestik, Djibouti berbenah dalam hal kekuatan militernya yang berkembang dengan cepat pasca terjadinya perang sipil 1991. Kekuatan militer Djibouti disuplai oleh pemerintah negara Perancis yang juga sekaligus menjamin keamanan negara Djibouti di lingkup regional untuk melawan serangan-serangan asing yang mencoba menyerang secara mendadak.⁵⁴

⁵²Ibid., 211-212.

⁵³ International Business Publications. *Djibouti: Foreign Policy and Government Guide Volume 1 Strategic Information and Developments* (Washington, D.C.: International Business Publications, 2010), 23.

⁵⁴ Ibid., 24.

Untuk hubungan luar negeri Djibouti, dalam tulisan *Djibouti: Foreign Policy and Government Guide Volume 1 Strategic Information and Development*, tahun 1996 keduanya hampir terlibat perang, seperti yang sudah sedikit disinggung di bagian I. Pasca tahun 1996, hubungan kedua negara tidak stabil seperti sebelumnya. Masih di sumber yang sama, ketika terjadi perang antara Ethiopia-Eritrea tahun 1998-2000, Ethiopia memindahkan jalur distribusi perdagangannya melalui Djibouti. Walaupun saat itu Djibouti mencoba bersikap netral menghadapi konflik Ethiopia-Eritrea, hubungan Djibouti-Eritrea sempat retak tahun 1998, meski kemudian kedua negara kembali mencoba untuk berhubungan baik tahun 2000. Itikad baik ditunjukkan ketika saat itu kedua pemimpin negara saling mengunjungi satu sama lain.⁵⁵ Presiden Eritrea saat itu yakni Isaias Afewerki mengunjungi Djibouti di awal tahun 2001, dan Presiden Djibouti sesudah Aptidon yakni Ismail Omar Guelleh juga menyambut hal positif ini dengan mengadakan kunjungan balasan ke kota Asmara, ibukota Eritrea. Ketika Presiden Djibouti berusaha mendekati diri dengan partai paling berpengaruh di Ethiopia yakni EPRDF (*Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front*), di saat yang bersamaan Guelleh juga berusaha untuk mempertahankan dan menjaga hubungan baik antara Djibouti dengan Eritrea.⁵⁶ Namun, apa yang dilakukan oleh presiden Djibouti ternyata tidak cukup untuk mempertahankan hubungannya dengan Eritrea, sehingga akhirnya terjadi konflik perbatasan yang berakhir dengan perang pada 10 Juni 2008.

2.1.3. Gambaran Umum Situasi Keamanan Negara Eritrea

Eritrea menjadi negara merdeka pada tahun 1993 setelah mengalami perang berkepanjangan. Namun, tak lama pasca merdeka, Eritrea kembali terlibat dalam konflik militer dengan Yemen dan juga terlibat konflik yang lebih menghancurkan lagi dengan musuh bebuyutan yakni Ethiopia.⁵⁷ Saat ini, Eritrea tengah berusaha untuk menciptakan perdamaian yang merata namun hal ini terkesan rentan bagi Eritrea yang sering terjebak dalam banyak konflik. Tugas

⁵⁵ Ibid.,113.

⁵⁶ Ibid.,114.

⁵⁷ "Eritrea Profile," BBC News, diakses pada 24 Oktober 2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13349078>.

berat Eritrea pasca merdeka dan terbebas dari konflik adalah membangun kembali beragam infrastruktur dan mulai menata ekonomi negaranya kembali setelah 30 tahun lebih berperang.⁵⁸ Di sisi lain, untuk kelompok etnis di Eritrea sendiri, ada 9 kelompok etnis yang diakui di Eritrea; Tigrinya (55%), Tigre (30%), Saho (4%), Kunama (2%), Rashaida (2%), Bilen (2%), lainnya, seperti etnis Afar, Beni Amir dan Nera (5%).⁵⁹

Jika merunut ke masa lalu, jalan terjal harus dihadapi Eritrea untuk mendapatkan statusnya sebagai negara merdeka. Perjuangan Eritrea untuk merdeka adalah perjuangan yang paling susah payah dan melelahkan yang pernah dilakukan oleh sebuah negara di Afrika. Selama seabad Eritrea harus mengalami berada di bawah kolonialisasi sejumlah negara—baik itu Turki, negara Eropa dan Afrika.⁶⁰ Eritrea, negara yang memiliki populasi sekitar 3,5 juta penduduk, terletak di sebelah timur Laut Merah, berbatasan dengan Sudan di bagian utara dan barat, dan berbatasan dengan Ethiopia di bagian Ethiopia. Negara ini hanya berjarak 600 mil dari sisi pantai di bagian selatan jalan masuk Laut Merah. Posisi strategis negara inilah yang membuatnya dulu menjadi jalur masuknya minyak menuju kawasan Timur Tengah.⁶¹

Eritrea awalnya terbentuk sebagai suatu identitas kolektif ketika Italia masih menjadi bangsa penjajah di tanah Afrika. Italia adalah yang menjadi bangsa penjajah Eritrea. Ethiopia yang saat itu juga menguasai sebagian wilayah Eritrea akhirnya menandatangani Perjanjian Ucciale dengan Italia pada 1889, meninggalkan Eritrea untuk Italia. Italia pun mulai berinvestasi di wilayah ini khususnya dalam bidang ekonomi—dikarenakan letaknya yang strategis dekat Laut Merah seperti yang telah disebutkan. Namun tidak hanya Eritrea. Italia juga berekspansi hingga Ethiopia, yang dulu merupakan satu-satunya negara yang tidak dikolonialisasi negara manapun saat itu.⁶² Italia dapat mengalahkan Ethiopia saat itu dalam perang yang disebut Perang Adua (*Battle of Adua*) pada 1896. Akan

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ “The World Factbook: Eritrea,” Central Intelligence Agency, diakses pada 24 Oktober 2012, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html>.

⁶⁰ Araia Tseggai, “The Case for Eritrean National Independence,” *The Black Scholar* 7 (1976): 20.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., 22.

tetapi, Ethiopia masih berusaha untuk mempertahankan kolonialisasinya pada Eritrea, sejak Ethiopia yang ketika itu dipimpin oleh Kaisar Menelik dikalahkan oleh Italia.

Dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Ethiopia dan Italia tahun 1902, Ethiopia menegaskan kembali klaim kolonial Italia pada Eritrea dan kolonialisme Italia atas Eritrea terus berlangsung hingga tahun 1941. Pada April 1941, Inggris mengalahkan pasukan Italia di Eritrea dan akhirnya mengambil alih kontrol kolonial atas Eritrea dari Italia.⁶³ Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya melepaskan kolonialismenya atas Eritrea dan kemudian Eritrea dikolonialisasi oleh negara tetangganya sendiri, yakni Ethiopia. Sejak kemerdekaan Eritrea dari Ethiopia pada 1993, Eritrea menghadapi sejumlah masalah ekonomi dimana kondisi Eritrea adalah negara kecil, miskin, dan menekankan pada adanya implementasi kebijakan pada sektor ekonomi. Eritrea berada pada kontrol partai tunggal yakni PFDJ (*People's Front for Democracy and Justice*).⁶⁴

Seperti kondisi perekonomian kebanyakan negara Afrika, sekitar 80% dari populasi Eritrea berpenghasilan dari sektor pertanian, namun mereka hanya memperoleh hasil yang sedikit dari total produksi. Sejak kesudahan perang Eritrea-Ethiopia pada 2000, pemerintah mempertahankan pegangan ekonominya, memperluas penggunaan militer dan bisnis yang semuanya ini dikendalikan oleh partai untuk melengkapi agenda pertumbuhan negara Eritrea. Pemerintah bahkan mengontrol ketat menyoal penggunaan mata uang asing dengan membatasi akses serta ketersediaan mata uang asing itu sendiri. Ini berdampak terhadap sedikit sekali perusahaan swasta yang bertahan di Eritrea.⁶⁵

Selain itu, ketidakstabilan juga terjadi untuk lingkup politik domestik negara Eritrea. Sejak kemerdekaannya pada 1993, tidak ada pemilihan langsung baik dalam lingkup regional maupun nasional dan tidak ada proses pemilihan langsung untuk tingkat sub-regional dan lokal. Partai yang ada hanyalah partai tunggal PFDJ, dan presiden Isaias Afewerki sudah menjabat sejak dari masa Eritrea merdeka hingga saat ini, dan presiden sendiri sampai saat ini belum ada

⁶³ Ibid., 22.

⁶⁴ "The World Factbook: Eritrea."

⁶⁵ Ibid.

keinginan untuk menyelenggarakan sebuah proses pemilihan untuk kedepannya. Kediktatoran memang terasa di dalam domestik negara Eritrea dan di dalam negara Eritrea tidak ada kekuatan veto yang berani untuk mengalahkan keputusan pemerintah. Organisasi *civil society* dan para pemimpin agama tidak dibiarkan berdiri sendiri oleh pemerintah dan berada dalam kontrol yang ketat pemerintah.⁶⁶ Pemimpin politik dalam negeri Eritrea tidak mengizinkan ada sistem multi-partai di Eritrea baik untuk saat itu maupun untuk jangka panjang kedepannya. Partai PFDJ mengklaim bahwa adanya organisasi tunggal seperti partai mereka sudah cukup untuk mewakili kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi sosial yang ada dan mencegah munculnya *civil society* yang mandiri tanpa campur tangan pemerintah.⁶⁷

Masih berdasarkan *Eritrea Country Report 2012*, dalam bidang pembangunan ekonomi-sosial, Eritrea saat ini tercatat sebagai satu dari banyak negara termiskin di dunia dan mengalami tingkat kelaparan terparah khususnya dalam dua tahun terakhir. Sekitar 17% anak-anak berada dalam kondisi gizi buruk, dan Indeks Kelaparan Global (*Global Hunger Index—GHI*) menempatkan posisi Eritrea di posisi 82 dari 84 negara yang tergolong “tingkat kelaparan paling ekstrem.”⁶⁸ Selama PFDJ masih berkuasa maka beragam bisnis seperti yang bergerak dalam perdagangan, pasar retail, konstruksi, dan juga ekonomi oligopoli mendominasi sistem domestik negara Eritrea. Tidak ada kebijakan liberalisasi, dan semua perdagangan luar negeri diawasi oleh pihak negara. Kontrol ketat diberlakukan dan perusahaan yang dimiliki PFDJ yakni *Red Sea Corporation* mengontrol semua kegiatan perdagangan ekspor-impor.⁶⁹

Untuk masalah hubungan luar negeri, Eritrea memiliki *stand point*-nya sendiri, khususnya hubungan luar negeri-nya dengan Djibouti. Pasca 1996, Eritrea sudah sejak lama mempertahankan prinsip atau kebijakan bahwa tidak ada istilah “*good-faith border dispute*” antara dua negara bertetangga seperti negara Eritrea dengan Djibouti. Maksud kebijakan inilah Eritrea tidak sepenuhnya percaya lagi

⁶⁶ Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI). *Eritrea Country Report 2012* (Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2012), 2-6.

⁶⁷ *Ibid.*, 9.

⁶⁸ *Ibid.*, 10.

⁶⁹ *Ibid.*, 12.

dengan negara-negara tetangganya khususnya yang sudah pernah terlibat konflik dengan negara mereka. Jika pun terjadi Eritrea menganggap mekanisme perdamaianya hanya akan dalam taraf menerima solusi bilateral dan tidak akan meng-internasional-kan konflik yang ada. Kebijakan ini pada akhirnya terapkan ter khusus ketika kemudian terjadi konflik perbatasan yang melibatkan negara Eritrea dan Djibouti.⁷⁰

2.2. Tinjauan Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira

2.2.1. Tinjauan Situasi dan Status daerah Ras Doumeira

Dari sebuah laporan tim pencari fakta bentukan PBB yang menelusuri soal sejarah perbatasan Djibouti-Eritrea⁷¹, banyak dari daerah perbatasan antara Djibouti dan Eritrea yang memang tidak jelas batas resminya. Perjanjian tahun 1897 antara Perancis yang merupakan kekuatan kolonial dan Raja Menelik II dari Ethiopia (saat itu Italia menyerahkan kekuasaannya kepada Ethiopia dan Eritrea belum menjadi negara sendiri) memperjelas batas di bagian barat laut perbatasan antara Djibouti-Eritrea saat ini, dari Ras Doumeira ke daerah bernama Bissidirou. Tapi itu hanya dibatasi di peta, tidak dibatasi secara langsung di lapangan. Kembali ke saat sekarang, posisi dari Ras Doumeira sebenarnya sendiri adalah posisi yang kritis dikarenakan Eritrea telah menduduki daerah Djibouti sejak Maret 2008, yang diklaim oleh pemerintah Djibouti. Posisi perbatasan ini juga rentan jika kedua negara bernegosiasi soal batasan maritim di daerah Laut Merah.⁷²

Status dari Doumeira sendiri juga belum ditentukan. Protokol antara Perancis-Italia tahun 1900-1901 (seperti yang telah dituliskan di atas) membuat Perancis dan Italia berbagi kedaulatan terhadap daerah ini, dan tidak boleh ada yang menduduki, baik itu dari salah satu negara ataupun dari pihak ketiga. Kekuasaan Djibouti memperkirakan bahwa protokol yang dibuat ini mengurangi luas Djibouti sekitar 2,000 kilometer persegi, dengan menempatkan perbatasan

⁷⁰ Permanent Mission of Eritrea to the UN. *Peace and Security in the Horn of Africa: Eritrea's View* (New York: The Permanent Mission of Eritrea to the UN, 2012), 3.

⁷¹ United Nations Security Council. *Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Djibouti-Eritrea Crisis* (New York: United Nations Security Council, 2008): 4-5.

⁷² *Ibid.*, 4-5.

dengan Eritrea sekitar 40 kilometer berbeda dari protokol 1897. Tahun 1935, perjanjian antara Perancis dan Italia ditandatangani dan daerah Doumeira dialokasikan kepada Italia yang mengkolonialisasi Eritrea saat itu. Perjanjian ini yang juga akhirnya memindahkan perbatasan menjadi jauh ke selatan, kembali kepada wilayah yang tadinya dipertimbangkan menjadi daerah Djibouti dalam perjanjian 1897 dan protokol 1900-1901. Di bawah Perjanjian 1935, Ras Doumeira—yang ‘dirampas’ oleh EDF (*Eritrean Defence Forces*) pada 2008—menjadi bagian dari Eritrea. Akan tetapi, perjanjian ini tidak pernah diratifikasi, itulah mengapa Djibouti masih menganggap bahwa yang versi Protokol—yaitu Ras Doumeira dibagi kedaulatannya—yang masih berlaku.⁷³ Pada 1954, Perancis dan Ethiopia menandatangani protokol untuk membatasi perbatasan antara wilayah Djibouti dan Ethiopia (yang kemudian termasuk di dalamnya adalah Eritrea). Akan tetapi, pembatasannya langsung di lapangan hanya antara daerah Dirko Koma dan Daddato, meninggalkan daerah panjang tanpa dibatasi mulai Daddato sampai Laut Merah.⁷⁴

2.2.2. Instabilitas Relasi Djibouti-Eritrea Pra-Eskalasi Konflik tahun 1996-2007

Relasi antara Djibouti-Eritrea dikarakterisasikan sebagai hubungan yang tidak stabil. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, hubungan Djibouti-Eritrea pertama kali mulai retak di tahun 1996 ketika masalah perbatasan mulai mencuat di antara keduanya. Tahun 1996, Djibouti menyatakan bahwa Eritrea memetakan ulang wilayah yang harusnya masuk dalam wilayah negara Djibouti. Eritrea merespon pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa itu hanyalah masalah kesalahpahaman, sehingga hal tersebut tidak berujung dengan terjadinya perang satu sama lain.⁷⁵ Meskipun demikian, pada 1999, kedua negara kembali terlibat dalam perselisihan. Penyebabnya saat itu, Eritrea menyatakan bahwa Djibouti berpihak kepada Ethiopia ketika Eritrea tengah berkonflik dengan Ethiopia karena Ethiopia menggunakan pelabuhan yang ada di Djibouti untuk mengimpor senjata-senjata yang digunakan Ethiopia untuk berperang dengan Eritrea. Sebaliknya saat

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ “Inter-state Conflicts in the Horn of Africa,” Redie Bereketeab, diakses pada 20 Februari 2013, <http://afrikansarvi.fi/issue2/25-artikkeli/62-inter-state-conflicts-in-the-horn-of-africa>.

itu, Djibouti balik menuduh Eritrea karena telah mendukung kelompok oposisi Djibouti untuk menggulingkan pemerintahan Djibouti dan tuduhan klaim atas wilayah Ras Doumeira.⁷⁶

Ketika terjadi konflik antara Ethiopia-Eritrea di tahun 1998-2000, presiden Djibouti kala itu yakni Hassan Gouled Aptidon mencoba untuk menjadi pihak yang memediasi konflik kedua negara, namun kesediaan presiden Aptidon ditolak oleh Eritrea dalam pertemuan Organisasi Uni Afrika (*Organization of African Unity* atau OAU—yang menjadi cikal-bakal Uni Afrika) pada November 1998 di Ouagadougou, Burkina Faso. Penolakan ini, menurut pihak Eritrea, disebabkan oleh Eritrea tidak percaya bahwa presiden Djibouti kredibel sebagai seorang mediator untuk konflik yang mereka hadapi.⁷⁷ Konsekuensinya kemudian adalah Djibouti dan Eritrea mengalami lagi ketegangan tinggi di antara kedua negara dan memanggil duta besar Djibouti untuk Eritrea.

Sebenarnya bagi Djibouti, terjadinya perang antara Ethiopia dan Eritrea memberikan keuntungan secara ekonomi, karena terjadi peningkatan pemasukan dari kargo Ethiopia sejak 1998. Dengan adanya kepentingan Ethiopia, secara logika Djibouti posisinya lebih untung dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Tanduk Afrika, dan Ethiopia menginvestasikan jutaan dolar untuk memperluas dan mengembangkan pelabuhan di Djibouti. Dengan terjadinya peralihan rute perdagangan Ethiopia—dari yang tadinya berada di Eritrea namun sekarang dialihkan ke Djibouti—Eritrea kehilangan jutaan dolar pendapatan negara.⁷⁸

Tidak hanya berhubungan dengan ekonomi, namun juga terhadap eksistensi *superpower* di kawasan Tanduk Afrika. Eritrea kecewa ketika Amerika Serikat lebih memilih untuk membangun basis militernya di Djibouti. Pembangunan basis militer ini benar-benar kehilangan yang besar kedua bagi Eritrea setelah sebelumnya dari sektor ekonomi Eritrea sudah kehilangan kesempatan besar untuk menambah pendapatan negaranya setelah Ethiopia

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Mesfin, "Border Dispute," 2.

⁷⁸ Ibid., 2-3.

memindahkan kegiatan ekspor-impornya ke Djibouti.⁷⁹ Amerika Serikat lebih tertarik dengan Djibouti yang memiliki sisi patron-Barat (*Western-patron*) yang lebih kuat ketimbang Eritrea. Selain itu pertimbangan lainnya adalah kondisi politik internal negara Djibouti cenderung lebih stabil dibandingkan Eritrea. Amerika Serikat menaruh kecurigaan terhadap presiden Eritrea, Isaias Afewerki yang reputasinya tidak terlalu bagus di mata Amerika Serikat.⁸⁰

Dalam situs pemerintahnya, Amerika Serikat melihat bahwa Djibouti berada di posisi yang strategis di kawasan Tanduk Afrika dan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Amerika Serikat khususnya menjadi rekan Amerika Serikat dalam bidang keamanan, stabilitas regional, dan pencapaian usaha-usaha demi kemanusiaan. Pemerintah Djibouti bersikap mendukung kepentingan-kepentingan Amerika Serikat tersebut salah satunya dengan mengizinkan Amerika Serikat membangun basis militernya di daerah Djibouti. Usaha lain yang dilakukan Djibouti untuk mendukung Amerika Serikat bersikap suportif dalam usaha Amerika Serikat memberantas terorisme. Adanya sikap Djibouti yang mendukung dan pro terhadap patron-Barat, membuat Amerika Serikat merasa aman untuk mendirikan basis militernya di Djibouti. Saat ini, basis militer Amerika Serikat berada di daerah bernama Camp Lemonnier yang dulunya bekas basis militer Perancis di dekat ibukota Djibouti. Tidak hanya membangun basis militer tapi juga Djibouti mengizinkan Amerika Serikat menggunakan setiap akses di pelabuhan-pelabuhan dan bandar udara Djibouti.⁸¹

2.2.3. Eskalasi Konflik Perbatasan antara Djibouti dan Eritrea tahun 2008⁸²

Eskalasi konflik perbatasan antara Djibouti-Eritrea dimulai sejak Januari 2008. Menurut sebuah sumber Djibouti, Eritrea meminta izin untuk melintasi daerah perbatasan dengan maksud untuk mendapatkan kebutuhan pasir untuk proyek pengerjaan jalan. Yang terjadi justru Eritrea menduduki bagian perbukitan

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid., 5.

⁸¹ "U.S. Relations with Djibouti," Bureau of African Affairs, diakses pada 21 Februari 2013, <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5482.htm>.

⁸² Medhane Tadesse, "The Djibouti-Eritrea Conflict," *Briefing on Human Security Issues in Horn Africa* (2008): 1-10.

Ras Doumeira. Pada tanggal 4 April, tentara-tentara Eritrea berpindah sejauh 7 kilometer ke dekat daerah Djibouti. Di saat yang bersamaan, Djibouti mengklaim Eritrea mengirimkan tentara-tentaranya dengan melintasi perbatasan, membuat penggalian bawah tanah, dan melakukan penempatan defensif dekat wilayah Djibouti. Pada 16 April, Djibouti melaporkan Eritea telah membangun kubu pertahanan dan penggalian bawah tanah di kedua sisi perbatasan Djibouti dekat Ras Doumeira. Tanggal 5 Mei, Djibouti mengajukan keberatannya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas apa yang disebut Djibouti sebagai Agresi Eritrea yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial. Djibouti mengklaim Asmara (ibukota Eritrea) memasuki teritorialnya untuk membangun kubu pertahanan.

10 Juni 2008, perang terbuka terjadi setelah selama dua bulan tensi memanas di antara keduanya akibat saling tuduh yang dilakukan. Perang ini dipicu dengan adanya penempatan sekitar 30 tentara Eritrea yang berjaga dan disebar di sepanjang perbatasan. 9 orang tentara Djibouti tewas dan sekitar 60-an orang terluka akibat serangan yang dilakukan oleh Eritrea. Presiden Djibouti saat itu yakni Ismail Omar Guelleh mengatakan bahwa, "*If Eritrea wants war, it will get it*"⁸³, ketika meninjau sejumlah tentara yang menjadi korban. Pemimpin Djibouti segera mendeklarasikan perang antara negaranya dan Eritrea dan memanggil kembali tentara-tentara yang harusnya sudah pensiun untuk melawan dominasi Eritrea. Perselisihan militer ini juga mengikut-sertakan peralatan perang namun tidak disertai dengan persiapan yang cukup matang antara kedua belah pihak. 13 Juni 2008, pasukan militer Djibouti mengumumkan bahwa perselisihan di antara kedua negara sudah mereda.

Di tempat yang berbeda, Menteri Pertahanan Perancis mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan keberadaan pasukan militer mereka di Djibouti dan akan mendukung pasukan Djibouti. 16 Juni 2008, Perancis mengirimkan tiga buah kapal, termasuk juga helikopter untuk membantu para korban pasca perang, khususnya membantu dalam hal medis dan ketersediaan logistik. Beberapa hari

⁸³ "France Backing Djibouti in 'War'," BBC News, diakses pada 24 Oktober 2012, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7453063.stm>.

pasca-konflik, Amerika Serikat mengirimkan sekitar 200 angkatan lautnya ke Djibouti dan Perancis saat itu mengirimkan dua kapal perangnya menuju Eritrea.

Tabel 2.1: Tabel Perbandingan Kekuatan Militer Djibouti dan Eritrea tahun 2007

Table 1 The Eritrea-Djibouti military (im)balance

State	Eritrea	Djibouti
Budget (US\$ million)	65	26
Personnel strength (regular)	201 750	10 950
Ground Force	200 000	8 000
Air Force	350	250
Naval Force	1 400	200
Tanks	150	–
Combat aircraft	14	–
Helicopters	5	2

Source: International Institute for Strategic Studies 2007: 271–273.

Sumber: International Institute for Strategic Studies 2007, hal 271-273

Data pada tabel 2.1 ini menggambarkan bagaimana perbandingan kekuatan kedua negara. Terlihat pada data, terdapat perbedaan yang cukup mencolok diantara kedua negara, baik dari segi anggaran maupun secara kapabilitas militer. Jika berbicara mengenai data kekuatan militer terlihat bahwa Djibouti jauh lebih lemah dibandingkan dengan Eritrea. Namun keberadaan dukungan Perancis dan Amerika Serikat tentu saja tidak dapat diabaikan. Adanya dukungan Perancis khususnya dalam bantuan militer baik dari Perancis tidak dapat dipandang sebelah mata oleh Eritrea. Perancis ada di pihak Djibouti dan Eritrea akhirnya tidak melakukan serangan apapun.

2.2.4. Menuju Upaya Perdamaian antara Djibouti dan Eritrea tahun 2008-2010

Situasi di daerah perbatasan Djibouti-Eritrea, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masih rentan akan terjadinya konflik susulan. Menurut Tim Pencari Fakta PBB, akibat perang ini 35 orang tewas dan lebih dari ratusan

mengalami luka-luka.⁸⁴ Misi yang diemban oleh Tim Pencari Fakta ini menyimpulkan bahwa Djibouti harus berhadapan dengan situasi yang mengancam perdamaian baik itu dalam konteks perdamaian nasional Djibouti, untuk kawasan dan juga untuk internasional.⁸⁵ Tim ini pun menyampaikan bahwa Eritrea menolak untuk menerima kedatangan Tim Pencari Fakta PBB dan konsekuensinya adalah hanya penyebab konflik versi Djibouti saja lah yang berlaku bagi Tim Pencari Fakta PBB untuk menelusuri kasus konflik perbatasan ini lebih mendalam. Dalam laporannya Tim Pencari Fakta PBB⁸⁶, mereka menuliskan bahwa Eritrea wajib bekerjasama dengan PBB demi penuntasan kasus ini dan akhirnya memaparkan bukti-bukti untuk lepas dari tuduhan yang diajukan oleh Djibouti.

*“The Djibouti army has since pulled back. It is only logical that the Eritrean forces do the same, as was demanded by the Security Council. No country should be allowed to disregard the decisions of the Security Council with impunity.”*⁸⁷

Misi dari Tim Pencari Fakta PBB juga menekankan pada pentingnya kedua negara untuk menyetujui salah satu dari perjanjian dan protokol pada masa kolonialisme sebagai acuan untuk masalah perbatasan ini sebagai dasar untuk melihat dimana posisi sebenarnya titik perbatasan ini—berdasarkan perjanjian Abyssinia-Perancis tahun 1897, protokol Italia-Perancis tahun 1900-1901, atau perjanjian Perancis-Italia tahun 1935.⁸⁸

Selain Tim Pencari Fakta PBB, Qatar mengajukan diri sebagai pihak untuk menjadi mediator pasca-konflik Djibouti-Eritrea. Djibouti-Eritrea menyambut baik hal tersebut dan menandatangani perjanjian persetujuan penunjukan pemerintah Qatar sebagai mediator. Qatar pun juga menyebar tentaranya di perbatasan Djibouti-Eritrea untuk membantu meringankan tekanan yang dihadapi oleh pemerintah Djibouti. Kantor berita Qatar yang dikontrol pemerintah, QNA

⁸⁴ “Djibouti-Eritrea Border Tension Could Escalate, Warns UN Team,” UN News Centre, diakses pada 9 Desember 2012,

<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28109&Cr=djibouti&Cr1=eritrea>.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ United Nations Security Council, *Report of the United Nations*, 4-5.

⁸⁷ “Djibouti-Eritrea Border Tension.”

⁸⁸ Ibid.

(*Qatar News Agency*), melaporkan bahwa presiden Eritrea Isaias Afewerki dan presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh telah menandatangani kesepakatan mediasi, namun, belum didapatkan kepastian dari pemerintah resmi kedua negara yang bertikai mengenai hal ini.⁸⁹

Namun di sisi lain, Jean Ping, presiden Komisi Uni Afrika saat itu, mengkonfirmasi kebenaran perjanjian tersebut dan menyambut niat baik Qatar sebagai mediator. Menurut Ping, selesainya kasus konflik perbatasan Djibouti-Eritrea akan menghasilkan dampak positif untuk keseluruhan situasi di kawasan Tanduk Afrika.⁹⁰ Dari Qatar, Perdana Menteri Qatar Hamad bin al-Thani mengatakan perjanjian ini akan menyiratkan bahwa tentara-tentara yang ada, baik dari pihak Djibouti maupun Eritrea, akan mundur dari perbatasan di Ras Doumeira selagi Qatar berusaha untuk melakukan proses mediasi. Daerah perbatasan akan dipatroli oleh pasukan Qatar sebagai pasukan perdamaian (*peacekeeping force*).⁹¹

Juni 2010 menjadi momentum Djibouti-Eritrea menunjuk Qatar memfasilitasi proses mediasi. Ini disambut positif baik oleh Uni Afrika maupun PBB walaupun awalnya Ethiopia mempertanyakan posisi Eritrea, apakah Eritrea memang benar-benar berintensi untuk berdamai atau tidak. Namun kemudian, fakta bahwa akhirnya Eritrea setuju dengan proses mediasi yang diajukan Qatar dilihat sebagai sebuah sisi positif untuk melakukan integrasi kembali. Eritrea juga berusaha untuk merintis hubungan baiknya dengan Qatar, Iran, Israel, dan Mesir.⁹²

⁸⁹ “Djibouti-Eritrea Border Dispute Towards Solution,” African Online News (AON), diakses pada 23 Februari 2013, <http://www.afrol.com/articles/36288>.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

⁹² “Border Focus: Eritrea and Djibouti,” Menas Borders, diakses pada 23 Februari 2013, http://www.menasborders.com/menasborders/border_focus/Eritrea-Djibouti.aspx

BAB 3

ANALISIS LANDASAN PEMIKIRAN DALAM MELIHAT AKAR KONFLIK

Bab 3 ini akan berusaha untuk menjabarkan analisa landasan pemikiran yakni konsep sistem anarki dan *balance of power* (mewakili paradigma neorealisme), konsep interdependensi dan nilai demokrasi (mewakili paradigma neoliberalisme), dan konsep identitas (mewakili paradigma konstruktivisme) dalam melihat akar konflik perbatasan Djibouti-Eritrea seperti yang telah dijelaskan dalam bagian 1.3.

Mengapa bab 3 ini penting karena bab 3 ini adalah inti dari keseluruhan tulisan ini, yaitu bagian analisa dari landasan pemikiran yang ada dalam melihat akar konflik. Masing-masing landasan pemikiran memiliki sudut pandangnya masing-masing dalam melihat akar konflik. Hal ini akan memperkaya penjelasan dan analisa untuk melihat akar konflik perbatasan Djibouti-Eritrea.

Struktur pembabakan dalam bab 3 adalah sebagai berikut. Bagian 3.1 akan menjelaskan konsep sistem anarki dan *balance of power* dalam melihat akar konflik. Bagian 3.2 akan konsep interdependensi dan nilai demokrasi dalam melihat akar konflik. Bagian 3.3 akan menjelaskan konsep identitas dalam melihat akar konflik. Dengan adanya pembabakan seperti ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang masing-masing landasan pemikiran dalam menganalisa akar konflik dalam kasus perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira ini.

3.1. Analisa Konsep Sistem Anarki dan *Balance of Power* dalam Melihat Akar Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea

Seperti yang telah dijelaskan dalam landasan pemikiran, terdapat dua sistem dalam struktur politik yakni sistem hierarki (atau juga dikenal dengan istilah sistem domestik) yang bersifat tersentralisasi dan sistem anarki (atau juga dikenal dengan istilah politik internasional) yang bersifat tidak tersentralisasi. Dalam sistem hierarki ada bagian-bagian yang *super-ordination* dan ada yang termasuk dalam *sub-ordination*; ada yang ‘memerintah’, ada yang ‘diperintah’,

sementara dalam sistem anarki setiap bagian itu sama; tidak ada yang ‘memerintah’ dan tidak ada yang ‘diperintah’.

Sistem yang berlaku dalam dunia adalah sistem yang anarki. Tidak ada hierarki yang memimpin dalam sistem dunia saat ini. Semuanya setara dan tidak ada yang merasa ‘memimpin’ atau ‘dipimpin.’ Dalam sistem anarki segala hal mungkin terjadi karena sistem yang anarki diinterpretasikan sebagai bentuk sistem dunia yang sering kacau akibat konflik. Di dalam sistem anarki, potensi terjadinya perebutan daerah potensial sumber daya atau wilayah strategis sangat besar. Menurut Waltz, negara-negara dalam sistem anarki akan bertindak demi kepentingan mereka dan tak jarang menggunakan *force* untuk mendapatkan kepentingannya tersebut.⁹³

Yang dapat membuat sistem anarki ini stabil adalah *balance of power*. *Balance of power* adalah kondisi untuk mempertahankan stabilitas sistem yang ada karena kemampuan militer seimbang sehingga tidak ada satu negara yang lebih mendominasi dibandingkan negara lain. *Balance of power* dilakukan dengan *internal balancing* (meningkatkan kemampuan militer atau ekonomi) dan *external balancing* (membentuk aliansi atau melemahkan lawan).

Mengaplikasikan kepada kasus, sistem yang berlaku di kawasan Tanduk Afrika adalah sistem anarki. Di kawasan Tanduk Afrika tidak ada satu negara yang lebih mendominasi/menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Selain itu, di kawasan Tanduk Afrika juga tidak ada susunan hierarki sehingga sistem anarki juga terjadi di kawasan ini. Secara logika, kekuatan militer Djibouti tentulah tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Ethiopia, Eritrea dan Somalia. Ini dikarenakan Djibouti tidak sering terlibat dalam konflik, tidak seperti Eritrea ataupun Somalia.

Meskipun demikian, Djibouti berupaya untuk meningkatkan kemampuannya khususnya dalam bidang militer. Data berikut akan menunjukkan kemampuan militer Djibouti, mulai dari jumlah personel, jumlah pengeluaran untuk kebutuhan militer, hingga jumlah senjata yang dimiliki oleh Djibouti.

⁹³ Waltz, *Theory of International Politics*, 112.

Tabel 3.1: Tabel Kekuatan Militer Djibouti tahun 1997-2007

Armed forces growth	180	[8th of 132]
Armed forces personnel	8,000	[116th of 166]
Arms imports > constant 1990 US\$	2,000,000 constant 1990 US\$	[83rd of 100]
Branches		
Djibouti National Army (includes Navy and Air Force)		
Comprehensive Test Ban Treaty > Signatures and Ratifications > Ratification	15 JUL 2005	
Comprehensive Test Ban Treaty > Signatures and Ratifications > Signature	21 OCT 1996	
Conscription		
No conscription (AI).		
expenditure > % of GDP	4.28 %	[18th of 145]
expenditure > current LCU	4500000000	
Expenditures	3.8 % of GDP	[16th of 87]
Expenditures > Dollar figure	\$28,600,000.00	[69th of 111]
Expenditures > Dollar figure (per \$ GDP)	\$42.93 per 1,000 \$ of GDP	[9th of 111]
Expenditures > Percent of GDP	3.8%	[17th of 154]
Manpower > Availability > Females	105,168	[150th of 162]
Manpower > Availability > Males	111,274	[165th of 210]
Manpower > Availability > Males age 15-49	107,050	[164th of 175]
Manpower > Availability > Males age 15-49	108,771	[164th of 175]
Manpower > Fit for military service > Females	51,684	[155th of 162]
Manpower > Fit for military service > Males	54,460	[172nd of 210]
Manpower > Fit for military service > Males age 15-49	64,540	[163rd of 174]
Manpower > Fit for military service > Males age 15-49	63,459	[163rd of 174]
Manpower > Reaching military age annually > Females	5,609	[164th of 226]
Manpower > Reaching military age annually > Males	5,618	[165th of 226]
Manpower available for military service > Females age 18-49	87,795	[110th of 120]
Manpower available for military service > Males age 18-49	95,328	[126th of 164]
Manpower fit for military service > Females age 18-49	42,181	[114th of 119]
Manpower fit for military service > Males age 18-49	46,020	[130th of 161]
personnel	13,000	[119th of 170]
personnel > % of total labor force	4.13 %	[12th of 168]
Service age and obligation		
18 years of age for voluntary military service; 16-25 years of age for voluntary military training; no conscription		
US military exports	\$710.00 thousand	[48th of 109]
Weapon holdings	37,000	[130th of 137]

SOURCES: calculated on the basis of data on armed forces from IISS (International Institute for Strategic Studies). 2001. *The Military Balance 2001-2002*. Oxford: Oxford University Press; IISS (International Institute for Strategic Studies). 2001. *The Military Balance 2001-2002*. Oxford: Oxford University Press; World Development Indicators database; All CIA World Factbooks 18 December 2003 to 18 December 2008; Wikipedia: Comprehensive Test Ban Treaty; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland, 1997. Data collected from the nations concerned, unless otherwise indicated. Acronyms: Amnesty International (AI); European Council of Conscripts Organizations (ECCO); Friends World Committee for Consultation (FWCC); International Helsinki Federation for Human Rights (IHFFHR);


[National Interreligious Service Board for Conscientious Objectors \(NISBCO\)](#); [Service, Peace and Justice in Latin America \(SERPAJ\)](#); [War Resisters International \(WRI\)](#); [World Council of Churches \(WCC\)](#); [CIA World Factbook, 28 July 2005](#); [CIA World Factbook, 14 June, 2007](#) ; [Study by David Lochhead and James Morrell](#); available from the [Center for International Policy](#); [Bonn International Center for Conversion \(BICC\)](#)

Sumber: Diakses dari <http://www.nationmaster.com/red/country/dj-djibouti/military&all=1> yang diolah dari berbagai sumber


Data yang dihimpun berasal dari beragam sumber dengan rentang waktu dari tahun 1997-2007. Ini menunjukkan beragam peningkatan yang coba dilakukan oleh Djibouti. Dilihat dari personel militernya, hanya ada 8000 personel di Djibouti. Pengeluaran kemiliteran Djibouti hanya US\$ 28,6 juta dan jumlah senjata yang dimiliki berjumlah 37000 unit. Ini tergolong jumlah yang kecil untuk kekuatan militer suatu negara. Berikut akan dihadirkan data perbandingan antara kekuatan militer negara Djibouti dan Eritrea.

Tabel 3.2: Tabel Perbandingan Kekuatan Militer Negara Djibouti-Eritrea tahun 2008

Military stats: Djibouti vs Eritrea



**Djiboutian
Military Stats**



**Eritrean
Military stats**

Armed forces personnel	8,000 Ranked 116th.	200,000 Ranked 26th. 24 times more than Djibouti
Arms imports > constant 1990 US\$	2,000,000 constant 1990 US\$ Ranked 83rd in 2002.	2,000,000 constant 1990 US\$ Ranked 86th in 2002.
Branches	Djibouti National Army (includes Navy and Air Force)	Eritrean Armed Forces: Ground Forces, Navy, Air Force
Expenditures	3.8 % of GDP Ranked 16th in 2006.	6.3 % of GDP Ranked 5th in 2006. 66% more than Djibouti

expenditure > current LCU	4500000000	2104400000
Expenditures > Dollar figure	\$28,600,000.00	\$151,000,000.00
	Ranked 69th in 2004.	Ranked 40th in 2004. 4 times more than Djibouti
Expenditures > Dollar figure (per capita)	\$36.71 per capita	\$35.68 per capita
	Ranked 31st in 2004. 3% more than Eritrea	Ranked 33rd in 2004.
Expenditures > Dollar figure (per \$ GDP)	\$42.93 per 1,000 \$ of GDP	\$237.79 per 1,000 \$ of GDP
	Ranked 9th in 2004.	Ranked 1st in 2004. 5 times more than Djibouti
expenditure > % of GDP	4.3 %	23.9 %
	Ranked 18th in 2002.	Ranked 1st in 2002. 5 times more than Djibouti
Manpower > Availability > Females	105,168	1,096,120
	Ranked 150th in 2008.	Ranked 110th in 2008. 9 times more than Djibouti
Manpower > Availability > Males	111,274	1,108,836
	Ranked 165th in 2008.	Ranked 119th in 2008. 9 times more than Djibouti
Manpower > Fit for military service > Females	51,684	731,511
	Ranked 155th in 2008.	Ranked 118th in 2008. 13 times more than Djibouti
Manpower > Fit for military service > Males	54,460	715,531
	Ranked 172nd in 2008.	Ranked 125th in 2008. 12 times more than Djibouti
Manpower > Reaching military age annually > Males	5,618	60,490
	Ranked 165th in 2008.	Ranked 105th in 2008. 10 times

		more than Djibouti
personnel	13,000	202,000
	Ranked 119th in 2005.	Ranked 31st in 2005. 15 times more than Djibouti
personnel > % of total labor force	4.13 %	11.3 %
	Ranked 12th in 2005.	Ranked 2nd in 2005. 174% more than Djibouti
personnel (per capita)	16.4 per 1,000 people	45.9 per 1,000 people
	Ranked 13th in 2005.	Ranked 2nd in 2005. 180% more than Djibouti
US military exports	\$710.00 thousand	\$839.00 thousand
DEFINITION:	U.S. Military Exports , for the year 1998 (in thousands of US dollars)	
SOURCE:	Study by David Lochhead and James Morrell; available from the Center for International Policy	
	Ranked 48th.	Ranked 44th. 18% more than Djibouti

Sumber: Diakses dari <http://www.nationmaster.com/compare/Djibouti/Eritrea/Military>

Djibouti berusaha untuk meningkatkan kemampuannya militer. Sayangnya, Djibouti belum mampu menandingi besarnya kekuatan militer Eritrea. Besarnya kekuatan militer Eritrea bersamaan dengan semakin agresifnya Eritrea menempatkan pasukannya di wilayah perbatasan di daerah Ras Doumeira. Eritrea menyebar personel militernya yang jauh lebih banyak dan menyusun strategi penyusupan untuk masuk ke wilayah perbatasan.

Dalam *Briefing Note on the Djibouti-Eritrea Border Stand Off* yang dikeluarkan oleh Uni Afrika, penyebaran pasukan ini sudah dilakukan Eritrea sejak 16 April di daerah Ras Doumeira dan posisi pasukan Eritrea berada di daerah perbukitan Doumeira yang sudah masuk ke wilayah Djibouti.⁹⁴ Pasukan Eritrea ini, berdasarkan *briefing note*, adalah pasukan bersenjata lengkap. Pada 22 April 2008, Menteri Luar Negeri Djibouti melaporkan bahwa pasukan Eritrea

⁹⁴ "Briefing Note on the Djibouti-Eritrea Border Stand-Off", diakses pada 24 April 2013, <http://www.africa-union.org/root/au/organs/Microsoft%20Word%20-125%20Briefing%20note%20on%20Djibouti%20Eritrea%20Border.pdf>.

sudah memasuki wilayah Djibouti kurang lebih sejauh 7 kilometer. Namun pihak Eritrea membantah pernyataan tersebut. Kondisi yang semakin tidak kondusif akhirnya berujung kepada terjadinya perang terbuka pada tanggal 10 Juni 2008-12 Juni 2008 antara Pasukan Bersenjata Djibouti (*Djibouti Armed Forces—DAF*) dan Pasukan Pertahanan Eritrea (*Eritrean Defence Forces—EDF*).⁹⁵

Menguatnya keamanan nasional Eritrea yang ditandai dengan besarnya kemampuan militernya, membuat Djibouti merasa terancam. Belum lagi ditambah dengan agresi Eritrea yang menempatkan pasukannya di daerah perbatasan yang sudah memasuki wilayah Djibouti. Dalam dua tabel yang telah disajikan sebelumnya, Djibouti berusaha untuk mengimbangi kekuatan militer Eritrea yang besar dengan menambah kapabilitas militer mereka pula. Ini dikenal dengan istilah *internal balancing*.

Yang terjadi kemudian adalah kondisi *security dilemma*. Ini dikarenakan menguatnya keamanan nasional Eritrea berpengaruh kepada Djibouti dan Djibouti merasa terancam. Selain itu, karena kemampuan militer Djibouti yang juga lebih lemah, hal ini membuat potensi Eritrea untuk menyerang pihak lain Djibouti menjadi lebih besar. Kondisi *security dilemma* ini sesuai dengan pendapat Waltz soal “faktor kembar” terjadinya konflik. “Faktor kembar” yang dimaksud adalah karena negara berada dalam tatanan anarki sehingga harus mengamankan negaranya dan karena ada sesuatu yang berpotensi mengancam keamanan negaranya.

Dalam situasi *security dilemma*, Djibouti berusaha untuk mengimbangi setiap serangan yang dilakukan oleh Eritrea. Dengan anggaran yang kecil, jumlah pasukan yang lebih sedikit dan tidak ditunjang dengan peralatan militer yang memadai, peluang kekalahan Djibouti sudah terlihat. Di satu sisi, Eritrea dengan jumlah anggaran, pasukan dan peralatan militer yang lebih memadai, mengambil resiko untuk menyerang Djibouti. Eritrea mengorbankan semuanya demi Ras Doumeira yang terbilang kecil. Karena kepentingan akan letak Ras Doumeira yang strategis, Eritrea begitu ingin memiliki kekuasaan penuh atas Ras Doumeira.

⁹⁵United Nations Security Council, *Report of the United Nations*, 2.

Djibouti dengan kemampuan militernya yang cenderung kecil berusaha untuk melindungi wilayahnya sebagai kepentingan mereka. Di lain pihak, Eritrea dengan kemampuan militernya yang besar berusaha untuk melindungi Ras Doumeira sebagai kepentingan mereka. Kedua negara rela mengorbankan setiap kemampuan militernya untuk menjaga kepentingan mereka masing-masing. Eritrea kehilangan banyak hal dalam kemampuan militernya (seperti personel militer, anggaran, dan senjata) demi kemenangan semu. Ini dikarenakan pada akhirnya Ras Doumeira juga tidak sepenuhnya berada dalam kontrol mereka. Di sisi lain Djibouti berhasil mempertahankan status Ras Doumeira yang tetap *shared control*.

Mengapa pada akhirnya yang terjadi justru *security dilemma* dan bukan aliansi? Seperti yang telah disebutkan dalam landasan pemikiran, aliansi bisa terjadi jika ada kepentingan yang sama seperti ketakutan terhadap negara atau negara-negara lain. Dalam kasus ini, kedua negara lain yaitu Ethiopia dan Somalia tidak berada dalam posisi Djibouti yang merasa terancam dengan eksistensi Eritrea di daerah perbatasannya. Djibouti pun di satu sisi tidak 'mengajak' Somalia dan Ethiopia untuk beraliansi dan sama-sama mengalahkan Eritrea. *Security dilemma* lebih mewakili kondisi yang terjadi di antara kedua negara yang berkonflik ini, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Mengapa pada akhirnya tidak terjadi *balancing* maupun *bandwagoning*? *Balancing* dan *bandwagoning* bisa terjadi jika ada ancaman yang berasal dari luar kawasan ini. Sayangnya, tidak ada ancaman yang berasal dari luar. Adanya keberpihakan Perancis kepada Djibouti mungkin bisa menjadi ancaman tetapi tidak cukup kuat untuk melandasi terjadinya *balancing* maupun *bandwagoning*. Satu-satunya yang merasa terancam dengan kedekatan hubungan Djibouti-Perancis hanya Eritrea, sementara Somalia dan Ethiopia tidak merasakan hal tersebut. Eritrea tidak menemukan sekutu aliansi untuk menandingi kekuatan Djibouti-Perancis. Sehingga *balancing* dan *bandwagoning* tidak terjadi untuk kasus ini.

Terjadinya *security dilemma* menguatkan landasan pemikiran yang disebutkan sebelumnya dalam bagian 1.3.1 bahwa kondisi sistem yang anarki

dapat distabilkan dengan *balance of power*. Berbicara mengenai *balance of power* pasti juga berbicara soal stabilitas yang bersumber pada sumber militer. Dalam konflik ini, jelas yang menjadi sumber stabilitasnya adalah kondisi kemampuan atau kapabilitas militer yang ada di kedua negara. Karena kedua negara tidak berada atau tidak memiliki kemampuan militer yang sama, itulah mengapa akhirnya kondisinya tidak stabil dan akhirnya mengakibatkan terjadinya *security dilemma*. Usaha seperti *internal balancing* yang dilakukan oleh Djibouti tidak cukup kuat untuk menandingi militer Eritrea dan disamping itu *external balancing* tidak terjadi karena tidak adanya aliansi yang dibentuk oleh Djibouti, seperti yang dipaparkan sebelumnya.

Selain itu, karakteristik ‘sistem konflik’ pada kawasan Tanduk Afrika adalah aliansi yang merujuk kepada prinsip ‘*the enemy of my enemy is my friend*.’⁹⁶ Ini terjadi bagi negara Djibouti. “Musuh” Djibouti dalam kasus ini adalah Eritrea dan Eritrea berselisih dengan Ethiopia dalam waktu yang lama. Adanya perang Ethiopia dan Eritrea di tahun 1998-2000 memungkinkan skema aliansi ini terjadi. Seperti yang telah banyak disebutkan, adanya pemindahan kegiatan ekspor-impor negara Ethiopia ke negara Djibouti mendukung terjadinya hubungan yang dekat di antara kedua negara. Ethiopia lebih percaya kepada Djibouti dibandingkan dengan Eritrea. Tetapi skema aliansi ini tidak berlaku bagi Eritrea. Mengapa?

Intensi dari Djibouti adalah tidak bermusuhan dengan negara lainnya, berbeda dengan Eritrea. Sebelum berkonflik dengan Eritrea, Djibouti tidak terlibat konflik dengan negara lainnya. Djibouti berfokus pada pembangunan domestik negaranya khususnya dalam kemampuan ekonomi dan militernya. Djibouti belum memiliki “musuh” saat itu sehingga Eritrea tidak beraliansi dengan siapapun untuk “membuktikan” skema aliansi ‘*the enemy of my enemy is my friend*’. Inilah mengapa skema ini tidak berjalan bagi Eritrea, di samping kenyataannya adalah Eritrea berusaha untuk menutup diri dan tidak berusaha menjalin relasi yang dekat dengan negara-negara tetangganya yaitu Ethiopia, Djibouti dan Somalia.

⁹⁶ Zitelmann, “Introduction to the Special Issue,” 7.

Adakah keterkaitan konflik ini dengan konflik-konflik lainnya di daerah Sub-Sahara Afrika? Penulis melihat konflik perbatasan antara Djibouti dan Eritrea ini adalah terpisah dari konflik-konflik serupa yang ada di Sub-Sahara Afrika. Konflik memang terjadi antara Djibouti dan Eritrea saja, tetapi pihak lain yang juga “ikut serta” dalam konflik ini adalah Ethiopia. Somalia tidak “terikat” dalam konflik ini karena memang sedari awal tidak ada keterlibatan Somalia dalam konflik perbatasan ini. Menurut penulis, konflik perbatasan ini memang murni karena arogansi kepentingan dari Eritrea akan Ras Doumeira yang strategis dan Djibouti selaku negara yang juga memiliki daerah perbatasan di sana yang mencoba untuk mengintervensi tindakan Eritrea tersebut. Ethiopia pun menjadi imbas khususnya dikarenakan perang Ethiopia-Eritrea tahun 1998-2000 ketika Ethiopia mengambil langkah untuk mengamankan ekspor-impor negaranya ke Djibouti yang justru memperkeruh konflik yang sudah tercipta antara Eritrea dan Djibouti.

Sebagai kesimpulan, *internal balancing* yang dilakukan oleh negara Djibouti nyatanya tidak cukup untuk mengimbangi besarnya kekuatan militer Eritrea. Menguatnya kekuatan militer Eritrea, ditambah lagi dengan penyebaran pasukan yang dilakukan di daerah Ras Doumeira membuat Djibouti merasa terancam. Kemampuan militer Djibouti yang lemah menjadi justifikasi bagi Eritrea untuk menyerang Djibouti. Kedua hal dalam *security dilemma* ini-lah yang akhirnya dapat menjelaskan hal yang menjadi akar konflik jika melihat akar konflik perbatasan Djibouti-Eritrea dari konsep sistem anarki dan *balance of power*. Opsi *balancing* dan *bandwagoning* tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak ada ancaman yang berasal dari luar.

3.2. Analisa Konsep Interdependensi dan Nilai Demokrasi dalam Melihat Akar Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian landasan pemikiran, secara sederhana interdependensi adalah *mutual dependence*. Dalam interdependensi ada dampak timbal-balik yang dirasakan oleh antar-aktor. Interdependensi tidak lepas dari keamanan nasional, dan konflik kepentingan dapat dikurangi jika ada interdependensi dan diwujudkan dalam kerjasama.

Diaplikasikan dalam kasus, interdependensi antar kedua negara yang berkonflik ini tergolong lemah. Mengapa demikian?

Dalam bab 2, khususnya dalam bagian 2.1.2 dan 2.1.3, kedua negara tidak tercatat memiliki kerjasama. Sejak tahun 1996, kedua negara sudah bersitegang satu sama lain. Ini dimulai dengan sikap Eritrea yang menyerang Ras Doumeira. Tidak dijelaskan apakah motivasi Eritrea untuk menyerang Ras Doumeira, tetapi ini berhubungan dengan perilaku Eritrea yang memetakan ulang perbatasan di daerah Ras Doumeira. Tidak lama setelah itu, tahun 1998-2000 terjadi perang antara Ethiopia dan Eritrea. Perang ini sesungguhnya menjadi ancaman sekaligus kesempatan bagi Djibouti.

Ethiopia memilih Djibouti sebagai *partner*-nya dan mengalihkan semua kegiatan perdagangan dari yang awalnya dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Eritrea. Ethiopia menggunakan pelabuhan laut Djibouti untuk memperlancar kegiatan ekspor-impor negaranya. Secara ekonomi, memang adanya pengalihan kegiatan perdagangan ini menguntungkan Djibouti. Apalagi saat perang terjadi, Djibouti juga tengah berusaha menata kondisi perekonomian negaranya. Di saat yang bersamaan ancaman muncul dari Eritrea. Eritrea menuduh Djibouti memihak kepada Ethiopia ketika Eritrea dan Ethiopia tengah terlibat perang. Padahal saat itu, Djibouti tidak memihak kepada siapapun dan bersikap netral. Hubungan Djibouti dan Eritrea semakin memburuk seiring dengan tuduhan tersebut.

Kedua negara sempat mencoba berhubungan baik pasca berakhirnya perang Ethiopia-Eritrea tahun 2000. Presiden Omar Guelleh (presiden Djibouti) maupun presiden Afewerki (presiden Eritrea) menunjukkan itikad baiknya dengan saling mengunjungi ke Djibouti dan Eritrea. Sayangnya ini sampai disitu saja dan tidak diiringi dengan kerjasama antara kedua negara. Mussie Tesfagorgis dalam tulisannya menuliskan bahwa hubungan baik kedua negara bertahan pasca merdekanya Eritrea tahun 1993 dan kemudian tensi hubungan Eritrea dan Djibouti terus turun-naik dan bahkan harus dimediasi oleh Libya di tahun 2001.⁹⁷ Djibouti sebenarnya berusaha untuk menjalin relasi yang baik dengan Eritrea terkhusus pasca terjadinya perang antara Ethiopia-Eritrea. Walaupun dicurigai oleh pihak

⁹⁷ Mussie Tesfagiorgis G., *Africa in Focus: Eritrea* (California: ABC-CLIO LLC, 2011), 92.

Eritrea, Djibouti pada akhirnya tetap menjalin relasi yang baik dengan Eritrea. Tapi tidak demikian dengan Eritrea. Adanya kebijakan tidak ada istilah *good-faith border dispute* yang diterapkan Eritrea membuat Eritrea tidak mempercayai lagi negara-negara tetangganya.

Ketiadaan kerjasama di antara kedua negara menandakan lemahnya interdependensi. Adanya kerjasama menimbulkan interdependensi yang kuat karena dalam kerjasama itu-lah terlihat hubungan timbal-balik. Hubungan timbal-balik ini diharapkan dapat saling menguntungkan kedua negara atau kedua aktor yang menjalin kerjasama. Karena dalam kasus ini kedua negara hanya berhubungan baik dan tidak didukung dengan adanya kerjasama di bidang-bidang tertentu, hal ini-lah yang menurut penulis menandakan interdependensi antara kedua negara itu lemah. Lemahnya interdependensi menjadi satu lagi penyebab terjadinya konflik perbatasan Djibouti-Eritrea karena proses interaksi di antara kedua negara tidak terlalu kuat dan tidak ada kerjasama yang mengikat kedua belah pihak.

Lalu bagaimana dengan peran institusi? Seperti menurut tulisan Nye, institusi yang ada dapat mengurangi dampak anarki dari sistem yang ada. Ekspektasi konflik dapat ditekan dengan keberadaan institusi dalam empat cara: (1) Institusi menyediakan *sense of continuity*; (2) Institusi dapat menyediakan kesempatan untuk terjadinya resiprositas atau interdependensi; (3) Institusi dapat menyediakan adanya arus informasi; dan (4) Institusi menyediakan cara-cara untuk menyelesaikan konflik. Tahapan penyelesaian konflik oleh institusi berada sampai tahapan resolusi konflik. Resolusi konflik sendiri adalah tahapan penyelesaian konflik dengan sejumlah metode dan proses untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dengan damai.⁹⁸

Secara spesifik, institusi yang ada akan membahas fungsi kedua (menyediakan kesempatan untuk terjadinya interdependensi) dan fungsi keempat (menyediakan cara-cara untuk menyelesaikan konflik). Institusi yang akan dibahas adalah IGAD.

⁹⁸ Peter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolution* (London: SAGE Publications, 2002), 5-7.

IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*) yang menjadi institusi regional di kawasan timur Afrika dibentuk tahun 1996 untuk menggantikan institusi sebelumnya yang bernama IGADD (*Intergovernmental Authority on Drought and Development*) yang dibentuk tahun 1986. Awalnya IGADD diciptakan karena kawasan timur Afrika (saat ini dikenal dengan kawasan Tanduk Afrika) harus mengalami kekeringan dan ancaman kelaparan mematikan antara tahun 1974-1984. Dibentuknya IGADD saat itu diharapkan mampu mendukung usaha masing-masing negara menanggulangi kekeringan dan ancaman kelaparan melalui pendekatan regional.⁹⁹

Di tahun 1983-1984, enam negara pembentuk institusi yakni Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan, dan Uganda. Keenam negara mengajukan kepada PBB untuk membentuk satu badan *intergovernmental* untuk mengontrol pembangunan dan kekeringan di daerah mereka. Maka dibentuklah IGADD tahun 1986 dengan markas besarnya di Djibouti. Eritrea menjadi negara ketujuh yang bergabung pasca kemerdekaannya di tahun 1993. 21 Maret 1996 menandai terjadinya perubahan nama dari IGADD menjadi IGAD dengan harapan bahwa IGAD akan memperluas daerah kerjasama regional dan dengan struktur organisasi yang baru.¹⁰⁰ Visi IGAD adalah IGAD ingin menjadi institusi regional utama untuk menciptakan perdamaian, kemakmuran, dan integrasi regional di kawasan IGAD. Misi IGAD adalah meningkatkan kerjasama di bidang keamanan pangan (*food security*), perlindungan lingkungan, memperkenalkan dan mempertahankan keamanan serta perdamaian, dan kerjasama ekonomi serta proses integrasi.¹⁰¹ Salah satu program prioritas IGAD adalah pencegahan, manajemen dan resolusi terhadap konflik dan hubungan kemanusiaan. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah untuk memastikan meratanya perdamaian dan stabilitas kawasan sehingga berdampak juga kepada perkembangan ekonomi.¹⁰²

⁹⁹ "History," IGAD, diakses pada 7 Juni 2013, <http://igad.org>.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² "Inter Governmental Authority in Development (IGAD) – Peace and Security Architecture," diakses pada 5 Juni 2013, [http://aros.trustafrica.org/index.php/Inter-Governmental_Authority_on_Development_\(IGAD\)_%E2%80%93_Peace_and_Security_Architecture](http://aros.trustafrica.org/index.php/Inter-Governmental_Authority_on_Development_(IGAD)_%E2%80%93_Peace_and_Security_Architecture).

IGAD terkenal dengan pencapaiannya di bidang keamanan dan perdamaian ketimbang di bidang ekonomi. Beberapa pencapaiannya antara lain¹⁰³:

- a. Proses perdamaian di Somalia – Sudan: IGAD memainkan peranan sebagai fasilitator perjanjian dan proses perdamaian di konflik Somalia dan Sudan. Semenjak penandatanganan perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) tahun 2005, IGAD memonitori proses implementasinya dibantu oleh Kenya, Uganda, dan pasukan *peacekeeping* dari UNMIS.
- b. *African Standby Force*: IGAD berperan dalam pembentukan EASBRIG (*Eastern African Brigade*). Anggota EASBRIG adalah ketujuh negara anggota IGAD, ditambah Tanzania, Rwanda, Mauritius dan Burundi.
- c. CEWARN: CEWARN (*Conflict Early Warning and Response Mechanism*) sebagai agenda utama dari IGAD. Namun CEWARN memfokuskan diri pada konflik pastoral yang berkembang menjadi konflik bersenjata.
- d. *Regional Disarmament Program*: IGAD bekerjasama dengan RECSA (*Regional Centre for Small Arms and Light Weapons*) setelah sebelumnya semua anggota IGAD menandatangani *Nairobi Declaration of Small Arms*.

Bagaimana dengan posisi IGAD dalam melihat akar konflik Djibouti-Eritrea?

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konflik antara Djibouti dan Eritrea di daerah Ras Doumeira ini dikarenakan adanya serangan yang dilakukan oleh Eritrea ke daerah Ras Doumeira di tahun 1996. Sebagai institusi regional yang ada di kawasan Tanduk Afrika, IGAD diharapkan berkontribusi untuk mencegah konflik ini terjadi. Ketika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Eritrea kepada Djibouti, IGAD belum dapat menjadi mediator yang dapat mencegah konflik ini terjadi. Ini dikarenakan IGAD baru saja terbentuk menggantikan institusi sebelumnya yaitu IGADD di tahun yang sama. Karena

¹⁰³ Ibid.

itulah menurut penulis, IGAD yang masih baru dan “belum siap” menjadi justifikasi untuk menjelaskan mengapa IGAD gagal mencegah terjadinya konflik ini di tahun 1996. Selain itu, di tahun 1996, konflik awal antara Djibouti dan Eritrea dapat mereka selesaikan sendiri setelah Eritrea sepakat untuk menarik mundur pasukannya dari daerah perbatasan dan Djibouti menarik klaim tuduhan atas Eritrea yang memetakan ulang wilayah negaranya.

Masuk di tahun 1998-2000, saat itu terjadi perang Ethiopia dan Eritrea. Perang antara Ethiopia dan Eritrea juga adalah perang perbatasan seperti perang yang terjadi antara Eritrea dan Djibouti. Dalam perang ini pun IGAD gagal untuk mencegah perang ini terjadi sehingga kedua negara saling serang satu sama lain. Belum lagi “efek samping” dari terjadinya perang ini adalah tuduhan Eritrea bahwa Djibouti memihak kepada Ethiopia terkait pemindahan kegiatan ekonomi Ethiopia ke negara Djibouti ketika perang Ethiopia-Eritrea berlangsung. Ini semakin menunjukkan lemahnya peran IGAD untuk mencegah konflik terjadi.

Memang terjadi paradoks dalam hal ini. Di satu sisi, visi IGAD seperti yang telah dituliskan di atas adalah menjadi institusi regional untuk menciptakan perdamaian dan program prioritasnya adalah pencegahan, manajemen dan resolusi konflik. Harusnya IGAD berkontribusi lebih sebagai institusi regional di kawasan Tanduk Afrika untuk mencegah konflik terjadi, seperti konflik Ethiopia-Eritrea dan secara khusus adalah konflik Djibouti-Eritrea. Di sisi lain, satu-satunya program pencegahan konflik yang dirancang oleh IGAD adalah CEWARN.¹⁰⁴ Seperti yang telah disinggung di atas, CEWARN memang menjadi agenda prioritas IGAD tetapi sayangnya *concern* utama CEWARN adalah untuk mencegah konflik pastoral yang *cross-border* agar tidak berkembang menjadi konflik senjata dalam skala yang lebih besar dan agar komunitas lokal yang ada bisa berpartisipasi dalam mencegah konflik.¹⁰⁵

Di satu sisi, penulis melihat bahwa program CEWARN ini baik. Anggota IGAD memang tidak hanya Djibouti, Ethiopia, Eritrea, dan Somalia sebagai

¹⁰⁴ “About the Peace and Security Division – Conflict Prevention, Management and Resolution,” IGAD, diakses pada 2 Juli 2013,
http://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=148&limitstart=1

¹⁰⁵ “Peace and Security Architecture.”

negara-negara di kawasan Tanduk Afrika, namun juga mencakup Kenya, Sudan dan Uganda. Baik itu negara-negara kawasan Tanduk Afrika serta Kenya, Sudan dan Uganda memiliki dinamikanya masing-masing dalam konflik. Negara kawasan Tanduk Afrika cenderung menghadapi konflik karena perbatasan wilayah, sementara Kenya, Sudan dan Uganda cenderung menghadapi konflik wilayah pastoral yang pelik. CEWARN baik untuk diaplikasikan kepada negara Kenya, Sudan dan Uganda, tetapi gagal ketika diberlakukan untuk negara kawasan Tanduk Afrika. Di titik inilah menurut penulis IGAD belum efisien menciptakan satu mekanisme pencegahan konflik untuk konflik perbatasan seperti yang dialami negara-negara kawasan Tanduk Afrika. Ketiadaan mekanisme pencegahan konflik seperti CEWARN-lah yang juga mendorong IGAD kurang berkontribusi untuk mencegah konflik di kawasan Tanduk Afrika. IGAD menjadi terkesan tidak berbuat apa-apa untuk mencegah konflik sehingga akhirnya konflik Eritrea-Djibouti terjadi di tahun 1996 dan 2008, begitu pula dengan konflik Ethiopia-Eritrea di tahun 1998-2000.

Lebih jauhnya, tahun 2008 ketika konflik antara Eritrea dan Djibouti terjadi, juga tidak ada upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh IGAD. Perang terbuka pun terjadi dan pasca konflik pihak yang memfasilitasi perdamaian adalah PBB dan negara Qatar sebagai pemantaunya. IGAD tidak berkontribusi banyak dalam proses penyelesaian konflik Djibouti-Eritrea, padahal seharusnya IGAD-lah yang menjadi mediator karena konflik ini berada dalam 'kekuasaan' IGAD. Konflik ini masih berada dalam kawasan Tanduk Afrika yang masih menjadi wewenang IGAD untuk bertindak.

Kemudian, bagaimana melihat akar konflik dari nilai demokrasi? Dalam tulisannya, Wanyande menjelaskan bahwa definisi demokrasi adalah sistem politik yang mendorong masyarakat dan membuat masyarakat dapat bebas dan berpartisipasi dalam kehidupan politik bangsanya. Aspek penting dalam partisipasi ini termasuk di dalamnya adalah hak untuk membuat keputusan kritis soal jenis dan natur pemerintah yang ingin dibentuk dan hak untuk berpendapat

terhadap isu publik yang penting yang akan dihadapi.¹⁰⁶ Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kepentingan, hak dan kebebasan individu seperti hak untuk berpolitik, membentuk asosiasi, atau hak untuk didengarkan diakui, dihargai dan dilindungi oleh negara.

Kunci untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi adalah dari proses pemilihannya. Proses pemilihan mewakili cara untuk membuat pilihan secara adil. Dengan adanya pemilihan langsung menandakan munculnya alternatif dari siapa yang akan dipilih dan dalam proses pemilihan, baik kelompok maupun individu yang berbeda sesuai dengan preferensi politiknya masing-masing.¹⁰⁷ Dengan adanya pemilihan, maka proses ini dan hasilnya adalah hasil rembulan legitimasi bagi siapapun nantinya yang terpilih sebagai pemenang, dan pemenang akan ditentukan oleh banyaknya jumlah suara. Namun, adanya sistem satu partai tidak mengizinkan terjadinya proses pemilihan seperti sistem demokrasi. Kondisi dari sistem satu partai tidak memenuhi untuk terjadinya pemilihan yang merupakan simbol demokrasi karena tidak adanya partai-partai politik yang muncul dan masyarakat tidak dapat memilih. Maka dalam sistem seperti ini, pemilihan yang dilakukan bukanlah pemilihan yang saling berkompetisi soal nilai-nilai politik yang diusung melainkan lebih ke calon individunya tersebut.¹⁰⁸

Dalam sebuah tulisannya, Belachew Gebrewold mengungkapkan bahwa demokrasi bukanlah sekedar ritual *voting* atau pemilihan saja. Demokrasi adalah adanya pluralitas baik dalam opini, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, sistem politik multi-partai, kompetisi politik, pemilihan multi-partai yang bebas dan jujur, adanya hak fundamental dan hak asasi manusia, dan adanya akuntabilitas yang menyelenggarakan demokrasi.¹⁰⁹

Melihat konteks demokrasi secara sederhana seperti yang telah dipaparkan di atas, sulit rasanya bagi negara-negara Afrika untuk menyelenggarakan

¹⁰⁶ Peter Wanyande, "Democracy and the One-Party State: The African Experience," dalam *Democratic Theory and Practice in Africa*, ed. Walter O. Oyugi, Atieno Odhiambo, et.al. (New Hampshire: Heinemann Educational Books Inc., 1988), 74.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 77.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 78.

¹⁰⁹ Belachew Gebrewold, "Democracy and Democratization in Africa," dalam *Peace and Conflict in Africa*, ed. David J. Francis (London: Zed Books, 2008), 149.

pemerintahan yang demokratis. Benua Afrika ‘terbiasa’ dengan sistem pemerintahan yang diktator, partai tunggal dan pemimpin yang berkuasa dalam waktu yang lama. Demokrasi yang secara singkat adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat, tidak dapat dijalankan karena partai tunggal yang dominasinya cukup kuat dan oposisi yang basisnya tidak cukup kuat, sehingga masyarakat pun akhirnya tidak punya pilihan, selain tetap memilih partai tunggal dan pemimpin yang berkuasa.

Lalu, bagaimana dengan kondisi Djibouti dan Eritrea sendiri? Eritrea adalah negara dengan sistem pemerintahan yang diktator. Presiden Isaias Afewerki adalah presiden yang terus bertahan mulai dari kemerdekaan Eritrea tahun 1993 hingga saat ini. Eritrea awalnya berharap ketika mereka merdeka di tahun 1993, negaranya dapat menjadi cerminan negara yang demokratis dan makmur di kawasan Afrika. Namun, adanya politik domestik di Eritrea yang bersifat militer ditambah lagi dengan berbagai perang yang kemudian terjadi yang menyebabkan hancurnya ekonomi domestik semakin membuat Eritrea terisolasi baik secara regional maupun internasional.¹¹⁰

Di sisi lain, Djibouti mengalami peningkatan yang cukup signifikan ketika mengadakan pemilihan presiden tahun 1999, sehingga terjadi pergantian presiden dari presiden Gouled Aptidon kepada presiden Ismail Omar Guelleh. Guelleh mencoba untuk menciptakan dasar dari proses demokrasi.¹¹¹ Perjanjian damai tahun 2001, menekankan ulang bahwa pemerintahan yang bersifat demokratis adalah satu-satunya solusi untuk perdamaian jangka panjang di Djibouti, pun demikian dengan tahun perjanjian tahun 2002 untuk mengakhiri pembatasan sistem muti-partai dengan tujuan untuk membuat sistem multi-partai tak terbatas kemudian ditandatangani dan menjadi awalan yang baru bagi proses demokrasi Djibouti. Tapi ini tidak berjalan mulus karena di tahun 2003 dan 2005 terjadi banyak permasalahan khususnya pemilihan parlemen, begitu juga dengan pemilihan presiden tahun 2005 yang akhirnya ‘memaksa’ Djibouti untuk kembali

¹¹⁰ Ibid., 168.

¹¹¹ “Djibouti,” Democracy Coalition Report, diakses pada 15 April 2013, http://demcoalition.org/pdf/9_Djibouti.pdf.

pada sistem yang umumnya digunakan yaitu partai yang berkuasa adalah *ruling party*.

Akar konflik dari bagian ini adalah karena kedua negara bukan merupakan negara dengan sistem demokrasi sehingga tidak memiliki nilai liberal. Ini menimbulkan ketidakpercayaan antara kedua negara. Negara dengan sistem demokrasi adalah negara yang dari, untuk, dan oleh rakyat. Negara dengan sistem demokrasi pasti mempertimbangkan lebih jauh ketika memutuskan untuk berperang dengan negara yang menurut negara mereka adalah ancaman, khususnya mengancam dari sisi keamanan teritorial. Seperti yang dipaparkan oleh John Owen, keputusan dari warga negara juga berpengaruh untuk menentukan negaranya akan berperang atau tidak.

Dalam sisi ini, baik Djibouti maupun Eritrea bukanlah tipe negara demokrasi. Djibouti meskipun pernah melaksanakan pemilihan presiden dan parlemen namun tidak menjadi negara demokrasi karena sistem ini tidak diteruskan. Demokrasi pun gagal diterapkan di negara ini dan kembali kepada 'natur' yakni negara dengan pemimpin yang bertahan lama meskipun Omar Guelleh tidak dikategorikan sebagai pemimpin yang diktator.

Eritrea pun juga bukan merupakan negara yang demokratis. Pasca kemerdekaan Eritrea tahun 1993, tidak ada pemilihan langsung yang diselenggarakan di Eritrea, termasuk pemilihan nasional untuk memilih presiden. Partai yang ada hanyalah partai tunggal PFDJ dengan presiden Eritrea yang masih bertahan adalah presiden Isaias Afewerki. Tidak ada sistem multi-partai dan organisasi-organisasi dikontrol ketat, dan pemerintahan Eritrea bersifat kediktatoran karena tidak ada keputusan yang diambil yang bertentangan dengan keputusan pemerintah. Bidang ekonomi pun tidak ketinggalan karena semua sektor dikontrol oleh PFDJ pimpinan Afewerki, termasuk sektor impor-ekspor.

Melihat kedua negara dengan sistem pemerintahan yang diktator dan bukan demokratis, dilihat penulis sebagai penyebab mengapa akhirnya kedua negara bisa terlibat dalam perang di daerah perbatasan. Adanya kediktatoran pemimpin membuat setiap keputusan diputuskan oleh pemimpin negara, bukan

ditentukan oleh warga negara melalui parlemen. Negara demokratis identik dengan perundingan dan pertimbangan untuk memutuskan terjadinya perang. Warga negara termasuk salah satu pertimbangan suatu negara dalam menyelenggarakan perang. Tetapi ini tidak berlaku bagi pemerintahan negara yang bukan demokratis, karena setiap keputusan bisa saja diambil sewenang-wenang dan disesuaikan dengan keinginan pemimpin negaranya. Khususnya seperti Eritrea yang pemerintahannya lebih sewenang-wenang dibandingkan Djibouti, Eritrea cenderung tidak memperdulikan warga negara sebagai pertimbangannya dalam menyelenggarakan perang. Yang ada hanya upaya untuk mencapai kepentingan. Itu-lah mengapa ketiadaan nilai liberal dan sistem negara yang demokratis juga dapat menjadi penyebab akar konflik perbatasan khususnya dalam kasus ini.

3.3. Analisa Konsep Identitas dalam Melihat Akar Konflik Perbatasan Djibouti-Eritrea

Dalam paparan Nye, adanya kontak *person-to-person* dapat mengurangi potensi konflik. Ini dikarenakan adanya kontak *person-to-person* yang kontinu dapat menghasilkan pemahaman bersama (*promoting understanding*). Sebelum melakukan kontak untuk menciptakan pemahaman bersama, masing-masing aktor memiliki identitasnya sendiri. Seperti telah dipaparkan, dalam pembentukan identitas ada unsur *self* dan *other*. *Self* merujuk kepada proses satu subjek mengidentifikasikan dirinya sendiri. *Other* merujuk kepada proses satu subjek mengidentifikasikan subjek lainnya.

Identitas akan berkaitan dengan kepentingan, karena kepentingan adalah hal yang diinginkan oleh aktor atau suatu identitas. Tanpa adanya kepentingan, maka identitas tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Tanpa adanya identitas, kepentingan tidak dapat tercapai karena tidak ada yang mengarahkan. *Self* dan *Other* dapat menciptakan identitas kolektif atau identitas bersama. Untuk menciptakannya membutuhkan proses identifikasi yang merujuk kepada isu-isu tertentu yang akhirnya membuat *self* dan *other* melebur menjadi satu identitas (Wendt menyebutnya dengan istilah identitas “*we*”).¹¹² Elemen penting dalam

¹¹² Wendt, *Social Theory of International Politics*, 229.

identitas kolektif ini adalah adanya *shared characteristics*. Dalam identitas kolektif-lah akan terbentuk *common in-group identity* dan *we-feeling*.

Bagaimana Djibouti berusaha mengidentifikasi Eritrea dan sebaliknya? Pertama, mari melihat jika Djibouti menjadi pihak *self* dan Eritrea sebagai pihak *other*.

Ketiadaan hubungan kerjasama antara Djibouti dan Eritrea mempersulit untuk melihat bagaimana Djibouti mengidentifikasi Eritrea. Tetapi, Djibouti sejak awal memang tidak memiliki intensi tertentu terhadap Eritrea. Djibouti berusaha untuk menjalin relasi yang baik, sampai akhirnya terjadi penyerangan tahun 1996 yang mengancam Ras Doumeira. Terlebih, tahun 1998-2000 ketika Eritrea menuduh Djibouti dan Ethiopia saling bekerjasama untuk memojokkan Eritrea ketika Eritrea dan Ethiopia terlibat perang tahun 2000. Adanya usaha untuk memperbaiki hubungan dengan kunjungan masing-masing pemimpin negara baik itu presiden Afewerki menuju Djibouti dan dibalas dengan kunjungan presiden Omar Guelleh ke Eritrea sepertinya tidak terlalu signifikan. Ini dikarenakan tidak adanya suatu perjanjian tertulis antara kedua negara sebagai perjanjian untuk tidak merusak hubungan keduanya.

Djibouti mungkin pada masa kemerdekaannya dahulu, tidak menganggap negara-negara di kawasan Tanduk Afrika sebagai sesuatu hal yang dapat mengancam negaranya. Seiring berjalannya waktu, Djibouti melihat bahwa Eritrea adalah negara yang diam-diam dapat melakukan suatu tindakan yang berpotensi merugikan negaranya Tahun 2000, dengan tuduhan Eritrea yang semakin serius, cara pandang Djibouti terhadap Eritrea tidak sama lagi. Djibouti sudah semakin 'kenal' dengan Eritrea dan juga tuduhan-tuduhannya sehingga konstruksi Djibouti sudah tidak sama lagi dengan awal ketika melihat Eritrea tidak menjadi sesuatu yang dapat mengancam negaranya.

Lalu bagaimana dengan Eritrea? Bagaimana Eritrea mengidentifikasi dirinya dan mengidentifikasi Djibouti? Mari melihat Eritrea sebagai pihak *self* dan Djibouti sebagai pihak *other*.

Kepentingan negara Eritrea terhadap Djibouti bukan karena sumber daya Djibouti. Kepentingannya hanya satu yaitu posisi Ras Doumeira. Eritrea tertarik dengan strategisnya posisi Ras Doumeira yang ada di Pulau Doumeira karena letaknya dekat dengan kawasan Semenanjung Arab. Menurut Eritrea, jika mereka bisa menguasai Ras Doumeira ini berarti bisa membantu perekonomian Eritrea yang sedang memburuk. Eritrea tidak pernah tercatat berelasi cukup baik dengan negara-negara tetangganya di kawasan Tanduk Afrika. Eritrea terlibat perang panjang dengan Ethiopia, baik perang untuk memperjuangkan kemerdekaan Eritrea, maupun perang perbatasan di tahun 1998-2000. Demikian juga dengan Djibouti, dimana Eritrea di tahun 1996, melakukan serangan di Ras Doumeira untuk menebar ancaman di daerah perbatasan tersebut (yang ternyata di tahun 2008 justru menjadi perang terbuka). Dengan Somalia, bahkan Eritrea tidak melakukan hubungan apapun, termasuk hubungan diplomatik.¹¹³ Ini menegaskan bahwa Eritrea memegang teguh kebijakannya: tidak istilah *good-faith border dispute* untuk negara-negara tetangga di kawasan Tanduk Afrika.

Ini dapat menjelaskan bahwa setiap yang dilakukan oleh Eritrea terkesan mencurigakan karena hubungan yang dijalin dengan kawasan Tanduk Afrika tidak ada yang berujung dengan hubungan baik. Terkhusus untuk Djibouti, Eritrea memang tidak ada hubungan baik dengan Djibouti sejak awal. Namun, adanya kepentingan Eritrea akan Ras Doumeira untuk meningkatkan perekonomian-lah yang 'memaksa' Eritrea untuk akhirnya melakukan serangan untuk mencoba mengancam Djibouti dan pasukan Djibouti di daerah perbatasan Ras Doumeira. Tuduhan yang dilancarkan Eritrea kepada Djibouti ketika Eritrea berhadapan dengan Ethiopia pada perang tahun 1998-2000 tidak lebih karena dampak dari pengalihan distribusi ekspor-impor Ethiopia kepada Djibouti. Ini akhirnya berdampak pada penurunan drastis perekonomian Eritrea karena tidak ada lagi pemasukan dari Ethiopia berupa distribusi ekspor-impor.

Eritrea menganggap Ras Doumeira adalah kepemilikan mereka berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Italia, tetapi Djibouti

¹¹³ "Diplomatic Relation: Africa," Somali Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, diakses pada 9 Mei 2013, <http://www.mfa.somaligov.net/Diplomatic%20Relations.html>.

menganggap daerah ini sebagai milik bersama dan dikontrol bersama. Inilah yang pada akhirnya ‘memaksa’ Eritrea untuk melakukan serangan terhadap Djibouti untuk mengamankan daerah Ras Doumeira. Ini disesuaikan dengan kepentingannya akan posisi strategis Ras Doumeira membantu perekonomian Eritrea. Konstruksi Eritrea terhadap Djibouti yaitu melihat Djibouti sebagai sesuatu hal yang mengancam negaranya. Eritrea mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu.

. Konstruksi identitas yang telah dipaparkan di atas, memiliki keterikatan dengan warisan sejarah dan kolonialisme yang dialami oleh kedua negara.

Seperti yang telah dipaparkan di bagian 2.1.2, Djibouti adalah negara jajahannya Perancis. Pengaruh kolonialisme Perancis banyak yang tertinggal di Djibouti, salah satunya adalah penggunaan bahasa. Perancis memang dekat dengan negara jajahannya dibandingkan dengan negara Eropa lainnya yang pernah menjajah negara-negara di benua Afrika, seperti Inggris dan Italia misalnya. Perancis tidak hanya menjajah lalu meninggalkan daerah jajahannya itu tetapi berusaha untuk membantu negara itu supaya bisa bangkit dan menata negaranya dengan baik. Dalam hal ini, Perancis membantu Djibouti untuk menata kondisi domestik negaranya khususnya kondisi ekonomi. Djibouti diuntungkan dengan hal ini. Itulah mengapa akhirnya perhatian utama negara Djibouti memang adalah pembenahan kondisi domestik negaranya dan berusaha menjalin relasi yang baik dengan negara-negara tetangganya.

Adanya kolonialisme dari Perancis membuat Djibouti juga “terpengaruh” dengan patron-Barat yang dimiliki oleh Perancis. Djibouti cukup terbuka dengan negara-negara Barat. Ini dibuktikan dengan Perancis dan Amerika Serikat yang menjalin relasi cukup dekat dengan Djibouti. Belum lagi, Djibouti mengizinkan Perancis dan Amerika Serikat untuk membangun basis militernya di Djibouti demi perbaikan kapabilitas militer Djibouti sendiri.

Ini berbeda halnya dengan Eritrea. Seperti dipaparkan dalam bab 2.1.3 Eritrea merdeka dari jajahannya Ethiopia. Sebelum merdeka dari Ethiopia, Eritrea diperebutkan antara Italia, Inggris dan Ethiopia. Tidak seperti Perancis yang

cukup dekat dengan negara jajahannya, Italia dan Inggris tidak demikian. Kepentingan yang ingin dilakukan oleh Italia dan Inggris adalah menjajah saja, tidak seperti Perancis yang mau membantu negara-negara bekas jajahannya setelah merdeka. Adanya kondisi seperti ini membuat Eritrea harus bangkit dan menata kondisi domestik negaranya dengan mandiri. Belum lagi setelah tidak lama merdeka, Eritrea kembali berperang dengan Yemen terkait pulau Hanish di daerah Laut Merah¹¹⁴ dan konflik dengan Djibouti terkait Ras Doumeira tahun 1996.

Adanya kondisi domestik yang belum tertata rapi, ditunjang dengan adanya arogansi kepentingan akan daerah-daerah strategis membuat Eritrea melihat negara-negara tetangganya adalah musuh atau lawan bagi mereka. Kolonialisasi yang dilakukan oleh Italia, Inggris dan Ethiopia membentuk identitas Eritrea sebagai daerah dengan natur berperang karena pengaruh kolonialisme itu sendiri. Meskipun Italia dan Inggris adalah negara-negara yang juga patron-Barat tetapi karena tidak memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara jajahannya seperti yang dilakukan Perancis, inilah yang membuat Eritrea tidak berpihak kepada patron-Barat tetapi justru tidak menyukai negara-negara dengan patron-Barat. Kolonialisasi dari tiga negara ini mempengaruhi proses pembentukan identitas Eritrea sehingga mereka menjadi negara yang tertutup dan mewujudkan kepentingannya bukan dengan cara damai seperti perjanjian atau kerjasama, melainkan dengan berperang.

Sehingga dalam konflik ini, identitas yang dimiliki oleh Djibouti dan Eritrea tidak hanya dari dalam domestik negara mereka saja ataupun mengalami pergeseran tetapi ini juga dipengaruhi oleh kolonialisasi yang dilakukan oleh negara-negara penjajah terdahulu. Adanya konflik di antara kedua negara mempertegas masing-masing identitas yang telah kedua negara ciptakan sebelumnya. Djibouti yang terbuka melihat potensi negara-negara sekitarnya sebagai rekan atau *partner* untuk berelasi dengan Djibouti dalam hal seperti ekonomi ataupun militer. Adanya konflik dengan Eritrea-lah yang kemudian membuat konstruksi ini rusak dan akhirnya Djibouti melihat Eritrea bukan lagi

¹¹⁴ "Hanish Island Conflict," diakses pada 3 Juli 2013, <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/hanish.htm>.

sebagai calon rekan atau *partner*, melainkan menjadi ancaman. Di sisi lain, Eritrea yang cenderung menutup diri melihat negara-negara di sekitarnya sebagai ancaman dan lawan untuk mereka mendapatkan kepentingannya berupa daerah-daerah strategis. Sehingga kedua identitas yang berseberangan inilah yang dapat mendorong terjadinya konflik.

Lalu kemudian, bagaimana potensi terbentuknya *common identity* atau identitas kolektif?

Djibouti dan Eritrea tidak memiliki kontak *person-to-person* satu sama lain. Dalam bagian 3.2 telah dijelaskan bahwa Djibouti dan Eritrea tidak terikat dalam kerjasama tertentu dan tidak mengadakan pertemuan-pertemuan tertentu. Kepentingan mereka mungkin sama yaitu berkaitan dengan Ras Doumeira, tetapi yang menjadi fokusnya jelas berbeda. Djibouti berusaha untuk mengamankan batas wilayahnya dan berusaha Ras Doumeira tetap menjadi wilayah *shared control* antara Djibouti dan Eritrea. Di sisi lain, Eritrea ingin Ras Doumeira mutlak menjadi bagian dari wilayah mereka seluruhnya. Karena tidak adanya kontak *person-to-person* jelas tidak dapat menciptakan pemahaman bersama. Masing-masing negara teguh dengan fokus kepentingannya masing-masing.

Identitas akan berkaitan dengan kepentingan, karena kepentingan adalah hal yang diinginkan oleh aktor atau suatu identitas. Tanpa adanya kepentingan, maka identitas tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Tanpa adanya identitas, kepentingan tidak dapat tercapai karena tidak ada yang mengarahkan. Djibouti mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai negara yang tengah berbenah khususnya dalam ekonomi. Salah satu usahanya adalah memaksimalkan pelabuhan-pelabuhan miliknya, termasuk yang ada di daerah Ras Doumeira yang masuk dalam wilayah Djibouti. Selain itu, Djibouti juga berusaha menjalin kerjasama misalnya dengan Ethiopia sehingga sampai saat ini Ethiopia masih melakukan kegiatan ekspor-impor melewati pelabuhan-pelabuhan laut Djibouti. Di sisi lain, Eritrea mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai negara yang juga tengah berbenah dalam ekonomi. Bedanya, mereka menjadikan Ras Doumeira sebagai target untuk direbut agar posisi strategisnya dapat mendukung

perekonomian yang coba dicapai Eritrea. Dan berperang dengan Djibouti menjadi solusinya, bukan kerjasama yang biasanya dilakukan oleh negara-negara lainnya.

Ketiadaan kontak *person-to-person* antara Djibouti dengan Eritrea juga menjadi alasan mengapa akhirnya Djibouti merasa terancam ketika Eritrea menyebar pasukannya di daerah Ras Doumeira. Jika kedua negara memiliki pemahaman yang sama, kepentingan yang sama dan terikat dalam kontak *person-to-person* secara kontinu, jelas Djibouti dapat mengenali karakteristik negara Eritrea dan dapat mengantisipasi setiap tindakan Eritrea. Tetapi karena tidak memiliki hal-hal tersebut, Djibouti susah untuk menebak karakter Eritrea sehingga setiap hal yang dilakukan Eritrea cenderung mencurigakan. Begitu juga dengan Eritrea. Karena ketiadaan kontak *person-to-person* dan tidak adanya perundingan satu sama lain, tentu Eritrea tidak mengetahui apa yang sedang menjadi kepentingan utama Djibouti. Jika kedua negara memiliki hubungan bilateral yang dekat, maka Eritrea pasti tahu bahwa *stand point* Djibouti terhadap Ras Doumeira adalah *shared control*. Jika kedua negara memiliki pemahaman yang sama soal Ras Doumeira yang harusnya *shared control*, konflik tidak perlu terjadi.

Karena tidak adanya kontak *person-to-person*, tentu tidak dapat menghasilkan pemahaman yang sama. Karena tidak adanya pemahaman yang sama, jelas sulit untuk mengadakan perundingan atau pertemuan-pertemuan. Ini berdampak pada ketiadaan potensi untuk membentuk identitas kolektif yang berlandaskan *shared characteristics* dan *we-feeling*. Kedua negara masih berdiri pada *stand-point*-nya masing-masing dan sulit untuk keduanya membentuk satu identitas kolektif, khususnya Eritrea. Kedua negara cenderung bertahan dengan kepentingannya masing-masing khususnya menyoal Ras Doumeira. Djibouti bertahan dengan status Ras Doumeira yang harus tetap dibagi dua, sementara Eritrea lebih menginginkan daerah itu masuk dalam wilayah negaranya.

BAB 4

KESIMPULAN

Dari pemaparan-pemaparan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa tiap-tiap konsep yang mewakili paradigma-paradigma dalam ilmu HI mampu menghasilkan sudut pandang yang berbeda-beda dalam melihat akar konflik dari konflik perbatasan Djibouti-Eritrea di daerah Ras Doumeira.

NEOREALISME (Sistem Anarki dan <i>Balance of Power</i>)	NEOLIBERALISME (Interdependensi dan Nilai Demokrasi)	KONSTRUKTIVISME (Identitas)
<i>Internal Balancing</i> yang dilakukan Djibouti tidak cukup kuat menandingi kekuatan militer Eritrea	Ketiadaan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara yang akhirnya berdampak lemahnya interdependensi di antara kedua negara	Adanya pergeseran identifikasi identitas yang dilakukan oleh Djibouti terhadap Eritrea, yang awalnya menganggap potensi <i>partner</i> menjadi ancaman
<i>External Balancing</i> yang tidak dapat dilakukan karena tidak adanya aliansi yang diciptakan	Lemahnya IGAD sebagai institusi regional yang tidak dapat menyediakan mekanisme pencegahan konflik bagi konflik perbatasan kedua negara	Pengaruh kolonialisasi terhadap konstruksi identitas negara Djibouti dan Eritrea
<i>Security dilemma</i> yang terjadi karena lemahnya kemampuan militer Djibouti dan dari kelemahan tersebut timbul potensi bagi Eritrea untuk menyerang Djibouti	Ketiadaan nilai demokrasi dan pemerintahan yang demokratis mendorong pemimpin kedua negara dapat mengambil keputusan untuk berperang secara sepihak	Konstruksi identitas negatif yang menyebabkan ketiadaan potensi terciptanya identitas kolektif

Dapat disimpulkan kemudian, dari sisi neorealis (yang diwakili konsep sistem anarki dan *balance of power*), *internal balancing* yang dilakukan oleh Djibouti tidak cukup kuat untuk menandingi kekuatan militer Eritrea. *External balancing* juga tidak dapat dilakukan karena Djibouti tidak menciptakan aliansi dengan negara lainnya seperti Somalia dan Ethiopia untuk menandingi kekuatan militer Eritrea. Dari tidak sempurnanya mekanisme *balance of power* ini-lah yang mengakibatkan terjadinya *security dilemma* dikarenakan kemampuan militer Eritrea yang lebih besar dibandingkan Djibouti mampu membuat Djibouti merasa terancam dan dibalik lemahnya kemampuan militer Djibouti membuat potensi Djibouti untuk diserang Eritrea semakin besar.

Dari sisi neoliberalis (yang diwakili konsep interdependensi dan nilai demokrasi), ketiadaan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara berdampak pada lemahnya pola interdependensi yang tercipta di antara kedua negara. Ini berdampak pada pola interaksi kedua negara satu sama lainnya. Keberadaan institusi (IGAD) masih lemah untuk mencegah konflik di antara kedua negara terjadi dikarenakan IGAD belum mampu menyediakan satu mekanisme pencegahan konflik perbatasan seperti IGAD menyediakan mekanisme CEWARN untuk mengatasi konflik pastoral seperti di Uganda dan Kenya. Kedua negara yang bukan negara demokratis juga memicu terjadinya konflik. Kedua negara yang dipimpin oleh pemimpin negara dari partai tunggal menjadi faktor lainnya terjadi konflik karena keputusan untuk berperang atau tidak berada mutlak di tangan pemimpin negara, bukan di tangan warga negara dan didiskusikan dengan parlemen.

Dari sisi konstruktivisme (yang diwakili konsep identitas), dapat dilihat bahwa kedua negara telah mengkonstruksikan diri mereka dan negara lain satu sama lain. Namun pergeseran identifikasi identitas Eritrea yang dilakukan oleh Djibouti menyebabkan konflik karena dari yang awalnya Djibouti menganggap Eritrea sebagai calon *partner* untuk kerjasama, akan tetapi berubah menjadi ancaman karena tindakan-tindakan yang dilakukan Eritrea. Adanya pengaruh kolonialisasi Perancis menyebabkan identitas Djibouti adalah negara yang cukup terbuka dan pro patron-Barat dan terbuka untuk kerjasama ekonomi karena di saat

bersamaan Djibouti butuh negara-negara tetangganya untuk memperbaiki ekonomi negaranya. Tapi tidak demikian dengan Eritrea. Eritrea yang dijajah oleh tiga negara, yaitu Italia, Inggris dan Ethiopia mempengaruhi proses pembentukan identitas Eritrea sehingga mereka menjadi negara yang “terbiasa” dengan perang dan mewujudkan kepentingannya bukan dengan cara damai seperti perjanjian atau kerjasama, melainkan dengan berperang. Konstruksi identitas negatif yang telah terbentuk didorong pula oleh ketiadaan kontak *person-to-person* yang berpengaruh terhadap ketiadaan potensi terbentuknya identitas kolektif.

Ketiga paradigma ini menghasilkan satu benang merah bahwa akar konflik dari konflik perbatasan ini adalah karena ketidaksepahaman masing-masing negara akan status wilayah Ras Doumeira. Eritrea berfokus untuk menaklukkan Ras Doumeira dan menginginkan Ras Doumeira menjadi bagian dari wilayahnya, sesuai dengan perjanjian tahun 1935 antara Italia dan Perancis yang menjadi justifikasi mereka karena Italia meratifikasi perjanjian tersebut. Sebaliknya, Djibouti menginginkan Ras Doumeira tetap *shared control*, karena Djibouti masih berpegang dengan perjanjian 1900-1901 antara Perancis dan Italia bahwa Ras Doumeira *shared control* dan tidak dimiliki oleh salah satu negara. Mereka menolak perjanjian tahun 1935 karena Perancis tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Selama status wilayah Ras Doumeira belum diperjelas maka ke depannya bukan tidak mungkin konflik yang sama akan terulang kembali karena kedua negara akan terus bertahan dengan *stand point*-nya masing-masing.

DAFTAR REFERENSI

“Briefing Note on the Djibouti-Eritrea Border Stand-Off.” Diakses pada 24 April 2013. <http://www.africa-union.org/root/au/organs/Microsoft%20Word%20-125%20Briefing%20note%20on%20Djibouti%20Eritrea%20Border.pdf>.

“Hanish Island Conflict,” Diakses pada 3 Juli 2013.
<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/hanish.htm>.

“Inter Governmental Authority in Development (IGAD) – Peace and Security Architecture.” Diakses pada 5 Juni 2013.
[http://aros.trustafrica.org/index.php/Inter-Governmental_Authority_on_Development_\(IGAD\)_%E2%80%93_Peace_and_Security_Architecture](http://aros.trustafrica.org/index.php/Inter-Governmental_Authority_on_Development_(IGAD)_%E2%80%93_Peace_and_Security_Architecture).

“List of Recent Conflicts in Horn of Africa.” Diakses pada 11 Februari 2013.
<http://www.hopehorn.org/monthly-digest/october-2011/134-recent-conflicts-in-the-horn-of-africa>.

African Online News. “Djibouti-Eritrea Border Dispute Towards Solution.” Diakses pada 23 Februari 2013. <http://www.afrol.com/articles/36288>.

BBC News. “Djibouti Profile.” Diakses pada 24 Oktober 2012.
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13231761>.

BBC News. “Eritrea Profile.” Diakses pada 24 Oktober 2012.
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13349078>.

BBC News. “France Backing Djibouti in ‘War’.” Diakses pada 24 Oktober 2012.
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7453063.stm>.

Bereketeab, Redie. “Inter-state Conflicts in the Horn of Africa.” Diakses pada 20 Februari 2013. <http://afrikansarvi.fi/issue2/25-artikkeli/62-inter-state-conflicts-in-the-horn-of-africa>.

Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BTI). *Eritrea Country Report 2012*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2012.

Bureau of African Affairs. “U.S. Relations with Djibouti.” Diakses pada 21 Februari 2013. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5482.htm>.

Central Intelligence Agency. "The World Factbook: Djibouti." Diakses pada 24 Oktober 2012. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html>.

Central Intelligence Agency. "The World Factbook: Eritrea." Diakses pada 24 Oktober 2012. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html>.

Democracy Coalition Report. "Djibouti." Diakses pada 15 April 2013. http://demcoalition.org/pdf/9_Djibouti.pdf.

Gebrewold, Belachew. "Democracy and Democratization in Africa." Dalam *Peace & Conflict in Africa*, diedit oleh David J. Francis, 148-170. London: Zed Books, 2008.

Haberson, John W. "The International Politics of Identity in the Horn of Africa." Dalam *Africa in World Politics*, diedit oleh John W. Harbeson dan Donald Rothchild, 119-141. United States of America: Westview Press, 1991.

Holsti, K.J. *International Politics: A Framework for Analysis Sixth Edition*. New Jersey: Prentice Hall, 1992.

IGAD. "About the Peace and Security Division – Conflict Prevention, Management and Resolution." Diakses pada 2 Juli 2013. http://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=148&limitstart=1.

IGAD. "History." Diakses pada 7 Juni 2013. <http://igad.org>.

International Business Publications. *Djibouti: Foreign Policy and Government Guide Volume 1 Strategic Information and Developments*. Washington, D.C.: International Business Publications, 2010.

Jervis, Robert. *Perception and Misperception in International Politics*. New Jersey: Princeton University Press, 1976.

Kadamy, Mohammed. "Djibouti: Between War and Peace." *Review of African Political Economy* 23 (1996): 511-521.

Keohane, Robert O., dan Joseph S. Nye. *Power and Interdependence 3rd Edition*. New York: Longman, 2001.

Marzui, Ali A. "Africa and Other Civilizations: Conquest and Counterconquest." Dalam *Africa in World Politics*, diedit oleh John W. Harbeson dan Donald Rothchild, 69-90. United States of America: Westview Press, 1991.

- Menas Borders. "Border Focus: Eritrea and Djibouti," Diakses pada 23 Februari 2013. http://www.menasborders.com/menasborders/border_focus/Eritrea-Djibouti.aspx.
- Mesfin, Berouk. "The Eritrea-Djibouti Border Dispute." *Institute for Security Studies Situation Report* (2008): 1-12.
- Moya, Paula M.L. "What's Identity Got to do With? Mobilizing Identities in the Multicultural Classroom." Dalam *Identity Politics Reconsidered*, diedit oleh Linda Martin Alcoff, Satya P. Mohanty, Michael Hemes-Garcia, dan Paula M.L. Moya, 96-114. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Nye, Joseph S. *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History Second Edition*. New York: Longman, 1997.
- Owen, John M. "How Liberalism Produces Democratic Peace." *International Security* 19 (1994): 87-125.
- Permanent Mission of Eritrea to the UN. *Peace and Security in the Horn of Africa: Eritrea's View*. New York: The Permanent Mission of Eritrea to the UN, 2012.
- Shehim, Kassim, dan James Searing. "Djibouti and the Question of Afar Nationalism." *African Affairs* 79 (1980): 209-226.
- Social Science Research Council (SSRC). "Crisis in the Horn of Africa." Diakses pada 24 Oktober 2012. <http://hornofafrica.ssrc.org>.
- Somali Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. "Diplomatic Relation: Africa." Diakses pada 9 Mei 2013. <http://www.mfa.somaligov.net/Diplomatic%20Relations.html>.
- Tadesse, Medhane. "The Djibouti-Eritrea Conflict." *Briefing on Human Security Issues in Horn Africa* (2008): 1-14.
- Tekle, Amare. "International Relations in the Horn of Africa (1991-1996)." *Review of African Political Economy* 23 (1996): 499-509.
- Tesfagiorgis, Mussie. *Africa in Focus: Eritrea*. California: ABC-CLIO LLC, 2011.
- Tseggai, Araia. "The Case for Eritrean National Independence." *The Black Scholar* 7 (1976): 20-27
- U.S. Department of State. *International Boundary Study, 154*. Washington, DC: Bureau of Intelligence and Research, 1976.

UN News Centre. "Djibouti-Eritrea Border Tension Could Escalate, Warns UN Team," diakses pada 9 Desember 2012.
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28109&Cr=djibouti&Cr1=eritrea>.

United Nations Security Council. *Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Djibouti-Eritrea Crisis*. New York: United Nations Security Council, 2008.

Wallensteen, Peter. *Understanding Conflict Resolution*. London: SAGE Publications, 2002.

Waltz, Kenneth N. "The Origins of War in Neorealist Theory." *Journal of Interdisciplinary History* 18 (1988): 615-628.

Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. Phillipines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1979.

Wanyande, Peter. "Democracy and the One-Party State: The African Experience." Dalam *Democratic Theory Practice in Africa*, diedit oleh Walter O. Oyugi, Atieno Odhiambo, Michael Chege, dan Afrifa K. Gitonga, 71-83. New Hampshire: Heinemann Educational Books Inc., 1988.

Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Zitelmann, Thomas. "Introduction to the Special Issue 'Horn of Africa'." *Africa Spectrum* 43 (2008): 5-18.

**PROFILE:
INTERGOVERNMENTAL AUTHORITY ON DEVELOPMENT
(IGAD)**



1. CONTACT DETAILS:

: BP 2653 : +253-354 050 / 352 880
Djibouti Fax: +253-356 994 / 284
Djibouti
www.igadregion.org

2. MEMBER STATES:

Djibouti	Somalia
Eritrea	Sudan
Ethiopia	Uganda
Kenya	

3. HISTORY AND BACKGROUND:

The Intergovernmental Authority on Drought and Development (IGADD) was formed in 1986 with a very narrow mandate around the issues of drought and desertification. Since then, and especially in the 1990s, IGADD became the accepted vehicle for regional security and political dialogue.

The founding members of IGADD decided in the mid-1990s to revitalise the organisation into a fully-fledged regional political, economic, development, trade and security entity similar to SADC and ECOWAS. It was envisaged that the new IGADD would form the northern sector of COMESA with SADC representing the southern sector.

(lanjutan)

One of the principal motivations for the revitalisation of IGADD was the existence of many organisational and structural problems that made the implementation of its goals and principles ineffective. The IGADD Heads of State and Government met on 18 April 1995 at an Extraordinary Summit in Addis Ababa and resolved to revitalise the Authority and expand its areas of regional co-operation. On 21 March 1996, the Heads of State and Government at the Second Extraordinary Summit in Nairobi approved and adopted an Agreement Establishing the Intergovernmental Authority on Development (IGAD). In April 1996 on the recommendation of the Summit of the Heads of State and Government, the IGAD Council of Ministers identified three priority areas of co-operation:

- Conflict Prevention, Management and Resolution and Humanitarian Affairs;
- Infrastructure Development (Transport and Communications);
- Food Security and Environment Protection.

IGAD has been designated one of the pillars of the African Economic Community in terms of the AEC Treaty. IGAD signed the Protocol on Relations between the AEC and Regional Economic Communities on 25 February 1998. IGAD has collaborated with COMESA and the East African Community to divide projects among themselves so that there is no duplication and to avoid approaching the same donors with the same projects.

4. OBJECTIVES:

IGAD aims to expand the areas of regional co-operation, increase the members' dependency on one another and promote policies of peace and stability in the region in order to attain food security, sustainable environment management and sustainable development.

The IGAD strategy is to attain sustainable economic development for its member countries. Regional economic co-operation and integration are given special impetus and high priority to promote long-term collective self-sustaining and integrated socio-economic development. The leading principles of the IGAD strategy are stipulated in the agreement establishing IGAD, but are also mindful of the UN Charter and AU Constitutive Act.

IGAD's aims and objectives are to:

- Promote joint development strategies and gradually harmonise macro-economic policies and programmes in the social, technological and scientific fields;
- Harmonise policies with regard to trade, customs, transport, communications, agriculture and natural resources, and promote free movement of goods, services, and people within the sub-region;

(lanjutan)

- Create an enabling environment for foreign, cross-border and domestic trade and investment;
- Initiate and promote programmes and projects to achieve regional food security and sustainable development of natural resources and environmental protection, and encourage and assist efforts of member states to collectively combat drought and other natural and man-made disasters and their consequences;
- Develop a co-ordinated and complementary infrastructure in the areas of transport, telecommunications and energy in the sub-region;
- Promote peace and stability in the sub-region and create mechanisms within the sub-region for the prevention, management and resolution of interstate and intrastate conflicts through dialogue;
- Mobilise resources for the implementation of emergency, short-term, medium-term and long-term programmes within the framework of sub-regional co-operation;
- Facilitate, promote and strengthen co-operation in research development and application in science and technology.

5. STRUCTURE:

5.1 Assembly of Heads of State and Government

The Assembly of Heads of State and Government, which meets at least once a year, is the supreme organ of the Authority.

5.2 Council of Ministers

The Council of Ministers is composed of the Ministers of Foreign Affairs and one other focal minister designated by each member state meets at least twice a year.

5.3 Committee of Ambassadors

The Committee of Ambassadors, comprising the Ambassadors or Plenipotentiaries of IGAD member states accredited to the country of IGAD's headquarters, advises and guides the Executive Secretary on the promotion of his efforts in realizing the work plan approved by the Council of Ministers and on the interpretation of policies and guidelines which may require further elaboration.

5.4 Secretariat

The Secretariat is the executive arm of the Authority and is headed by an Executive Secretary appointed by the Assembly of Heads of State and Government for a term of four years renewable once. The Secretariat, in addition to the Office of the Executive Secretary, has three divisions, namely Economic Co-operation, Agriculture and Environment and Political and Humanitarian Affairs.

The Secretariat is responsible for the implementation of projects in food security and environmental protection, infrastructure development, transport and communications, conflict prevention, management and resolution and humanitarian affairs.

6. PEACE AND SECURITY-RELATED ACTIVITIES:

Much of IGAD's attention is directed at peace efforts in Somalia and the Sudan. Parallel to such initiatives, the main focus is on capacity-building and awareness creation, and on the early warning of conflicts. Other issues of importance include food security and developing appropriate modalities for regional peacekeeping. Terrorism is also high on the agenda of the IGAD member states, and the IGAD Heads of State and Government meeting at the 9th Summit in Khartoum in January 2002 passed a Resolution on Regional Cooperation to Combat Terrorism.

6.1 Sudan:

During 1994, IGADD started to undertake conflict management tasks when the Authority hosted and facilitated negotiating sessions between the Sudanese government in Khartoum and the rebel forces from southern Sudan in an attempt to end the civil war. The Sudan peace process, chaired by Kenyan President Moi, brought IGADD into the limelight and revitalised the organisation. This led to the change in name in April 1996 and the creation, within the new Intergovernmental Authority on Development (IGAD), of a department for conflict management. Article 18 of the agreement establishing IGAD states that member states shall act collectively to preserve peace, security and stability which are essential prerequisites for economic development.

The original Ministerial Subcommittee has since been replaced by a permanent secretariat on the Sudan Peace Process, based in Nairobi, to mount a sustained effort to resolve the conflict. President Moi appointed Lieutenant-General Lazarus Sumbeiywo as special envoy to Sudan. The first round of talks held under this arrangement began in February, 2000. In July 2002, talks in Machakos, Kenya resulted in the Sudanese Government and the Sudanese People's Liberation Army (SPLA) signing the Machakos Protocol. The protocol provides for a six-month "pre-interim period" during which hostilities should cease and a formal ceasefire should be established as soon as possible. During a subsequent six year "interim period", the ceasefire should be maintained and Sharia law should not be applied in the south during that period. After six years, a referendum on southern self-determination should be held.

A second round of talks were held in Machakos during August-September 2002, which attempted to negotiate a ceasefire. However, the talks broke down on 3 September when the Khartoum government recalled its delegation for "consultation" over the SPLA capture of the strategic town of Torit. Talks resumed in Machakos in October 2002. On 15 October, a Memorandum of Understanding was signed which agreed to a cessation of hostilities for the duration of talks. On 26 October the Khartoum Government and the SPLM/A agreed to grant unimpeded access to civilians for humanitarian agencies.

6.2 Somalia:

With regard to Somalia, both IGAD and the OAU mandated Prime Minister Melese Zenawi of Ethiopia to co-ordinate the peace dialogue and mediation process. IGAD member states and partners held a two-day conference in Rome on 19-20 January 1998. The meeting reached consensus to establish a committee to assist the peace and reconciliation effort of Ethiopia regarding the crisis in Somalia. The IGAD member states also confirmed support for the peace process plan on the Sudanese crisis. Representatives from Italy, USA, Canada, France, Britain and the United Nations also attended the meeting.

The 6th IGAD Summit and Ministerial Session took place in Djibouti from 14-16 March 1998 and was dominated by the issue of Somalia. A declaration expressing concern at

(lanjutan)

the proliferation of initiatives with regard to Somalia was adopted and all concerned partners were requested to channel all assistance provided to Somalia through the IGAD mechanism. In October 1998, Ethiopia hosted a one-day international conference on Somalia under the auspices of IGAD. The conference decided to establish a 15-member committee to spearhead a new peace and reconciliation effort in Somalia. The committee will be composed of delegates from the seven IGAD member states, the OAU and the Arab League.

Kenya's special envoy on Somalia, Mr Mwangale is currently chairing the Somalia Frontline States Technical Committee. The Committee convened a Somalia National Reconciliation Conference, which commenced on 15 October 2002 at Eldoret, Kenya. On 27 October, almost 800 delegates witnessed the signature of a Declaration on Cessation of Hostilities, Structures and Principles of the Somalia National Reconciliation Process. It agreed, inter alia, to the cessation of all hostilities from 27 October and to create federal governance structures for Somalia.

6.3 Early Warning Unit:

The IGAD Secretariat has developed a number of projects to help build the capacity of member states in the area of conflict prevention, management and resolution. As a first step IGAD, with funding from the European Union (EU), is building conflict prevention and mediation capacities in the region. The IGAD Heads of State and Government meeting at the 9th Summit in Khartoum in January 2002 signed a Protocol on the

Establishment of a Conflict Early Warning and Response Mechanism (CEWARN). CEWARN was launched in the first week of September 2002 in Addis Ababa. The Unit's staff component of three researchers are currently undergoing training in early warning data analysis. It is envisaged that their Unit will work in cooperation with regional early warning units, or CEWARU's, based in each IGAD member state.

Lampiran 2: Report of the Chairperson of the Commission on the Situation at the Border Between the Republic of Djibouti and the State of Eritrea and Developments in Relations between the Two Countries

AFRICAN UNION

الاتحاد الأفريقي



UNION AFRICAINE

UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone +251115- 517700 Fax : +251115-517844

Website : www.africa-union.org

**PEACE AND SECURITY
COUNCIL 140th MEETING
29 June 2008
Sharm El Sheikh, EGYPT**

**PSC/HSG/4(CXL)
ORIGINAL: French**

**REPORT OF THE CHAIRPERSON OF THE COMMISSION
ON THE SITUATION AT THE BORDER BETWEEN THE
REPUBLIC OF DJIBOUTI AND THE STATE OF ERITREA
AND DEVELOPMENTS IN RELATIONS BETWEEN THE TWO
COUNTRIES**

**REPORT OF THE CHAIRPERSON OF THE COMMISSION ON THE SITUATION AT
THE BORDER BETWEEN THE REPUBLIC OF DJIBOUTI AND THE STATE OF
ERITREA AND DEVELOPMENTS IN RELATIONS
BETWEEN THE TWO COUNTRIES**

I. INTRODUCTION

1. This report is submitted in follow-up to the communiqué on the 136th meeting of Council held on 12 June 2008 during which Council agreed to meet at the right moment and at the appropriate level to consider the situation and take the relevant decisions. The report makes a review of the situation at the border between the Republic of Djibouti and the State of Eritrea and of relations between the two countries since mid-April 2008. The report also presents efforts made by the Commission to quell the tension between the two countries and settle the dispute between them. It concludes with a number of observations.

**II. MATTER BROUGHT BEFORE COUNCIL BY THE REPUBLIC OF DJIBOUTI
AND DISPATCH OF A FACT-FINDING MISSION TO DJIBOUTI**

2. On 24 April 2008, Djibouti's Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Mahmoud Ali Youssouf sent a letter to the Chairperson of Council for the month of April 2008 informing him that since 16 April 2008, Eritrea has been occupying part of Djibouti territory, in the Ras Doumeira area to the North of Obock town, on the border between the two countries. The Minister also stated that Eritrea was strengthening its military presence in certain areas along the common border between the two countries. The Minister further stated that despite the number of diplomatic efforts made to prevail on the Eritrean Government to be reasonable, the latter decided to disregard the steps so far taken. Accordingly, faced with what it terms "wanton aggression" requiring the intervention of national and international authorities, it requested Council to rapidly send a fact-finding mission to the field, to evaluate the situation. He recalled in passing, that in the past, and most specifically in 1994, Eritrea had made a "military incursion in the area and published a map where the borderline between the two countries had been modified".

3. The 121st meeting of Council held the same day made a review of the situation. In follow-up to the meeting, and at the request of Council, the Commission, on 1 May 2008, formally seized the authorities of Djibouti and Eritrea to inform them that Council intended to meet the following day to consider the situation and, where necessary, take any decision deemed appropriate. In this respect, and in a bid to facilitate the deliberations of Council, the Commission requested the two countries to submit to it all information at their disposal, including any contacts that could have been made to solve the problem amicably. Djibouti replied the same day, forwarding to the Commission a document on the chronology of events and a copy of the letter sent on 18 April 2008 by the Djibouti Minister of Foreign Affairs to his Eritrean counterpart relating to the presence of Eritrean military forces in Djibouti territory, requesting Eritrea to withdraw its forces from Ras Doumeira. Regarding precisely the chronology of events, the outlines of which unfolded as follows:

- 4 February 2008: administrative authorities in the Obock region notice civil engineering works on the Eritrean side of the border. The Eritreans
- Pandangan paradigma ..., Hanna Theresia, FISIP UI, 2013

inform their Djiboutian counterparts that the works were part of the construction of the road that would link Assab to Obock via Raheyta;

- 10 February: Eritrean construction machines cross the border and start works in Ras Doumeira. Faced with this situation, and over the period from 15 February to 30 March 2008, the administrative authorities of Obock region try in vain to contact their Eritrean counterparts in an effort to understand the purpose of the works;
- 7 April: the prefect of Obock region and a Djiboutian military officer who wanted to go to Ras Doumeira to investigate the situation are turned back by the Eritrean army;
- 18 April: the Government of Djibouti decides to embark on diplomatic action at the highest level, including a written message sent to the Government of Eritrea, a telephone conversation between the two Heads of State on Sunday 20 April 2008 and a meeting between the two Foreign Ministers on 21 April in Djibouti;
- 22 April: the Head of State of Djibouti goes to the field and notices notably that Eritrean forces had completely occupied Ras Doumeira and erected camps and fortifications, while fast patrol boats armed with barrels and patrol a vessel had docked at the creek adjacent to Ras Doumeira;
- 23 April: Eritrean authorities refuse receiving the Djiboutian Foreign Minister who was bearing a written message from the President of Djibouti to his Eritrean counterpart. Diplomatic negotiations were conducted in Asmara until 28 April, without any concrete result;
- 24 April: a meeting between two senior officers of the two countries is held in Ras Doumeira to discuss their positions in Ras Doumeira. Following the meeting, the Government of Djibouti decided to stay the appeal it had lodged before Council in order to allow time for bilateral dialogue. Unfortunately it was the first and last meeting of this nature, since the Eritrean officer did not show any desire to continue the contact.

4. As expected, Council held its 125th meeting on 2 May 2008. At the meeting, Council noted that the Commission had formally written to the two countries on 1 May 2008, to obtain as much information as possible on the situation prevailing at their common border and on the measures they had taken to resolve the situation amicably. It urged the two countries to show the greatest restraint and to use dialogue to settle any dispute between them, based on the principles laid down in the Constitutive Act of the African Union and other relevant AU instruments, including respect for borders existing at the time they gained independence and the promotion of good neighbourliness. Council encouraged the Commission to remain in close contact with both countries and to monitor developments in the situation so that any action deemed appropriate can be taken. This would include sending a mission, in due time, to evaluate the situation in the field and hold consultations with the competent authorities of both countries. The Commission formally forwarded copies of the Communiqué to the authorities of Djibouti and Eritrea. It also availed itself of

that opportunity to inform the Eritrean Ministry of Foreign Affairs that it was still awaiting the information requested on 1 May 2008, which would be transmitted to Council.

5. During the extraordinary session of the Executive Council held in Arusha on 6 and 7 May 2008, the Commissioner for Peace and Security met with the Djibouti Foreign Minister with whom he held consultations on relations between Djibouti and Eritrea. Unfortunately, he was not able, as he had hoped, to meet the representative of Eritrea since that country did not attend the Executive Council meeting. For my part, I had a telephone conversation with President Omar Guelleh of Djibouti, and made contacts with other members of the international community on the situation in order to harmonize efforts towards finding a peaceful and early solution to the conflict.

6. On 12 May 2008, the Permanent Mission of the State of Eritrea to the United Nations in New York issued a statement in which it indicated that the "Government of Eritrea is perplexed by (the) unfounded accusation (made by Djibouti) about a purported border problem with Eritrea". The Statement went on to add that "...while it may require time and further information to probe and fully understand the motivations behind this groundless accusation, it nonetheless bears all the hallmarks of a deliberate desire to unleash a new crisis in the region. In the event, the Government of Eritrea is not prepared to engage in a fruitless public acrimony at this stage". The statement was circulated by the Commission to Council members for information

7. On 23 May 2008, the Embassy of Djibouti in Addis Ababa forwarded a « Note on the crisis at the border between Djibouti and Eritrea » to the Commission. In the Note, the Government of Djibouti affirmed that Ras Doumeira and the Island of Doumeira were still under occupation and that the military engineering corps of the Eritrean forces was intensifying work, while there was increasing tension in the field where Djibouti and Eritrean military forces were facing each other. The tension was made worse by the heat experienced at this time of the year as well as the attitude of Eritrean soldiers who were asking Djiboutian soldiers to leave their positions on the hill since they were obstructing their works in Djibouti territory and all initiatives for dialogue made by Djibouti had failed. The Government of Djibouti stated that all its attempts for dialogue had failed. Eritrea had turned down these efforts, and refused to consider the gravity of its actions, denied the facts and pretended not to understand the threats to peace such a situation could pose and the consequences it could lead to. The Government of Djibouti indicated that it « will not bear responsibility for what will happen » if the crisis persists. In such conditions, Djibouti deemed it was necessary to urgently send a fact-finding mission to the AU. At the request of Djibouti, the brief was communicated to members of Council.

8. At its 130th meeting held on 26 May 2008, Council once more considered the situation, and underscored the urgent need for the envisaged mission to be sent to Djibouti and Eritrea. Thereafter, the Commission sent messages to the authorities of Djibouti and Eritrea informing them that it was taking the necessary steps to send the envisaged mission which will evaluate the situation and consult with the two countries. On 2 June 2008, Djibouti indicated its readiness to receive the AU mission at the dates proposed, namely 5 to 9 June 2008.

9. **Accordingly, a mission from the Commission visited Djibouti during the abovementioned period.** Led by Ambassador Pierre Yere, Senior Political Officer in the AU Office in Democratic Republic of Congo (DRC), the mission included civil and military officers from the Commission as well as specialists on border issues. During its stay in Djibouti the mission met with the Prime Minister, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation and the Ad Hoc Committee established by the Djiboutian authorities to manage the crisis, as well as with members of the diplomatic corps accredited to Djibouti.

10. During the discussion that the mission held on the spot, the authorities of Djibouti narrated the course of developments in relations between their country and Eritrea. They declared that they were all the more surprised by Eritrea's current attitude since a number of factors had recently enhanced the quality of relations existing between the two countries and their leaders. The authorities of Djibouti recalled all the attempts they had made for the crisis to be settled through dialogue, stressing that these attempts had initially been carried out without publicity but had to be brought to the knowledge of the international community for arbitration, after their rejection by the Eritrean side.

11. The authorities of Djibouti deplored the fact that the current tension was coming at a time when Djibouti is experiencing unprecedented economic growth and when foreign investors are intending to carry out major projects in the Doumeira area. According to them, Eritrea's attitude was upsetting all the efforts made by Djibouti to foster its development. Besides, Djibouti is incurring expenses estimated at 150,000 USD per day to sustain the deployment of its army at the border, which is really weighing on the State budget. The authorities of Djibouti further indicated that since the beginning of the current crisis, 13 Eritrean servicemen had deserted the army to take refuge in Djibouti. One of them has the rank of captain. In conclusion, they appealed to the international community to mediate in the dispute so that dialogue can prevail between the two parties and expressed their desire for the two armies to retreat to their positions previous to February 2008.

12. Regarding more specifically the border demarcation between the two countries, the Djiboutian authorities say that Djibouti has sovereignty over Doumeira and Doumeira Island. In this connection, they recalled many conventions concluded during the colonial era and other subsequent instruments and acts. The Djiboutian authorities affirmed that acting as it did, Eritrea is calling into question OAU/AU principles, notably respect of borders inherited from colonialism and non-use of force against the territorial integrity of another State.

13. In keeping with its mandate, the mission visited the spot where it noted a very tense situation, more so as the two armies are less than three (3) meters facing each other and at some places have already clashed. According to the Djiboutian Army Headquarters, apart from the military engineering units, Eritrea has deployed significant troops at the border (with a reserve at Assab), as well as weapons of different types and gauges. The Djiboutian military authorities also speak of the presence in the surrounding creeks of fast boats armed with barrels belonging to the Eritrean Marine. The mission was able to observe important civil engineering works and long trenches dug on the sides of the mountain.

III. INCIDENTS OF 10 JUNE 2008 AND SUBSEQUENT DEVELOPMENTS IN THE SITUATION

14. On 11 June 2008, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Djibouti sent a letter to the Chairperson of the Council for the month, informing him that in the morning of 10 June 2008 Eritrean armed forces had launched attacks using light and heavy weapons against the Djiboutian army without any justification, thus showing the bellicose nature of the Eritrean Government and its determination to destabilize the region. The Djiboutian Government noted “that this act of aggression takes place at time when discussions between the various Somali parties attending peace talks in Djibouti have culminated in the conclusion of a peace agreement”. In this context and “considering the gravity of the situation at the border”, the Djiboutian Government “calls for the convening of a meeting of the Council as a matter of urgency... to put an end to the aggression by the Eritrean forces”.

15. At its 136th meeting the following day, 12 June 2008, Council was briefed on the mission that was dispatched to Djibouti and examined the situation in the light of this new escalation. In the communiqué issued at the end of its deliberations, Council:

- welcomed the mission dispatched by the Commission to Djibouti, as a follow-up to the communiqué adopted at its 125th meeting and expressed appreciation to the Djiboutian authorities for the cooperation they extended to the mission;
- noted with regret that the Eritrean authorities had not yet accepted to receive the mission;
- expressed deep concern over the recent developments in the situation on the ground, particularly the incidents that occurred between the armed forces of the two countries on Tuesday 10 June 2008, and the risk of escalation that could result from these regrettable developments;
- strongly condemned the use of force and stressed the imperative need to respect the sovereignty, territorial integrity and the independence of Member States, in conformity with the AU constitutive Act council called for the immediate return to the situation prevailing at the common border between the two countries before the current tension, including the withdrawal from the border of all forces that have been positioned there since 4 February 2008;
- urged, once more, the two countries to show utmost restraint, resort to dialogue to resolve any bilateral dispute, and give their full cooperation to all efforts made to this end;
- reiterated its full support to the efforts being deployed by the commission for the mission dispatched to Djibouti to visit Eritrea as soon as possible, in accordance with its mandate, and urgently appealed to the Eritrean authorities to extend their full cooperation to this mission; and
- welcomed the initiatives taken by the chairperson of the commission to

help ease the current tension.

16. The Commission transmitted copy of the communiqué to the Djiboutian and Eritrean Governments. Similarly, the text of the communiqué was also transmitted to the United Nations. The same day, I had a telephone conversation with President Ismaël Omar Guelleh. In the same vein, the Commission formally approached the Eritrean authorities to inform them of my desire to have a telephone conversation with President Issayas Afewerki.

17. On its part, the United Nations Security Council, which met the same day, adopted a presidential statement in which it:

- expressed its strong concern about the serious incidents that occurred on 10 June along the frontier between Djibouti and Eritrea;
- condemned Eritrea's military action against Djibouti in Ras Doumeira and Doumeira Island;
- called upon the parties to commit to a ceasefire, and urged both parties, in particular Eritrea, to show maximum restraint and withdraw forces to the status-quo ante;
- urged both parties, in particular Eritrea, to cooperate and engage in diplomatic efforts to resolve the matter peacefully and in a manner consistent with international law;
- welcomed the efforts of the African Union, the Arab League and those States that have offered their assistance, and called upon the parties, in particular Eritrea, to engage fully in efforts to resolve the crisis; and
- encouraged the Secretary-General urgently to use his good offices and reach out to both parties, as appropriate and in coordination with regional efforts, to facilitate bilateral discussions to determine arrangements for decreasing the military presence along the border and to develop confidence-building measures to resolve the border situation.

18. The 12th Summit of Heads of State and Government of IGAD, held in Addis Ababa on 14 June 2008, also discussed the border situation between Djibouti and Eritrea. The summit:

- expressed its serious concern over the recent military attack by Eritrean troops along the border between Djibouti and Eritrea ;
- condemned the action by Eritrean troops and called upon the parties, in particular the Government of Eritrea, to heed the call for restraint by the United Nations, the African Union and the League of Arab States, and to receive fact finding missions to ascertain the situation on the ground;
- called upon both parties, in particular Eritrea, to accept mediation to resolve the crisis through peaceful means and return to the *status quo ante*;

- expressed its full support for the efforts being made by the UN and the AU in addressing the conflict; and
- decided to remain seized of the matter and expressed its commitment to assist the parties in reaching a peaceful settlement.

IV. OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

19. The situation at the border between Djibouti and Eritrea and the subsequent deterioration of relations between the two countries are a source of serious concern to the AU and the international community as a whole. This state of affairs is all the more alarming, taking place as it does at the time when the region is already in the throes of many conflicts and tensions that have given rise to the use of force.

20. The Djiboutian authorities continue to express their readiness for dialogue in order to find a solution to the crisis. In this regard, it is worth noting that they have received all the missions dispatched by third parties to help defuse the tension and resolve the crisis. Council should reiterate its appreciation to the Djiboutian authorities for the spirit of cooperation they have demonstrated and for their commitment to dialogue.

21. The Eritrean authorities, for their part, have so far not reacted to any of the letters addressed to them by the AU. At the time of finalizing this report, they still have not shown their willingness to receive the mission which visited Djibouti. Council should renew its appeal to Eritrea to allow the mission to visit Asmara as soon as possible and engage in a constructive dialogue with Djibouti with a view to a quick resolution of the crisis between the two countries. It should however be noted that contacts were made to possibly schedule an audience with the Eritrean Head of State on the occasion of the session of the Assembly of the Union in Sharm El Sheikh.

22. On the whole, Council should condemn in no uncertain terms the use of force and underscore the imperative need to respect the sovereignty, territorial integrity and independence of Member States in accordance with the Constitutive Act of the African Union. Council should renew its call for an immediate return of the situation prevailing at the common border between the two countries before the current tension, including the immediate withdrawal from the border of all the forces that were positioned there since 4 February 2008. Council should once again urge the two parties to show restraint, resort to dialogue to resolve any bilateral differences on the basis of the principles enshrined in the Constitutive Act of the African Union and other AU relevant instruments, including respect of borders existing at the time of independence and good neighbourliness.

23. The Council should be able to use its influence to encourage the Heads of State of the two countries to resort exclusively to peaceful means of resolving any bilateral disagreement. In this respect, an appropriate and flexible formula could be proposed to the two countries to facilitate the rapid resumption of normal relations of good neighbourliness and cooperation.



United Nations

Security Council

S/PRST/2008/20

Distr.: General
12 June 2008

Original: English

Statement by the President of the Security Council

At the 5908th meeting of the Security Council, held on 12 June 2008, in connection with the Council's consideration of the item entitled "Peace and security in Africa", the President of the Security Council made the following statement on behalf of the Council:

"The Security Council expresses its strong concern about the serious incidents that occurred on 10 June along the frontier between Djibouti and Eritrea, which led to several deaths and dozens of wounded.

"The Security Council condemns Eritrea's military action against Djibouti in Ras Doumeira and Doumeira Island.

"The Security Council calls upon the parties to commit to a ceasefire and urges both parties, in particular Eritrea, to show maximum restraint and withdraw forces to the status quo ante.

"The Security Council urges both parties, in particular Eritrea, to cooperate and engage in diplomatic efforts to resolve the matter peacefully and in a manner consistent with international law.

"The Security Council welcomes the efforts of the African Union, the Arab League and those States that have offered their assistance and calls upon the parties, in particular Eritrea, to engage fully in efforts to resolve the crisis.

"The Security Council encourages the Secretary-General urgently to use his good offices and reach out to both parties, as appropriate and in coordination with regional efforts, to facilitate bilateral discussions to determine arrangements for decreasing the military presence along the border and to develop confidence-building measures to resolve the border situation."



United Nations

S/2008/602

Security Council

Distr.: General
12 September 2008
English
Original: French

Letter dated 11 September 2008 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council

I have the honour to bring to your attention the attached report of the United Nations fact-finding mission on the prevailing situation between Djibouti and Eritrea.

The fact-finding mission visited Djibouti and Ethiopia from 28 July to 6 August 2008, in accordance with the consultations held by the Security Council on 24 June 2008 on the situation between Djibouti and Eritrea. The mission did not obtain approval from the Eritrean authorities to visit Eritrea.

I should be grateful if you could bring this report and its annexes to the attention of the Security Council members.

(Signed) **Ban Ki-moon**

[Original: English]

Report of the United Nations fact-finding mission on the Djibouti-Eritrea crisis

28 July-6 August 2008

I. Introduction

1. Between 10 and 12 June 2008, serious clashes were reported between the Djibouti Armed Forces (DAF) and the Eritrean Defence Forces (EDF) along the undemarcated border between Djibouti and Eritrea, in an area known as Doumeira.¹ The clashes reportedly caused over 35 deaths and left dozens wounded on both sides, as well as some internal displacement at least on the Djibouti side. The clashes at Doumeira followed several weeks of military build-up and growing tension between DAF and EDF (which were in close proximity to each other) since April 2008. Following contacts with the Permanent Representatives of both countries, and at its request, the Security Council was briefed on the crisis between Djibouti and Eritrea by the Department of Political Affairs at three meetings, on 14 May and 12 and 24 June 2008.

2. In the aftermath of communications from Djibouti and Eritrea to the President of the Security Council, and pursuant to the statement issued by the President of the Council on 12 June (S/PRST/2008/20), in which the Council encouraged the Secretary-General “urgently to use his good offices and reach out to both parties ... to facilitate bilateral discussions to determine arrangements for decreasing the military presence along the border and to develop confidence-building measures to resolve the border situation”, the Secretary-General directed the Department of Political Affairs to dispatch a fact-finding mission to the two countries to assess the political, security and humanitarian situation in the area. The mission was initially scheduled to visit Djibouti and Eritrea, as well as Ethiopia: Ethiopia shares a common border with both countries in the area of Mount Musa Ali and is also the current Chair of the Intergovernmental Authority on Development (IGAD). However, it was not possible for the fact-finding mission to visit Asmara or the Eritrean side of the border to ascertain the prevailing situation. In spite of several discussions and requests in New York and Asmara, the Eritrean authorities refused to issue visas to the mission.

3. As a result, the terms of reference of the mission were amended to include only visits to Addis Ababa — for consultations, including with the African Union, the League of Arab States and relevant Ethiopian Government officials — and Djibouti — for consultations with the Djibouti authorities. It was also envisaged that the mission would undertake a field visit to Doumeira and meet with the United Nations country team in Djibouti. The mission was led by Sam Ibok, Deputy Director, Africa II Division, Department of Political Affairs, and comprised the following members: Arnaud Huannou, Political Affairs Officer in the Department of Political Affairs; Douglas Langrehr, Military Planner in the Department of

¹ The Doumeira area comprises a mountain, Ras Doumeira, and the nearby Doumeira Island.

Peacekeeping Operations; and Laurent Dufour, Humanitarian Affairs Officer in the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

II. Organization of work

Addis Ababa (28-31 July and 4-6 August)

4. The fact-finding mission visited Addis Ababa from 28 to 31 July and 4 to 6 August. In keeping with its terms of reference, the mission discussed the situation between Djibouti and Eritrea with several key interlocutors from the African Union, the League of Arab States and the Ethiopian Ministries of Defence and Foreign Affairs.²

Djibouti (1-4 August)

5. While in Djibouti, the mission met with several members of the Government, some key members of the diplomatic corps, the United Nations Resident Coordinator for Djibouti and several colleagues representing various United Nations programmes and agencies.³ The mission was received in audience by the President of Djibouti, Ismail Omar Guelleh, on the last day of its visit.

6. Throughout its activities in Addis Ababa and Djibouti, the mission sought to organize its work and the execution of its terms of reference to, inter alia, achieve a better understanding of the following critical aspects: (a) the state of relations between Djibouti and Eritrea (both past and present), including an appreciation of the series of conventions, treaties and protocols that defined the frontier between the two territories at different points in the nineteenth and twentieth centuries; (b) the chronology of events that led to the clashes of 10 to 12 June; (c) developments in the border area since the clashes occurred; (d) the current military, security and humanitarian situation in the border area; and (e) the efforts undertaken by the African Union, the League of Arab States and the African, Caribbean and Pacific Group of States to defuse the tension and create an enabling environment for dialogue between the two States.

7. In addition to its meetings and the visit to Ras Doumeira, the mission was able to review a number of reports and other documents describing and analysing the current situation between Djibouti and Eritrea. A better appreciation of the history of the border between the two countries was particularly useful in trying to understand the possible motives behind what had been widely reported as an Eritrean occupation of Djibouti territory in Doumeira since March 2008. As would be expected, such an appreciation was possible only with the full cooperation and facilitation of the authorities in Djibouti.

III. Highlight of the mission

8. The main highlight of the mission's visit to Djibouti was the field trip to Ras Doumeira, along the border with Eritrea, where fighting took place between 10 and 12 June. Prior to driving by road to Ras Doumeira, the mission visited the

² See annex II.

³ See annex III.

headquarters of DAF in Moulhoulé, where it received a briefing on the situation at the border, under the auspices of the Djibouti Chief of Staff, General Zakaria Cheikh Ibrahim.

9. The visit to Ras Doumeira was particularly useful in that it allowed the factfinding mission to (a) be informed about the nature and magnitude of the deployment of the two armies and (b) assess the potential for and the possible impact of a resumption of hostilities in the short and medium terms.

IV. History of the Djibouti-Eritrea border and implications for the status of Doumeira

10. Most of the border between Djibouti and Eritrea was never officially demarcated. An 1897 treaty between France (the colonial power) and King Menelik II of Ethiopia⁴ defined the north-eastern section of the border between Djibouti and Eritrea from the northernmost tip of Ras Doumeira to Bissidirou. However, that particular section of the border was never demarcated on the ground. The exact position of the land boundary in Ras Doumeira is critical for establishing whether Eritrea has actually occupied Djibouti territory since March, as claimed by the Djibouti authorities. The position of the borderline would also be critical if the two States were to negotiate their maritime boundary on the Red Sea.

11. The status of Doumeira Island is also yet to be determined. The France-Italy protocols of 1900 and 1901 gave France and Italy joint sovereignty over the island, which the two colonial powers undertook to keep free of occupation, be it by one of them or by third parties. The Djibouti authorities estimate that the protocols reduced the territory of Djibouti by some 2,000 square kilometres by repositioning the land boundary with Eritrea about 40 kilometres below its position under the 1897 treaty.

12. A 1935 agreement between France and Italy allocated Doumeira Island to the then Italian-ruled Eritrea. That agreement also moved the continental frontier further south into territories previously considered to belong to Djibouti under the 1897 treaty and the protocols of 1900 and 1901. Under the 1935 agreement, Ras Doumeira and Doumeira Island, both of which were “seized” by EDF in March 2008, form part of Eritrean territory, by Eritrean reasoning. However, that agreement was never ratified, which is why Djiboutians have all along assumed that the protocols still apply.

13. In January 1954, France and Ethiopia signed a protocol to demarcate the frontier between the French territory of Djibouti and Ethiopia (which then included Eritrea). However, the on-ground demarcation was done only between Dirko Koma (near Mount Musa Ali) and Daddato, leaving the long section of the border that goes from Daddato to the Red Sea undemarcated.

14. From the contacts that the mission had in Djibouti, it emerged that although most of the border was never demarcated, there seemed to be a general consensus (both inside and outside the region) that the borderline between Djibouti and Eritrea should be as stipulated in the protocols of 1900 and 1901. This, the mission was

⁴ The 1897 treaty, the 1900 and 1901 protocols, the 1935 agreement and the 1954 protocol are reproduced in annex I below.

informed, was the general understanding of Djiboutians and the basis for their bilateral and fraternal relations with Eritrea.

15. The mission was able to establish that there are major divergences in the views of both countries. For instance, in spite of the general understanding of Djiboutians referred to above, Eritrea made an attempt in 1996 to seize control of Ras Doumeira, including by publishing a border map based on the 1935 agreement. The ensuing dispute between the two countries was short-lived and was resolved through bilateral mechanisms, but the question of the borderline remained unresolved.

16. Some interlocutors of the mission felt that the current tensions could have been avoided if the two countries had reached a final ruling on the position of their border after their 1996 dispute.

V. Chronology of developments leading to the clashes of 10 to 12 June

17. The refusal of Eritrea to receive the United Nations fact-finding mission to ascertain the facts on the ground meant that only the Djibouti version and chronology of events was made available to the mission. During its visit to Djibouti, the mission was given the following chronology of events by the authorities of that country:

(a) 4 February 2008: administrative officials in the Obock region (Djibouti) alert their national authorities to civil engineering works taking place on the Eritrean side of the border. When approached by the Obock administration, the Eritrean workers affirm that the works in question are part of a road construction project that would link Obock to Assab in Eritrea. Since the two countries had previously agreed that Eritrea could construct such a road, the Obock administration presumed that the Eritrean Government would notify the Djibouti authorities before the construction team crossed the border into Djibouti territory;

(b) 10 February: Eritrean road construction machines and personnel cross the border and start construction works in Ras Doumeira without any communication between the authorities of the two countries. Over the period from 15 February to 30 March, the local authorities of Obock make several approaches to their Eritrean counterparts but fail to elicit an explanation for the unauthorized incursion into Djibouti;

(c) Mid-March: EDF elements cross the border in large numbers, occupy Ras Doumeira and Doumeira Island, and proceed to dig trenches and fortifications in the occupied areas;

(d) 7 April: the Prefect of Obock and a Djibouti military officer who intended to visit Ras Doumeira to investigate the situation are turned back by EDF;

(e) 17 April: DAF personnel deploy in Ras Doumeira and position themselves in close proximity to the EDF presence;

(f) 18 April: the Government of Djibouti initiates bilateral diplomatic contacts with Eritrea to obtain the withdrawal of EDF from its territory. The contacts include (i) a diplomatic note to the Eritrean Government, (ii) a telephone conversation between the two Heads of State on 20 April at the initiative of the

President of Djibouti and (iii) a meeting between the two Foreign Ministers on 21 April in Djibouti;

(g) 22 April: the President of Djibouti visits the border area, ostensibly at the suggestion or direct request of the President of Eritrea made on 20 April 2008, when the two leaders engaged in a telephone conversation (the rationale for the request of the President of Eritrea to his Djibouti counterpart was that the capital of Djibouti is closer to the area/border than Asmara). On the ground, the President of Djibouti establishes the fact that EDF has completely occupied Ras Doumeira and erected camps and fortifications, while fast, armed patrol boats and another patrol vessel have docked at the creek adjacent to Ras Doumeira. Following the visit of the President of Djibouti to the border, subsequent efforts to contact his Eritrean counterpart, to share his findings with him, are unsuccessful. The President of Djibouti is repeatedly told that his Eritrean counterpart is unavailable to take his calls;

(h) 23 April: Eritrean authorities refuse to receive the Foreign Minister of Djibouti, who was dispatched by his President to visit Asmara. The Foreign Minister was carrying a letter from the President of Djibouti to his Eritrean counterpart;

(i) 23 to 28 April: the Djibouti Ambassador to Eritrea tries unsuccessfully to engage the host Government on the growing dispute;

(j) 24 April: a meeting between two high-level military officers of the two countries is held in Ras Doumeira to discuss the situation. A Joint Military Committee comprising senior officers of the two countries is established to monitor the military situation and create a buffer between the positions of the two armies. Unfortunately, this is the first and last meeting of the Committee. All subsequent attempts by DAF to re-establish contact with EDF fail. The General who led the EDF delegation to the meeting of 24 April is never to be seen or heard from again;

(k) Mid-April to 10 June: while EDF and DAF are positioned at the border within a few metres of each other, over 50 Eritrean soldiers of various ranks (the exact number is yet to be established) desert their army and seek asylum on the Djibouti side. The deserters receive the protection of DAF, which refuses to heed appeals from EDF to return them. EDF issues several ultimatums and threatens reprisals if the deserters are not returned;

(l) 10 June, 1215 hours: another EDF officer deserts and crosses the border into Djibouti. DAF again offers protection, as had been the case with the previous deserters. Again, EDF commanders demand the return of the deserter, this time within an hour. DAF ignores the ultimatum;

(m) 10 June, 1840 hours: EDF opens fire at DAF while the majority of Djibouti soldiers are busy praying. The ensuing clashes last more than 24 hours. About 44 DAF soldiers are believed killed, 19 are missing in action. The number of casualties on the Eritrean side is unknown, but unconfirmed reports indicate that Eritrean losses are not considerable;

(n) After 10 to 12 June: following the growing expressions of international concern and the deliberations of the Security Council, which, inter alia, called for a pullback of the forces to their previous positions, DAF withdraws to about 4 or 5 kilometres from the Eritrean positions. The fact-finding mission was able to confirm the pullback on the ground. For its part, EDF ignores the calls for a withdrawal from

its positions on the heights of Ras Doumeira, or at least the mission was not able to ascertain the reactions of EDF to the Security Council's call for withdrawal from the newly occupied positions.

VI. Initiatives by the African Union and other organizations and efforts by bilateral actors

African Union

18. On 24 April 2008, the Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Djibouti addressed a letter to the Chairperson of the African Union Peace and Security Council to inform him that Eritrea had been occupying part of the Djibouti territory in Doumeira since 16 April 2008. He requested the Peace and Security Council to send a fact-finding mission to assess the situation. He also recalled that in 1996, Eritrea had made a "military incursion in the area and published a map where the borderline between the two countries had been modified".

19. The 121st, 125th and 130th meetings of the African Union Peace and Security Council, held on 24 April and 2 and 26 May, respectively, reviewed the situation and underscored the urgent need to dispatch a fact-finding mission, as requested by Djibouti. Thereafter, the African Union Commission sent messages to the authorities of Djibouti and Eritrea, informing them that it intended to dispatch the envisaged mission from 5 to 9 June. On 2 June, Djibouti indicated its readiness to receive the mission on the dates communicated. Accordingly, a mission from the African Union Commission visited Djibouti during the aforementioned period. The mission went to Doumeira, where it noted "a very tense situation", with the two armies positioned at "less than three metres facing each other". The African Union mission was also able to observe "important civil engineering works and long trenches dug on the sides of the [Ras Doumeira] mountain". The mission did not receive the approval of the authorities in Asmara to visit Eritrea.

20. At its 136th meeting, on 12 June, the African Union Peace and Security Council received the report of the African Union fact-finding mission and issued a communiqué in which it "noted with regret that the Eritrean authorities had not yet accepted to receive the mission" and "urged the two countries to show utmost restraint" and "resort to dialogue to resolve any bilateral dispute". The Peace and Security Council further "called for the immediate return to the situation prevailing at the common border between the two countries, including the withdrawal from the border of all forces that have been positioned there since 4 February 2008".

21. Up to the time of finalizing the present report, the African Union was still waiting for Eritrean officials to receive its mission. The African Union remains hopeful that, following preliminary contacts between the President of Eritrea and the Chairperson of the African Union Commission on the margins of the Tokyo International Conference on African Development, as well as contacts with the Foreign Minister of Eritrea on the margins of the African Union summit in Sharm el-Sheikh, a long-awaited invitation to Chairperson Ping to visit Asmara and hold consultations with the Eritrean authorities may still be a possibility. However, the African Union also acknowledged its limitations, especially since Eritrea does not attend African Union meetings in Addis Ababa because of its dispute with Ethiopia.

League of Arab States

22. Before the African Union mission, the League of Arab States had dispatched its own fact-finding mission to Djibouti and Eritrea, in early May. The mission was received in Djibouti and benefited from the full cooperation of the Djibouti authorities. The mission also sought to meet with Eritrean officials but was not issued visas to Eritrea. Further to its mission, the League of Arab States urged dialogue between the two countries to resolve the crisis and called on Eritrea to withdraw its troops from Doumeira.

Intergovernmental Authority on Development

23. The 12th IGAD Summit, held in Addis Ababa on 14 June 2008, also discussed the situation between Djibouti and Eritrea. In its final communiqué, the Summit expressed concern over “the recent military attack by Eritrean troops” in Ras Doumeira and “called upon both parties, in particular Eritrea, to accept mediation to resolve the crisis through peaceful means and return to the status quo ante”.

24. During the fact-finding mission’s discussion with senior officials of IGAD in Djibouti, the subregional body also acknowledged its limitations in dealing with the crisis, considering that Eritrea had suspended its membership in IGAD in April 2007. There are ongoing efforts to encourage Eritrea to return to IGAD. Should those efforts succeed, IGAD could conceivably be positioned to play a role in efforts to defuse the tension between Djibouti and Eritrea.

African, Caribbean and Pacific Group of States

25. A fact-finding mission mandated by the Committee of Ambassadors of the African, Caribbean and Pacific Group of States in Brussels visited Djibouti in late July 2008. The mission met with the President of Djibouti and other Government officials and undertook a field visit to Doumeira. The mission was not, however, able to visit Eritrea, nor was it able to discuss the situation at the Djibouti-Eritrea border with any Eritrean official.

European Commission

26. The European Commissioner for Development and Humanitarian Aid, Louis Michel, seems to be the only publicly known international official who visited Asmara in the immediate aftermath of the clashes of 10 to 12 June. He is reported to have visited Eritrea on 14 and 15 June and conferred with the President of Eritrea, including on the crisis with Djibouti. The United Nations fact-finding mission was unable to meet with Commissioner Michel due to time constraints and scheduling difficulties.

Bilateral efforts

27. Since the outbreak of the crisis between Djibouti and Eritrea, a number of friends and neighbouring countries have offered their assistance to facilitate a peaceful resolution of the dispute. The best known of these offers of facilitation include those from Qatar and Yemen. The outcome of such offers was not disclosed to the fact-finding mission during its visits to Addis Ababa and Djibouti.

VII. Key findings of the United Nations fact-finding mission

A. Military situation in Doumeira

28. From photographs provided by the Government of Djibouti and confirmed during the mission's visit, Ras Doumeira is a barren, rocky feature jutting out into the Red Sea, in an area between Djibouti and Eritrea. On the northern side of Ras Doumeira is a small inlet that has reportedly been improved by EDF in order to construct a harbour (some interlocutors of the mission claimed that it was a small naval facility) and to gain access to the top of the feature from the Eritrean side. Until that work was done, the only access to the summit of Ras Doumeira was from the Djibouti side to the south. East of Ras Doumeira lies Doumeira Island, which appears to have once been an extension of Ras Doumeira.

29. According to a 1954 map shown to the mission by the Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Djibouti, both the eastern section of Ras Doumeira and Doumeira Island belong to Djibouti, although that section of the border remains to be formally demarcated. Both Ras Doumeira and Doumeira Island overlook the Bab el-Mandeb Strait, which is between the Djiboutian coast and Yemen about 35 kilometres north-west of the proposed location where the recently announced multi-million dollar bridge between Djibouti and Yemen (a massive investment and engineering works bringing together consortiums of Arab industrialists and Gulf countries) will be constructed. From the summit of Ras Doumeira, a force can observe and dominate the land approaches to Eritrea from the south, as the remainder of the border follows the course of the Weima River, which may be an obstacle to armoured and wheeled vehicles.

30. The fact-finding mission was able to visit the area on 3 August 2008 and viewed the disputed site from a distance with binoculars. It was difficult to assess the defensive earthworks (photographic evidence produced by Djibouti) that had reportedly been constructed on Ras Doumeira by EDF. The Djibouti military provided a very good situation brief to the mission with details and photographs of the background, military build-up and repositioning of DAF. According to that brief, EDF had undertaken extensive development of its positions, making stone-pitched communication trenches that encircled the eastern tip of Ras Doumeira and fortifications at intervals along the trenches.

31. The mission found that the Djibouti military had withdrawn four to five kilometres from the disputed area, in accordance with the Security Council's presidential statement of 12 June 2008 (S/PRST/2008/20), in which the Council urged "both parties ... to show maximum restraint and withdraw forces to the status quo ante". DAF, supported logistically by the French military (in accordance with a 1977 defence treaty between France and Djibouti) has adopted a defensive posture beyond the mortar range of EDF. From the position where the mission observed the developments on Ras Doumeira, it was not obvious whether the Eritrean military were still developing what a number of interlocutors referred to as their "defensive positions" on the mountain. Some interlocutors claimed that EDF had deployed anti-aircraft weapons as part of their fortifications, although the mission was unable to clearly identify those or any other weapon systems from its observation point south of the disputed zone. Also, the mission was not in a position to determine whether EDF had already accomplished its mission (deployment) in the area, nor

was it able to definitely conclude that the new facts that had been established on the ground would become the new reality in Ras Doumeira.

32. Some military interlocutors consulted by the mission suggested that the EDF presence on Ras Doumeira consists of about one battalion, supported by a platoon of artillery and a platoon of armour and engineers who are constructing the fortifications and the small naval facility. In total, it was alleged that the Eritrean forces might number between 500 and 600 troops, although they could be quickly reinforced with troops from the port of Assab or other locations close to the border.

33. The Djiboutian military, on the other hand, has approximately one battalion each of infantry, artillery and armour corps deployed forward for area defence under very harsh conditions. Beyond the deployment of men and armour, there are requirements for close air support, attack aviation, artillery and possible naval gunfire support for any offensive military action against Ras Doumeira. The Djibouti military is unable to field such a force without significant support. In addition, it would be difficult for DAF to sustain a force of about 1,000 troops in the field for much longer, as its total force averages 4,400, including the gendarmerie, which comprises about 800 personnel.

34. Presently, the security situation on the ground could be described as stable but tense, exacerbated by extreme conditions in the area at this time of year. It is not clear how long EDF are prepared to hold the disputed sites. Djibouti seems prepared to defend its territory, although it continues to pursue diplomatic and political channels to peacefully resolve the issue. As the mission was unable to consult with the Eritrean authorities, it is difficult to determine the exact reasons why Eritrea has undertaken this venture and what future actions can be expected from the Eritrean side. However, it is unlikely, both from the mission's observation and from the perspectives of military experts familiar with the region, that EDF will undertake further advances into Djibouti territory.

35. An incontestable fact established by the fact-finding mission was that a stalemate situation has developed between Djibouti and Eritrea and that it can be resolved only through diplomatic means, especially because the current levels of military deployment are unsustainable and place an unfair burden on the peoples of both Djibouti and Eritrea.

B. Impact of the crisis on relations between the two States

36. Until June 2008, Djibouti and Eritrea had maintained fairly good bilateral relations. During the fact-finding mission, the point was routinely made that Djibouti is the one neighbouring country (apart from Saudi Arabia and possibly the Sudan) with which Eritrea had enjoyed good relations until the outbreak of the current dispute. By the account of the Djibouti authorities, it was out of such considerations that Djibouti tried in the first place to resolve the current crisis at the leadership level and through existing bilateral mechanisms between the two countries. Key among those mechanisms are a July 2006 agreement between the Ministries of Defence of the two countries, based on a treaty of friendship and cooperation between Eritrea and Djibouti, and an agreement on security matters signed in December 1995.

37. The mission was informed that, under the 2006 agreement, the two countries undertook to respect their respective borders and agreed to set up a Joint Military and Technical Committee, which would meet every six months or as requested by either party. It was further agreed that the Committee would meet once a year at both the ministerial and the military command levels. At this critical time in the history of relations between the two countries, all the aforementioned mechanisms seem to have become inoperable, a situation that the Djibouti authorities attribute to the lack of political will of the Eritrean leadership and its non-transparency as far as its real intentions are concerned.

38. Since the beginning of the current tensions, relations between Djibouti and Eritrea have significantly deteriorated, prompting Djibouti to recall its Ambassador to Eritrea and to expel Eritrea's Ambassador to Djibouti in June 2008. All diplomatic relations between the two countries are currently suspended, as Eritrea continues to downplay the gravity of the situation and to rebuff all attempts by regional and international organizations, including the United Nations, to help both countries defuse the tension.

39. Considering the scale of the current crisis, which has already led to significant loss of human life, and given the disruption of bilateral relations between the two States, only a high-level political intervention accepted by Eritrea can bring about a de-escalation of the tension and persuade the parties to demilitarize their common border and return to the status quo ante. The mission would strongly advise against further military action by either party, as there is definitely no military solution to the ongoing dispute. On the contrary, the mission felt a great need for rebuilding confidence between the two States and for healing the wounds that the crisis is creating on a daily basis.

C. Humanitarian impact of the crisis

Impact on the local population in Obock district

40. The border dispute takes place in the most arid and least populated district of Djibouti. It is only recently that its main town, Obock, was connected to the rest of the country by an asphalted road. According to the Obock district doctor, about 60,000 people, mostly pastoralists, live in this region of Djibouti. The pastoralists regularly cross borders in search of better pasture and water sources, depending on the season. Most of those living near the borders with Eritrea and Ethiopia are nomads who do not carry any national identification documents and who move freely with their livestock from one territory to the other. The current drought has particularly affected the northern and eastern parts of Obock district. Malnutrition rates have reached alarming levels and a significant percentage of the population depends on food aid and/or water trucking.

41. The clashes of 10 to 12 June 2008 and the subsequent militarization of Doumeira and Moulhoulé have reportedly caused the displacement of some 207 families, which were temporarily relocated to two sites in the Obock district, called Andoli and Khor Angar. All the displaced families are current beneficiaries of the World Food Programme food aid and those in Khor Angar receive water trucking organized by the national authorities with assistance from the United Nations Children's Fund (UNICEF) for fuel supply and maintenance. The fact-finding

mission was not able to visit the displaced families, as the aforementioned relocation sites were both quite far from Doumeira.

42. Although the number of displaced persons is relatively low, the militarization of the border area has had a negative impact on the population of the area in many ways. First, the sudden influx into the area of hundreds of armed forces personnel has further overstretched the scarce resources available, water and pasture in particular; UNICEF is concerned that one of the few boreholes in the area is now exclusively used to supply water to the Djibouti military. Second, the closure of some 80 kilometres of border between Djibouti and Eritrea disrupts traditional migrations and threatens the livelihood of pastoralists in both countries, as well as in Ethiopia. Third, the closure of the Djibouti-Eritrea border has caused several families to split, with some family members left on the Djibouti side while others are on Eritrean-controlled territory. Most of the affected families are without information on the whereabouts of their separated members.

Protection issues

43. Currently, the most serious concerns are related to protection. Nineteen Djiboutian combatants have reportedly been missing in action since the clashes of 10 to 12 June. The list of missing Djibouti personnel was forwarded to the International Committee of the Red Cross (ICRC) during its recent ad hoc mission to Djibouti. ICRC was also able to visit 19 Eritrean combatants detained as prisoners by the Djibouti authorities since the clashes. Another ICRC visit to Djibouti was scheduled for mid-August.

44. ICRC has a presence in Eritrea, but authorities there have so far denied the occurrence of the border incidents of 10 to 12 June. Consequently, it has been impossible for ICRC to ascertain the presence of Djibouti prisoners of war in Eritrea as a result of those incidents.

45. As stated above, a number of Eritrean soldiers and officers have deserted EDF and crossed over into Djibouti since the beginning of the crisis. According to the Secretary-General of the Djibouti Ministry of Interior, 36 Eritrean deserters are currently under the responsibility of the Djibouti authorities of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has received unconfirmed reports that up to 100 Eritrean deserters are now in Djibouti and more continue to arrive, some of them high-ranking EDF officers). The Djibouti Ministry of Interior has approached UNHCR with a request that it shelter and assist the deserters, as well as help determine their status.

46. UNHCR has a strict policy for dealing with combatants and ex-combatants: deserters are considered separately from other refugees or asylum-seekers. They are placed under the protection of the host Government, and no direct UNHCR assistance can be provided to them without the approval of the Deputy High Commissioner. In order to determine whether deserters qualify for refugee status, proof has to be established that they renounced any military activity long before claiming the status of refugees. Strict exclusion clauses also apply to individuals who have committed serious human rights violations or war crimes. The mission was assured that UNHCR will support the Djibouti authorities in determining the status of the Eritrean deserters currently on Djibouti soil.

47. Resettlement to a third country is possible for EDF deserters who obtain the status of refugees. This could be a confidence-building measure and could potentially ease tensions on this sensitive issue. The future of those who will not be granted refugee status will have to be clarified as well, particularly whether the Djibouti authorities should treat them as prisoners of war. However, a more detailed consideration of this issue was considered to be outside the scope of this fact-finding mission .

Treatment of the wounded

48. Following the clashes of 10 to 12 June, about 55 Djibouti combatants were evacuated and treated by the French military. If needed, the French military, ICRC and the non-governmental organization Médecins sans frontières (each of which has a small presence in Djibouti) could provide additional supplies for the treatment of war-wounded combatants and civilians.

VIII. Observations

49. An important fact established by the mission is that the Djibouti authorities find it intolerable that a neighbour should attack their country, occupy their sovereign territory and, worse still, refuse to engage in dialogue or explain its actions. The fact-finding mission found the situation at the border to be very tense and the attitude of the people of Djibouti one of heightened expectations, especially in respect of the United Nations. Throughout the mission's visit to Djibouti, the authorities of the country strongly expressed their disappointment at being betrayed by a neighbour, Eritrea. Among the limited constituents of the population that the mission came into contact with, there was frustration and indignation at the fact that Djibouti is being unfairly targeted and drawn into a senseless crisis as a way of diverting the country's attention from its developmental efforts and its endeavour to improve the living conditions of its population.

50. Within the Djibouti military, there was anger over the actions of EDF and the studied silence of the Eritrean leadership, as if it were normal behaviour to occupy parts of the sovereign territory of another country. Many senior officers expressed to the mission, in very strong terms, their discomfort with having to accept the fact that the Djibouti army was made to withdraw from its territory after Eritrea had forcibly occupied Doumeira. While they claimed that they had withdrawn in response to the calls made by the Security Council, they contrasted their action with that of Eritrea, which not only occupied sovereign Djiboutian territory, but refused to engage with Djibouti or cooperate with efforts by the international community to defuse the crisis. By so doing, Eritrea could deliberately or unwittingly provoke Djibouti into another senseless war in the Horn of Africa.

51. Having exhaustively examined all the facts at its disposal, the mission wishes to highlight the following specific observations:

(a) Recent developments at the Djibouti-Eritrea border, especially the militarization of Doumeira, constitute a threat to the stability and socio-economic development of Djibouti. The ongoing tension poses a considerable risk to the country's internal peace and security, as it could potentially expose the democratically elected Government of Djibouti to undue pressure from an indignant Djibouti military, eager to reclaim Doumeira from EDF by force. Should the

Eritrean occupation of Doumeira be allowed to prevail as a *fait accompli*, it is possible that the Djibouti military could begin to perceive the country's political leadership as weak and unable to deal with the ongoing occupation of Djibouti territory. Such a scenario could easily bring about political instability. Besides, the mobilization of the Djibouti army at the border is clearly unsustainable and would constitute a huge haemorrhage on the limited resources of the country;

(b) If not addressed in a timely and comprehensive manner, the Djibouti-Eritrea issue could have a major negative impact on the entire region and the wider international community. The possible destabilization of Djibouti and the militarization of the Bab el-Mandeb Strait do not augur well for peace in the region or for international shipping and investment. Solutions must therefore be found, as a matter of the utmost priority;

(c) The mission has identified an interrelation between the Ethiopia-Eritrea conflict and the Djibouti-Eritrea crisis. Even though this issue was never discussed extensively during the mission, it is almost certain that a breakthrough in the Ethiopia-Eritrea peace process will go a long way towards securing the cooperation of Eritrea in efforts to demilitarize its border with Djibouti. Any progress in resolving the Ethiopia-Eritrea issue would also be likely to encourage Eritrea to accept an international arbitration process that would lead to a mutually accepted demarcation of the Djibouti-Eritrea border. One should not underrate the formidable impact of the protracted Ethiopia-Eritrea dispute on peace and stability in the entire Horn of Africa, given especially the frustration of Ethiopia and Eritrea at the lack of progress on this issue since the Ethiopia-Eritrea Boundary Commission ruling in April 2002. The members of the fact-finding mission share the increasingly accepted view that much of the instability in that region is related to unfinished business and the unresolved Ethiopia-Eritrea dispute, particularly their efforts to counter each other's (real or perceived) interests and actions in the region, be it in Djibouti or in Somalia;

(d) Eritrea has good experience in judicial processes and arbitration for resolving border disputes, including those with Ethiopia and Yemen. If it believes it has a border dispute with Djibouti, Eritrea should be encouraged to state so publicly and submit a case to a political and/or judicial process or arbitration to resolve it;

(e) In the short term, there may be no satisfactory resolution of the dispute without the full cooperation of both countries, especially Eritrea. Yet the situation must not be allowed to become another endless border dispute where facts are changed on the ground and two neighbours get dragged into endless disputes over how to deal with that new reality on the ground. Eritrea cannot continue saying that it has no issue with Djibouti when there is so much overwhelming evidence to confirm that there is a problem. Given that its actions are adversely affecting another country, Eritrea has an obligation to engage in dialogue over the situation that prevails in Doumeira.

IX. Recommendations

52. Through the present report, the fact-finding mission wishes to underscore the need for urgent political action to end the crisis between Djibouti and Eritrea. It seems obvious (even without knowing the true intentions of the Eritrean authorities) that neither side wants further deterioration in their relations or an escalation in the

mobilization of forces or hostile rhetoric. The United Nations seems best placed to help defuse the tension, if there is political will to resolve the crisis peacefully on both sides. Set out below are the key (interim, pending a visit to Eritrea) recommendations of the mission.

A. Conclusion of the work of the fact-finding mission

53. The offer of the good offices of the Secretary-General to defuse the tension between Djibouti and Eritrea should be renewed as a matter of the utmost priority. To provide momentum for such a political process, both countries must be made to believe that it is in their vested interest to have a balanced fact-finding mission, which would reach conclusions only after hearing from both sides. The Djibouti authorities have so far cooperated and facilitated the work of the fact-finding mission; the onus is now on the Eritrean leadership. If Eritrea alleges an invasion by Ethiopia or aggression by Djibouti, as it has done, then it has an international obligation and responsibility to cooperate with the United Nations to establish the facts. To convey the importance that the Secretary-General and the Security Council attach to an early solution to the crisis, and to enhance the confidence of the Eritrean authorities in the process, the Under-Secretary-General for Political Affairs, who undertook an earlier successful mission to Asmara, could return to the Eritrean capital in the coming weeks to consult with the Eritrean leadership.

54. The grace period for the Eritreans must not be open-ended. The engagement must be prepared in such a way that it does not draw the United Nations into any polemical arguments and political rhetoric. The Eritreans should be given a specific time frame to issue the necessary visas and facilitate the work of the mission, including on-the-spot visits to the Eritrean side of the deployment in Doumeira.

55. There are high expectations, and even demands, placed on the United Nations to deploy the maximum efforts to get the two countries out of the quagmire in which they find themselves. The current situation between Djibouti and Eritrea, notably the crisis at the border and the breakdown in diplomatic relations, should not be allowed to fester, even if on the surface the area seems “calm and quiet”, as some have indicated.

B. Confidence-building through demilitarization and better treatment for deserters

56. A major priority for the United Nations and all international actors should be to persuade the two parties, Eritrea in particular, to demilitarize the border and return to the status quo ante as at February 2008. Not much would be achieved in terms of a negotiated political solution with the current state of mobilization of forces in the affected area. The Djibouti army has since pulled back. It is only logical that the Eritrean forces do the same, as was demanded by the Security Council. No country should be allowed to disregard the decisions of the Security Council with impunity, as this would not augur well for peace and security in the region and globally.

57. The mission recalls that the clashes of 10 to 12 June came after weeks of growing tension at the border and were partly the result of disagreements between

DAF and EDF over the treatment to be applied to EDF deserters who crossed into Djibouti between April and June 2008. It is therefore likely that any effort by the United Nations to facilitate dialogue between the two countries on the future of the deserters would be welcomed by Eritrea and could consequently serve as an important confidence-building measure. There are indications that ICRC is in contact with the authorities of both Djibouti and Eritrea on the issue of prisoners of war and those missing in action, as well as, to a certain extent, the reported deserters. The nature and exact substance of that engagement or its outcomes are not immediately known to the fact-finding mission. If the indications are true, ICRC and both countries should be encouraged to pursue that humanitarian initiative, quietly and away from the political limelight. At this point, more than any other action, this could encourage dialogue, generate political space and create an entry point for defusing the tension.

C. Political and judicial frameworks (arbitration)

58. Even if Eritrea and Djibouti have so far refrained from saying so, there is an undemarcated and possibly disputed border between the two countries. The existence of several colonial treaties and protocols, as well as at least three different maps and borderlines, indicates that the border inherited at independence could be under contention.

59. Reaching a final ruling on the position of the Djibouti-Eritrea border is arguably the ultimate and most rational solution to the current crisis. It is also the best insurance for preventing similar crises from erupting in the future. Long-term efforts to maintain peace between Djibouti and Eritrea should therefore focus on the initiation of a new political process or the reactivation of existing bilateral mechanisms for dealing with such problems. Where such a process does not deliver on the expected outcomes, both parties could seek recourse in an arbitration process that would culminate in a border demarcation ruling.

60. There is definitely a need for both countries to agree on which of the colonial treaties and protocols should be accepted as the basis for defining their common border (1897 Abyssinia-France treaty, 1900-1901 France-Italy protocols, 1935 France-Italy treaty). It is tragic that the two countries have been on the verge of war over treaties and protocols negotiated when they did not exist as independent States. Beyond the Organization of African Unity Cairo Declaration on the sanctity of borders inherited by African States at independence, recent experience of disputes, such as that of Chad and the Libyan Arab Jamahiriya over the Aouzou Strip, could be instructive in this regard.

61. In view of the above, United Nations efforts at resolving the Djibouti-Eritrea crisis should focus on providing the two countries with a platform to discuss their common border and agree on a fair process that would lead to the demarcation of their frontier. In this respect, the Secretary-General may wish to explore with the parties the possibility of availing them of his good offices to facilitate such discussion. The Department of Political Affairs seems best placed to facilitate dialogue between the two countries on demilitarizing the border and initiating a political process. Such a process should preferably take place under the leadership of a special envoy who would take over after the proposed visit of the Under-Secretary-General for Political Affairs to Asmara.

X. Conclusion

62. This is only a partial report by the fact-finding mission. Despite this limitation, it offers insight into the state of the relations between Djibouti and Eritrea. Hopefully, the authorities in Eritrea will respond positively and in a timely manner to the offer of good offices by the Secretary-General. The situation remains fragile, volatile and urgent. The uneasy calm that prevails should not lull the United Nations into complacency. In the event that the offer by the United Nations is again rebuffed by Eritrea, the matter should be referred to the Security Council for appropriate action. A sovereign country is being drawn into a crippling and unaffordable military mobilization, to deal with a situation that may ultimately threaten national, regional and international peace. For now, the fact-finding mission's conclusion is that there is still some scope for further political engagements, especially with Eritrea.

